

TARIK-ULUR PEMBATASAN
SOSIAL DI JAKARTA

CERITA DI BALIK KEMATIAN
WAKIL JAKSA AGUNG

TEMPO

ENAK DIBACA DAN PERLU

WABAH PHK

COVID-19 MENGEMPASKAN DUNIA USAHA.
JUTAAN BURUH TERANCAM DIPECAT.



00008

13-19 APRIL 2020
RP 45.000
www.j899.co
MAJALAH BERITA MINGGUAN
CSN: 1126 - 4201

9 770126 427892





Langka Obat Penyambung Nyawa

majalah,tempo.co

3 mins read



i



Langka Obat Penyambung Nyawa/Tempo

- Para pengidap human immunodeficiency virus (HIV) di Indonesia kesulitan memperoleh antiretroviral (ARV)
- Kementerian Kesehatan berencana membeli antiretroviral dari India, tapi terganjal wabah virus corona
- Pada 2008 Indonesia juga pernah mengalami kelangkaan antiretroviral

SEJAK awal 2020, para pengidap *human immunodeficiency virus* (HIV) di Indonesia kesulitan memperoleh antiretroviral (ARV) *fixed-dosed combination* (FCD). Padahal ARV FCD adalah obat kombinasi *tenofovir*, *lamivudine*, dan *efavirenz* yang wajib mereka konsumsi setiap hari seumur hidup untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh. Jika putus, akibatnya fatal. Virus yang menggerus kekebalan tubuh mereka bakal lebih resistan terhadap obat sehingga lebih sulit ditangani hingga berisiko kematian.

Pada Maret lalu, Kementerian Kesehatan berencana membeli antiretroviral dari India. Namun upaya tersebut belum bisa dilakukan karena terganjal pembatasan penerbangan dari India akibat wabah virus *corona*. Majalah *Tempo* pernah menulis laporan berjudul “Bila Penyambung Nyawa Langka” tentang kelangkaan antiretroviral pada 1 Desember 2008.

Suatu pagi di awal November 2008, Anton Sugiri menenggak neviral dan duviral. Obat yang namanya seperti anak kembar itu merupakan dua jenis antiretroviral, obat untuk pengidap HIV. Rutinitas menelan obat itu dijalani pria 30 tahun ini sejak 2005. Namun, tak seperti biasanya, setelah meminum obat pagi itu, Anton merasa pusing dan mual.

Malamnya, pria yang tahun lalu baru menikah ini menyesap tablet yang sama. Tiba-tiba ia merasa sekelilingnya berputar, lalu muntah-muntah. Badannya pun lemas. Anton lalu mengecek kemasan obat. Ternyata pada bungkusnya tercantum waktu kedaluwarsa November 2008. Ia menduga masa berlaku obat yang hampir habis itulah penyebab timbulnya efek samping tersebut. Mendekati akhir masa pakai, biasanya kualitas obat sudah menurun. “Apalagi kita tak tahu kualitas penyimpanan di sini,” ujarnya.

Anton tak sendiri. Menjelang peringatan Hari AIDS (*acquired immunodeficiency syndrome*) Sedunia pada 1 Desember ini, keluhan serupa diterima pengurus Jaringan Orang Terinfeksi HIV Indonesia di Jakarta. Menurut Abdullah Denovan, koordinator nasional organisasi ini, kejadian tersebut terkait dengan kelangkaan stok antiretroviral beberapa bulan terakhir. Karena ketiadaan stok, “Ada yang terpaksa berhenti minum obat, ada pula yang menerima obat berkualitas tak baik,” kata Denovan.

Kelangkaan terjadi di seluruh daerah. Di luar Jawa, kondisi lebih parah. Mengapa antiretroviral langka? Menurut Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Tjandra Yoga Aditama, hal itu terjadi karena dua hal: distribusi yang terganggu dan soal biaya. Selama ini, obat yang di dalam negeri diproduksi Kimia Farma itu dikirim Departemen Kesehatan pusat langsung ke rumah

sakit di daerah. Namun, dia menambahkan, kini jumlah orang terinfeksi HIV terus meningkat sehingga obat yang dikirim tak cukup dibagi untuk semua penderita.

Mengenai kurangnya dana, Tjandra menyatakan, meski setiap tahun ditingkatkan, anggaran antiretroviral tetap saja tak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan obat pasien yang jumlahnya setiap tahun meningkat. Departemen Kesehatan lantas mengalihkan sisa dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta menggunakan dana bantuan sosial departemen itu untuk pengadaan antiretroviral. "Stok dijamin aman sampai Maret 2009," begitu dia meyakinkan.

Berdasarkan data UNAIDS—lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menangani masalah AIDS—jumlah orang yang terinfeksi HIV di Indonesia hingga Agustus 2008 mencapai 270 ribu. Ini menempatkan Indonesia di urutan kelima dalam hal jumlah pengidap HIV/AIDS di dunia, sesudah India, Cina, Thailand, dan Vietnam.

Pada 2003, Badan Kesehatan Dunia (WHO) menganangkan program penggunaan antiretroviral secara luas. Pada 2004, pemerintah memberikan subsidi penuh untuk antiretroviral. Pada tahun itu juga, melalui keputusan presiden dan Menteri Kesehatan, Kimia Farma ditugasi memproduksi antiretroviral untuk kebutuhan dalam negeri. Namun itu belum cukup. Pemerintah masih butuh mengimpor antiretroviral dari India yang telah diakui WHO. Dananya diperoleh dari lembaga Dana Global untuk AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria atau GFATM.

Persoalannya, Dana Global mensyaratkan obat antiretroviral masuk tanpa pajak karena tergolong bantuan kemanusiaan. Departemen Kesehatan harus mengurus surat bebas pajak dari Departemen Keuangan setiap kali obat itu datang. Biasanya, urusan itu makan waktu sebulan. Walhasil, selama masa itu, antiretroviral impor ini kerap tertahan di bandar udara. Padahal pasien sudah menjerit kekurangan obat.



Gelombang Penganggur di Tengah Wabah

majalah.tempo.co

2 mins read



i



Gelombang Penganggur di Tengah Wabah

SEBULAN setelah wabah Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19 melumpuhkan segalanya, Indonesia kini harus menghadapi hantaman kedua: melonjaknya jumlah penganggur.

Pemerintah semestinya mengambil langkah cergas untuk menopang kehidupan jutaan orang yang tiba-tiba kehilangan pekerjaan itu. Keputusan keliru berpotensi meningkatkan kerawanan sosial di tengah wabah yang belum ketahuan akhirnya.

Pandemi corona betul-betul telah menaklukkan sebagian besar wilayah bumi, tak terkecuali Indonesia. Sebagian besar kegiatan ekonomi praktis berhenti. Roda berbagai sektor industri tak lagi bergerak. Dalam waktu singkat, banyak perusahaan kehilangan pendapatan. Sebagian harus gulung tikar—dan artinya menghilangkan semua pekerjanya. Yang lain harus merumahkan sebagian pegawainya. Pilihan pahit manajemen perusahaan-perusahaan itu sudah tentu akan meningkatkan angka kemiskinan di Indonesia.

Hingga Rabu, 8 April lalu, jumlah pekerja dan buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan dirumahkan adalah 1,2 juta orang dari 74.430 perusahaan. Dari jumlah itu, sebanyak 1,01 juta orang merupakan pekerja formal. Mereka sebelumnya bekerja di 39.977 perusahaan. Sisanya pekerja informal, yang diberhentikan dari 34.453 perusahaan. Angka itu hampir pasti masih akan bertambah, lebih-lebih jika wabah tidak segera berakhir.

Apalagi dunia usaha masih akan terpukul hingga beberapa bulan setelah kelak pandemi berakhir. Dalam hal ini, keseriusan pemerintah untuk menggerakkan semua sumber daya guna menghentikan penyebaran virus mutlak diperlukan. Keputusan ragu-ragu—seperti yang terjadi pada boleh-tidaknya penduduk Jakarta mudik ke kampung halaman—sepatutnya tidak boleh terulang. Makin tidak karuan keputusan yang diambil pemerintah, makin panjang kemungkinan waktu berakhirnya wabah. Ini pada gilirannya bakal menyedot waktu dan perhatian perusahaan-perusahaan serta menyita kemampuan mereka untuk bangkit lagi.

Sejauh ini, kebijakan pemerintah untuk menopang kehidupan penganggur baru itu tidaklah tepat. Ketika jutaan orang kehilangan pekerjaan, Presiden Joko Widodo meresponsnya dengan mempercepat pelaksanaan Kartu Pra-Kerja—program untuk para pencari kerja yang dijanjikannya pada masa kampanye pemilihan presiden tahun lalu. Program senilai Rp 20 triliun ini tidak sesuai karena sebagian berbentuk biaya pelatihan-pelatihan. Para pemegang kartu bisa menggunakan deposit di kartunya untuk biaya pelatihan yang dipilihnya.

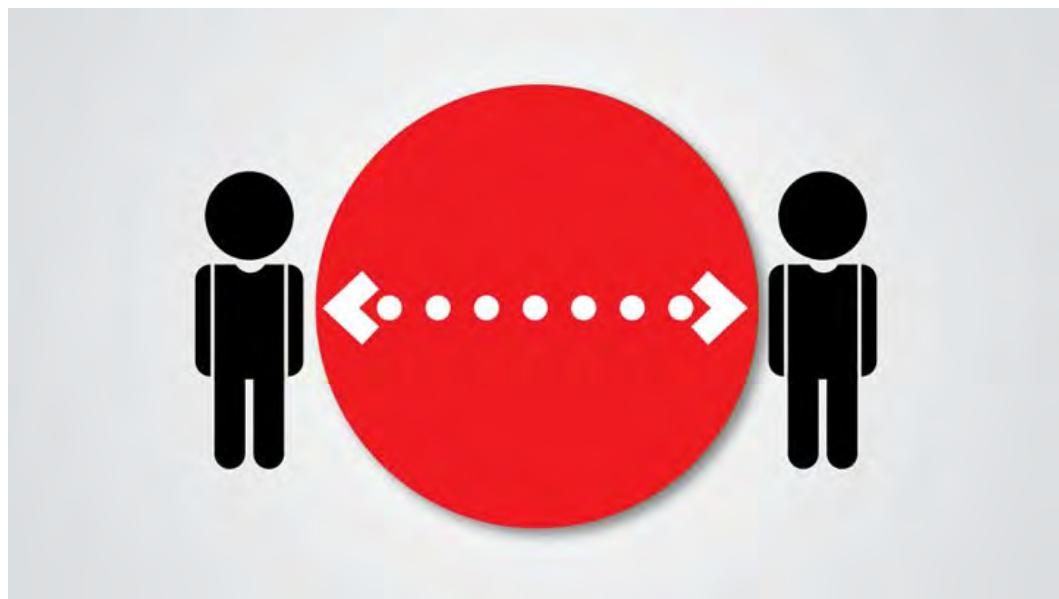
Kartu Pra-Kerja tadinya dibuat untuk warga negara berusia minimal 18 tahun yang sedang mencari kerja, pekerja sektor informal, serta pelaku usaha mikro dan kecil. Anggaran program kampanye Jokowi ini Rp 10 triliun. Setelah pagebluk membuat banyak perusahaan rontok, program diluaskan dan anggarannya meningkat dua kali lipat. Tambahan anggaran ditujukan buat penganggur baru. Setiap pemegang kartu disebut akan memperoleh Rp 3,55 juta, yang terdiri atas biaya pelatihan Rp 1 juta, insentif Rp 600 ribu selama 4 bulan,

dan tiga kali dana survei sebesar Rp 50 ribu. Pemerintah menganggarkan penerima kartu itu sebanyak 5,6 juta orang.

Insentif berupa biaya pelatihan tidak cukup berguna untuk mereka yang baru saja kehilangan pekerjaan. Mereka jauh lebih menantikan bantuan tunai untuk menggantikan pendapatan yang berhenti seketika. Pendeknya, uang tunai di tangan bisa dibelanjakan di pasar. Sebagai perbandingan, pemerintah beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Singapura, juga Hong Kong, memberikan uang tunai bagi warganya yang terkena dampak corona.

Betul, tidak mudah mendistribusikan bantuan itu ke sasaran. Data kependudukan kita telah lama punya banyak kelemahan. Usaha pemberian tangan jarak jauh korup, seperti yang terjadi ketika pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono berusaha membangun sistem kartu tanda penduduk elektronik. Toh, itu tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak memberikan bantuan kepada sekelompok penduduk yang tiba-tiba miskin. Di masa krisis, hambatan-hambatan birokrasi dalam penyaluran bantuan bisa dipangkas.

Pemerintah Jokowi juga sudah seharusnya merelakan dana proyek-proyek ambisius seperti pemindahan Ibu Kota dipotong, untuk membiayai penyelamatan warga negara. Tanpa program jaring pengaman yang jelas, jutaan penganggur baru itu bisa memunculkan “hantaman gelombang berikutnya” buat negara: kemarahan sosial. Kita semua tidak menginginkan hal itu terjadi.



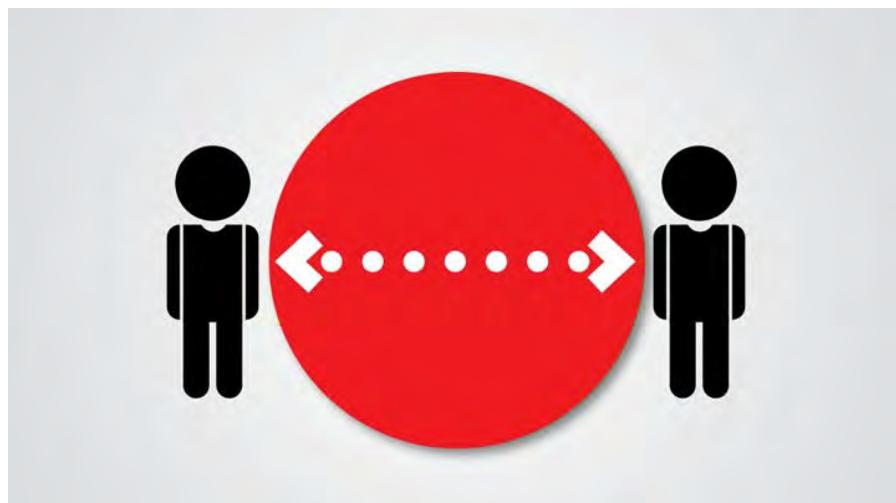
Cergas Menjalankan Pembatasan Sosial

majalah.tempo.co

2 mins read



i



Cergas Menjalankan Pembatasan Sosial

- Presiden Jokowi sudah memilih kebijakan PSBB.
- Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto semestinya menjalankan kebijakan itu meski ia ragu terhadap keganasan virus corona.
- Ekonomi akan ambruk jika wabah tak segera ditangani.

ERLEPAS dari plus-minusnya, Presiden Joko Widodo telah memutuskan penanganan wabah virus corona melalui

Ipembatasan sosial berskala besar (PSBB). Pertimbangan ekonomi, sosial, dan wilayah Indonesia yang berpulau-pulau membuat Jokowi tak memilih kebijakan karantina wilayah. Sebelumnya, para epidemiolog dan ekonom menilai karantina wilayah paling efektif dalam mencegah penyebaran wabah.

Karena PSBB sudah menjadi keputusan politik, seharusnya para pembantu Presiden segera melaksanakannya di lapangan. Saat ini, sudah ada pedoman menangani penularan virus. Sesuai dengan aturan, panglima tertinggi PSBB adalah Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto—dokter tentara yang pernah meremehkan keganasan virus *corona*. Apa boleh buat, keputusan-keputusan penting dalam penanganan wabah kini berada di tangan orang yang pernah tak serius menangani Covid-19.

Sikap ogah-ogahan itu pula yang tampak dalam keputusan Terawan memberikan izin penerapan PSBB bagi DKI Jakarta. Menteri Terawan menarik-ulur restu dengan hal-hal tak perlu, seperti penambahan syarat dan data sebagai alasan legal pembatasan sosial. Padahal syarat dan data tersebut ada di kementeriannya.

Menteri Terawan mesti belajar dari keterlambatan pemerintah mengantisipasi wabah ini, yang membuat kita kini kedodoran mencegah penularan wabah berkembang biak. Pembatasan sosial adalah cara yang minimal bisa ditempuh untuk mengurangi jumlah korban di masa mendatang, asalkan ditangani dengan baik. Pelbagai model dan perhitungan berbasis sains memprediksi lonjakan jumlah korban akan terjadi pada Mei-Juni. Setelah itu, jumlah korban akan cenderung menurun.

Maka, jika Menteri Terawan setengah-setengah dalam menerapkan pembatasan sosial—mengulur-ulur pemberian izin kepada kepala daerah yang mengajukan PSBB—pandemi *corona* akan berlarut-larut. Dampaknya, ekonomi akan makin anjlok—kekhawatiran yang selalu menghantui pemerintah Jokowi selama ini.

Jika pemerintah ingin segera ekonomi bangkit, tak ada cara selain sesegera mungkin menekan penyebaran virus. Sejarah telah membuktikan, dari pelbagai pandemi sejak 1918, negara yang segera memberlakukan pembatasan interaksi sosial jauh lebih kuat secara ekonomi karena wabah bisa cepat diakhiri.

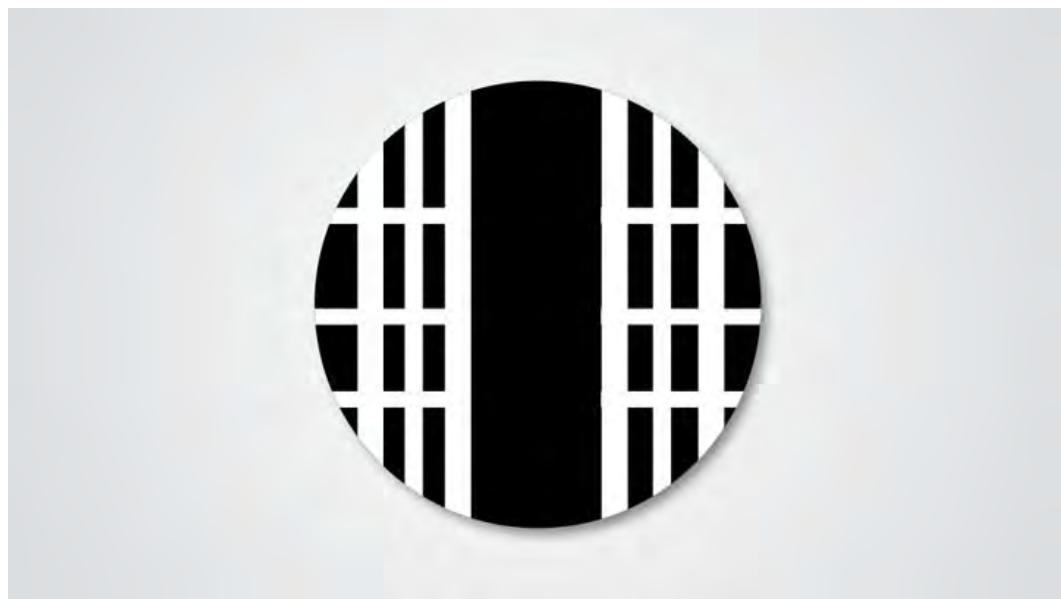
Penanganan wabah melalui pencegahan penularan bukan lagi sebuah dilema. Kita tak punya pilihan antara menahan perlambatan ekonomi dan menyelamatkan manusia. Pilihan yang tersedia hanya satu: menekan jumlah korban sekecil mungkin. Pandemi sudah pasti

merontokkan sendi-sendiri ekonomi. Karena itu, pertaruhan yang akan dicatat sejarah adalah menyelamatkan nyawa manusia.

Inisiatif-inisiatif beberapa daerah yang menutup wilayahnya sebelum ada keputusan pembatasan sosial secara nasional seharusnya jadi pelajaran. Cara meredam kepanikan dengan mengentengkan wabah terbukti tidak berhasil, bahkan justru menimbulkan kepanikan. Pemerintah yang tak efektif, bahkan absen, membuat masyarakat tak berdisiplin sehingga virus terus menular. Ketidakpercayaan publik kepada negara akan makin merosot.

Dalam keadaan kritis seperti sekarang, kita membutuhkan pemimpin negarawan yang membuat kebijakan terbaik dan efektif untuk kepentingan orang banyak. Pemimpin sejati bukanlah mereka yang menunggangi penyelamatan nasib publik dari wabah penyakit dengan agenda pribadi, termasuk persaingan politik jangka pendek.





Titipan Kotor Pembebasan Koruptor

majalah.tempo.co

2 mins read



i



Titipan Kotor Pembebasan Koruptor

PRESIDEN Joko Widodo sudah seharusnya menolak usul pembebasan narapidana kasus korupsi di tengah pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Tapi fakta bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly pernah mengusulkan hal tersebut patut disesalkan sekaligus diwaspada.

Sulit untuk tak memandang usul Yasonna sebagai manuver para “penunggang gelap” wabah. Kepentingan para koruptor itu

menyelinap di balik pengendalian Covid-19 di penjara-penjara dengan penghuni melebihi kapasitas. Lebih ironis lagi, usul itu juga sempat mendapat dukungan pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi pilihan Jokowi.

Kebijakan pemerintah mempercepat pembebasan narapidana umum yang uzur, masih anak-anak, atau tengah menjalani asimilasi sebetulnya sudah tepat. Penjara yang sangat padat dapat menjadi pusat penularan wabah dengan cepat. Sekali narapidana terjangkit Covid-19, akan sulit menekan laju penularannya. Itulah sebabnya, sejumlah negara yang dilanda pagebluk melakukan hal serupa.

Namun ikhtiar baik memerangi wabah tak boleh dicemari upaya lancung membebaskan koruptor. Narapidana korupsi sudah terlalu banyak mendapat perlakuan istimewa. Liputan majalah ini beberapa kali membongkar fasilitas mewah yang dinikmati koruptor di penjara. Berbeda dengan tahanan umum yang berjejer di balik sel sempit, sebagian koruptor menempati kamar lapang, lengkap dengan penyejuk udara dan fasilitas hiburan. Jadi, bagi koruptor yang sanggup membayar para sipir, urusan menjaga jarak fisik untuk menghindari virus *corona* bukanlah persoalan besar.

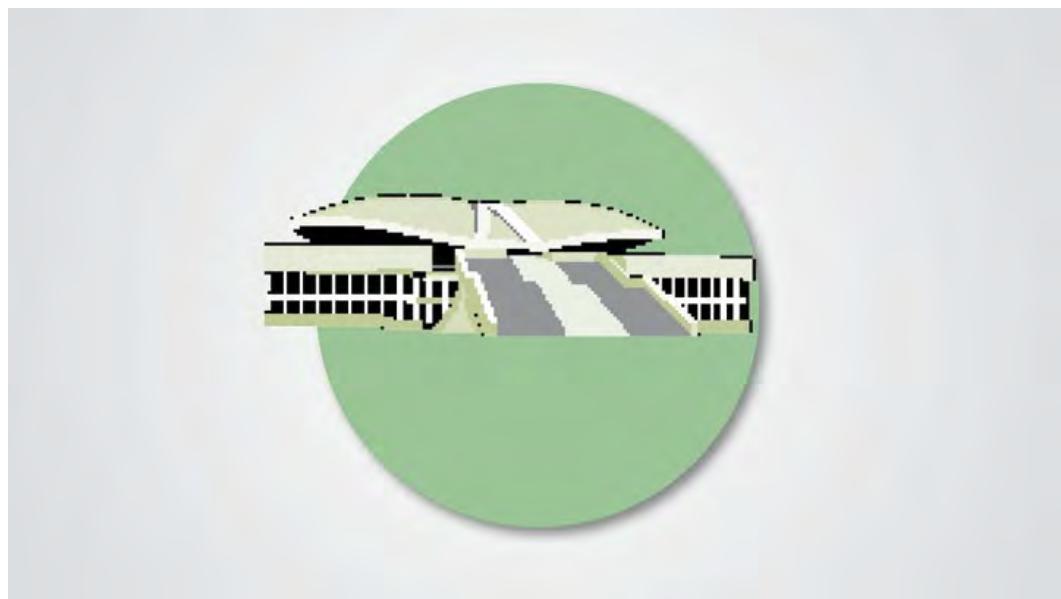
Berdalih membawa aspirasi masyarakat—entah masyarakat yang mana—Yasonna mengusulkan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Aturan tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak penghuni penjara itu selama ini menjadi momok bagi narapidana korupsi. Menurut aturan itu, narapidana korupsi hanya mungkin bebas bersyarat bila bersedia menjadi *justice collaborator*—bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar kejahatan, membayar lunas denda dan uang pengganti, serta telah menjalani dua pertiga masa hukuman.

Penegasan Jokowi bahwa pemerintah tak akan membebaskan koruptor di masa pandemi memang lumayan meredakan kontroversi. Tapi hal itu tak dengan sendirinya menunjukkan komitmen pemerintah atas pemberantasan korupsi. Sebab, di tengah berkecamuknya wabah, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat justru bersepakat melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan, yang juga kontroversial.

Dalam RUU Pemasyarakatan terbaru, pembebasan bersyarat hanya mengharuskan narapidana korupsi menjalani dua pertiga masa hukuman. Tak ada lagi syarat menjadi *justice collaborator* atau membayar lunas denda. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia juga bisa memberikan asimilasi kepada koruptor yang telah menjalani setengah masa tahanan. Syaratnya sangat umum: si narapidana mesti berkelakuan baik serta berjasa dan bermanfaat bagi negara.

Dari perspektif pemberantasan korupsi, pelanggaran syarat pembebasan koruptor dalam RUU Pemasyarakatan jelas merupakan kemunduran. Absennya syarat yang ketat menegaskan pandangan universal bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Kalau memang mau memerangi korupsi, Jokowi seharusnya menolak membahas RUU Pemasyarakatan yang bakal melonggarkan hukuman bagi koruptor.





Manuver DPR di Saat Pandemi

majalah.tempo.co

2 mins read



i



Manuver DPR di Saat Pandemi

KEPEKAAN Dewan Perwakilan Rakyat sungguh berada di titik nadir. Dewan tetap memaksakan pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ketika semua pihak berkonsentrasi penuh pada berbagai upaya penanganan penyebaran wabah Covid-19. Seperti yang dulu-dulu, para wakil rakyat malah asyik dengan agendanya sendiri.

DPR tetap menggelar rapat kerja dengan pemerintah pekan ini. Langkah itu akan diikuti dengan pembentukan panitia kerja RUU

Cipta Kerja. Badan Legislasi berjanji menampung aspirasi masyarakat, termasuk dari serikat buruh dan para pakar. Di tengah status darurat kesehatan dan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar di Jakarta, dalih mereka untuk tetap produktif sungguh tidak masuk akal.

Ikhtiar Badan Legislasi itu mengundang syak wasangka karena sejak awal kita tahu pembahasan *omnibus law* salah kaprah. Kementerian Koordinator Perekonomian hanya berkonsultasi dengan kelompok terbatas yang didominasi pengusaha untuk membahas RUU yang dimaksudkan untuk menarik investasi sebanyak-banyaknya ini. Publik sama sekali tidak mendapat akses atas isi naskah akademik dan rancangan perubahan yang disiapkan. Sikap tertutup pemerintah ini rawan disusupi kepentingan oligarki politik dan ekonomi.

Banyak kalangan yang tahu persis bahwa rancangan undang-undang sapu jagat ini hanya menguntungkan segelintir pengusaha, yang dekat dengan penguasa. Salah satunya korporasi pemegang izin usaha pertambangan. Melalui aturan sapu jagat, mereka otomatis memperoleh perpanjangan kontrak batu bara yang kedaluwarsa tanpa melalui proses lelang. Luas konsesi lahan setelah perpanjangan kontrak juga tak dibatasi seperti yang berlaku dalam Undang-Undang Mineral dan Batu Bara.

Sebagai pemanis bagi investor, pemerintah juga melenturkan persyaratan izin mendirikan bangunan dan analisis mengenai dampak lingkungan. Lunaknya persyaratan justru berpotensi merusak ekosistem. Padahal “alat pengaman” tersebut untuk melindungi lingkungan dari kerusakan. Celakanya, ongkos untuk memperbaiki kerusakan lingkungan bisa lebih besar ketimbang nilai investasi yang dihasilkan.

Konsesi tambang dan analisis mengenai dampak lingkungan hanya sebagian kecil dari belasan kluster yang ada di dalam rancangan undang-undang tersebut. Masih banyak hal lain yang juga mengundang kontroversi, misalnya menyangkut penggunaan kawasan hutan, masa berlaku hak guna usaha, dan aturan perburuhan. Bila para wakil rakyat meloloskan rancangan Cipta Kerja, bukan tidak mungkin aturan tersebut menghasilkan sistem perekonomian yang timpang.

Aturan untuk menyerap lebih banyak investasi dan memudahkan rekrutmen tenaga kerja itu kini juga sudah tidak relevan. Pandemi corona telah mengakibatkan banyak perusahaan kolaps. Hal ini terjadi di industri otomotif, minyak dan gas, pariwisata dan perhotelan, serta penerbangan. Sudah pasti banyak

perusahaan akan menahan diri mencegah investasi—termasuk menyerap tenaga kerja.

United Nations Conference on Trade and Development dalam riset terbarunya bahkan memberi sinyal bahwa masifnya penyebaran virus *corona* akan memangkas level investasi asing di tingkat global, termasuk Indonesia, hingga 40 persen dari proyeksi semula.

Untuk menunjukkan lebih banyak empati di tengah masyarakat yang berjuang melawan pandemi *corona*, wakil rakyat seyogianya menghentikan pembahasan RUU Cipta Kerja. Sudah saatnya mereka membantu pemerintah mengurangi dampak penyebaran wabah. Salah satunya ikut mengawasi penyaluran jaring pengaman sosial agar lebih cepat ke tangan yang membutuhkan.





Juara Berutang dari Pasar

majalah.tempo.co

3 mins read



i



Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat paparan APBN KiTa di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (19/02/2020) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sudah membukukan defisit, meski baru bulan pertama. Realisasi belanja negara masih di bawah 6% dari target, sementara penerimaan malah di bawah 5%.

Tempo/Tony Hartawan

LI seluruh dunia, pemerintah banyak negara sedang berlomba-lomba mencari utang. Tak pandang bulu, baik negara maju maupun yang terbelakang, semuanya sedang kelabakan menghadapi wabah Covid-19. Semua butuh utang yang cepat mengalir karena tak ada cukup uang dalam anggaran untuk berperang melawan wabah.

Di kawasan Amerika Latin, misalnya, 14 negara sudah antre di depan loket Dana Moneter Internasional (IMF), mencari berbagai fasilitas pinjaman tambahan. Inggris bahkan kalap membuat terobosan baru. Bank of England akan langsung membiayai tambahan anggaran sehingga pemerintah tak perlu repot menjual obligasi ke pasar. Bank of England, ibaratnya, langsung mencetak uang agar pemerintah Inggris dapat segera memberikan tambahan stimulus atau menambal biaya kesehatan yang melambung karena wabah Covid-19.

Indonesia juga, harus ikut menambah utang. Pemerintah merencanakan anggaran baru senilai Rp 405,1 triliun untuk mengatasi wabah. Selain menggeser dana dari pos anggaran lain, pemerintah mau tak mau mesti mencari utang baru untuk menutup tambahan kebutuhan itu. Defisit anggaran akan meledak luar biasa, mencapai Rp 853 triliun tahun ini, hampir tiga kali lipat rencana sebelumnya Rp 307,2 triliun.

Dalam hal berutang, Indonesia bahkan sudah mengklaim satu titel: negara pertama yang menerbitkan obligasi pandemi dalam dolar Amerika Serikat. Indonesia berhasil menjual tiga seri obligasi meskipun keadaan sedang gonjang-ganjang. Tak tanggung-tanggung, pemerintah mencetak utang baru sebesar US\$ 4,3 miliar, yang salah satu serinya berjangka waktu 50 tahun. Inilah pertama kalinya Indonesia menjual obligasi dolar bertenor setengah abad. Masalah hari ini akan menjadi beban generasi cicit kita untuk melunasinya.



Ongkos berutang di tengah situasi seperti ini jelas tidak murah.

Kupon tiga seri itu masing-masing sebesar 3,85 persen, 4,2 persen, dan 4,45 persen. Di pasar perdana, investor bahkan masih menuntut diskon. Pemerintah pun harus memberikan imbal hasil alias *yield* sedikit lebih tinggi daripada kupon, masing-masing menjadi 3,9 persen, 4,2 persen, dan 4,5 persen. Konsekuensinya, kemampuan fiskal pada tahun-tahun mendatang akan berkurang. Ada pengeluaran lebih besar untuk bunga utang yang akan mengurangi kemampuan pemerintah berinvestasi, menggerakkan ekonomi.

Sebagai gambaran, untuk ketiga seri obligasi itu saja, pemerintah harus membayar bunga sekitar US\$ 177,3 juta per tahun, atau senilai Rp 2,84 triliun jika kurs kita asumsikan stabil pada level Rp 16 ribu per dolar Amerika. Bayangkan, biaya bunga untuk tiga seri obligasi ini saja bahkan lebih besar ketimbang anggaran Kementerian Riset dan Teknologi, yang dipangkas menjadi hanya Rp 2,47 triliun.

Keadaan memaksa kali ini memang membuat Indonesia harus berpaling ke pasar yang kejam. Ongkos yang sungguh mahal itu seharusnya menyadarkan semua pejabat negara bahwa penggunaan dana penanganan dampak Covid-19 jangan sampai sia-sia. Setiap rupiah harus benar-benar bermanfaat untuk menyelamatkan ekonomi, bukan demi program politik populis atau sekadar pelunasan janji kampanye.

Pemerintah sebaiknya juga menimbang kembali berbagai proyek besar yang lebih bersifat menaikkan gengsi. Akan sangat mulia jika pemerintah berani mengorbankan pula segala kenikmatan ekstra pejabat negara. Pemerintah harus berupaya sedemikian rupa agar tidak menambah lagi utang mahal untuk memerangi Covid-19.

Alternatif lain, pemerintah bisa menambah lagi utang dari lembaga multilateral. Bank Dunia, misalnya, pada Maret lalu sudah memberikan pinjaman US\$ 300 juta kepada pemerintah Indonesia untuk mendukung anggaran. Bank Dunia juga sudah menyiapkan dana US\$ 14 miliar yang bisa segera cair untuk penanggulangan Covid-19. Indonesia bisa lebih agresif meminjam dana itu ketimbang menjual obligasi ke pasar.

Ongkos berutang dari lembaga keuangan multilateral jelas jauh lebih murah. Secara politik, ini memang pilihan yang tidak populer bagi Presiden Joko Widodo. Tapi, ketimbang membebani cicit dengan bunga mahal, gengsi politik dan nasionalisme sempit sudah selayaknya kita pinggirkan.



Ledakan PHK di Depan Mata

majalah.tempo.co

8 mins read

Ratusan ribu pekerja terseret gelombang pemecatan akibat lesunya industri di masa pandemi Covid-19. Angkanya berpotensi melonjak hingga jutaan, menambah banyak penganggur baru akibat terbatasnya lapangan kerja. Program penyelamatan pemerintah bagi kaum buruh terbentur soal ketersediaan data.

i



Pekerja menyelesaikan pembuatan suku cadang sepeda motor di sebuah pabrik di kawasan Bekasi, Jawa Barat, Desember 2015. TEMPO/Tony Hartawan

- Pabrik-pabrik stop berproduksi hingga berdampak terhadap 1,2 juta pekerja.
- Jumlah penganggur dan penduduk miskin diprediksi meningkat tajam.
- Upaya penyelamatan yang disiapkan pemerintah tak mulus.

SUDAH sepekan lebih bengkel PT Ganding Toolsindo di Bekasi, Jawa Barat, lengang. Seratusan karyawan dirumahkan dari workshop bahan setengah jadi knalpot sepeda motor tersebut. Kontrak beberapa pegawai yang habis tak diperpanjang. Sejak Jumat, 3 April lalu, industri kecil-menengah (IKM) pemasok suku cadang pabrik otomotif itu benar-benar stop berproduksi. "Tidak ada pekerjaan lagi. Paling tinggal satu-dua orang (tetap bekerja) untuk pemeliharaan dan bersih-bersih," pemilik bengkel, Wan Fauzi, menuturkan kepada *Tempo*, Selasa, 7 April lalu.

Penghentian kegiatan itu bermula dari pengumuman PT Sakura Java Indonesia, perusahaan pemasok suku cadang untuk PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM), dua hari sebelumnya. Sakura Java meminta semua vendor menghentikan pengiriman segala jenis barang. Penyebabnya, pabrik Yamaha Indonesia Motor memutuskan akan menyetop produksi selama dua pekan lebih hingga Ahad, 19 April mendatang.

Bukan hanya bengkel Fauzi yang gelagapan. Rantai pasok komponen di industri kendaraan bermotor cukup panjang. Beroperasinya satu pabrik besar akan disokong beberapa pemasok suku cadang—biasanya terafiliasi dengan induk pemegang merek. Selanjutnya, pabrik komponen berjejering dengan ratusan—di industri mobil bahkan bisa ribuan—vendor yang kebanyakan berada di skala IKM.

Wan Fauzi, yang juga Ketua Perkumpulan Industri Kecil dan Menengah Komponen Otomotif, menyebutkan sedikitnya 60 anggota asosiasinya sekarang minim pesanan produksi, bahkan tak mendapat sama sekali. "Beberapa anggota ada yang masih punya garapan dari agen pemegang merek lain, seperti Honda. Itu pun order tinggal 30-an persen," ujarnya.



Pengemudi ojek daring menerima bantuan sembako dari Presiden Joko Widodo di Terminal Baranangsiang, Kota Bogor, Jawa Barat, 9 April lalu./ANTARA/Arif Firmansyah

Industri kendaraan bermotor memang tengah lesu darah sejak virus corona mewabah. Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia memperkirakan penjualan tahun ini bisa merosot 25-30 persen dari target awal menyamai capaian tahun lalu sebanyak 6,4 juta unit. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia juga memprediksi penjualan mobil hanya akan berkisar 600 ribu unit, anjlok hampir 50 persen dibanding 2019.

Suramnya penjualan, ditambah imbauan pemerintah agar pengusaha menerapkan sistem bekerja dari rumah untuk mencegah meluasnya penyebaran Covid-19, memaksa YIMM menghentikan produksinya. Executive Vice President Director PT YIMM Dyonisius Beti mengatakan kinerja penjualan pada pekan keempat Maret lalu anjlok hingga 40 persen dibanding bulan sebelumnya. “Pandemi telah menggeser perilaku konsumen untuk memprioritaskan kebutuhan utama saat ini, yakni pangan dan kesehatan,” ujarnya, Rabu, 8 April lalu.

Kini, sekitar 18 ribu karyawan yang berkaitan langsung dengan pabrik diliburkan. Pegawai kantor pusat YIMM juga telah bekerja dari rumah secara bergiliran. Penghentian operasi pabrik ini juga berdampak terhadap nasib sekitar 250 ribu pekerja yang tak berkaitan langsung dengan kegiatan produksi. Kategori ini mencakup distributor (*dealer*), perusahaan pembiayaan (*leasing*), hingga IKM pemasok suku cadang seperti milik Wan Fauzi.

Industri otomotif hanya satu dari sejumlah kluster industri manufaktur yang terpaksa merumahkan pekerjanya akibat lesunya bisnis di masa pandemi. Kondisi industri tekstil, yang setahun terakhir bersaing dengan produk impor yang membanjir, misalnya, tak lebih baik. Arus kas banyak perusahaan tekstil makin berdarah-darah akibat turunnya permintaan, penangguhan dan pembatalan pesanan, juga merosotnya tingkat utilitas pabrik seiring dengan penerapan aturan jaga jarak atau *social distancing*.

PT Citra Sandang Textile atau Cisatex salah satunya. Sempat menerapkan skema kerja “tiap tiga”, yakni tiga hari berproduksi kemudian tiga hari berhenti, pabrik yang berlokasi di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, ini praktis mati suri sejak tiga pekan lalu. Sebanyak 50-an pekerja telah dirumahkan, tersisa segelintir buruh yang kini beralih membuat masker. “Menghabiskan barang yang tersisa saja,” ucap Agus Ruslan, bos Cisatex, Rabu, 8 April lalu.

Hingga Ahad, 5 April lalu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat mencatat sebanyak 1.476 perusahaan terseret arus pelemahan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Hampir 50 ribu pekerja diliburkan dan dirumahkan. Sebanyak 5.047 buruh lain terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Gelombang PHK juga terjadi di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, hingga Senin, 6 April lalu, mencatat sebanyak 191 perusahaan telah memecat sedikitnya 24 ribu pekerja. Adapun Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan, sebanyak 151 perusahaan di wilayahnya telah merumahkan dan memecat 18 ribu pekerja akibat pagebluk ini. “Rinciannya, 16.089 dirumahkan dan 1.923 di-PHK,” ujar Khofifah, Selasa, 7 April lalu.

Di Ibu Kota, angkanya lebih fantastis. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta mencatat sekitar 132 ribu pekerja telah dirumahkan dan 30 ribu lainnya diberhentikan. “Mereka berasal dari 18.045 perusahaan,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta Andri Yansyah kepada *Tempo*.

Angka-angka tersebut merupakan rekapitulasi data yang diterima kantor dinas hingga Sabtu, 4 April lalu, untuk kemudian dilaporkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Rencananya, data tersebut digunakan sebagai basis bagi pemerintah untuk melaksanakan berbagai langkah penanganan dampak wabah corona, terutama program Kartu Prakerja.

...

GELOMBANG pemutusan hubungan kerja massal memang menjadi momok baru di dunia selain Covid-19 itu sendiri. Organisasi Buruh Internasional (ILO) pada pertengahan Maret lalu berseru kepada pemerintah semua negara agar menggenjot program jaring pengaman sosial dan mengintervensi industri lewat kebijakan untuk menanggulangi besarnya potensi lonjakan tingkat pengangguran.

Taksiran awal ILO, yang dimuat dalam laporan bertajuk “COVID-19 and the World of Work: Impact and Policy Responses”, memperkirakan jumlah penganggur di dunia bertambah 24,7 juta orang dari tahun lalu yang sebanyak 188 juta. Estimasi ini melampaui dampak krisis ekonomi 2008-2009, yang ketika itu memicu pertambahan penganggur baru sebanyak 22 juta jiwa. Proyeksi

menyeramkan ini bahkan berpotensi bertambah besar lantaran pandemi tak hanya menyebabkan pekerja kehilangan pekerjaan, tapi juga mengancam kaum muda, yang bakal lebih sulit mencari kerja.

Bahaya lanjutan sudah menunggu: meningkatnya angka kemiskinan. Lembaga kajian pangan global yang berbasis di Washington, DC, Amerika Serikat, The International Food Policy Research Institute, memperkirakan jumlah penduduk miskin ekstrem sedunia bisa bertambah di kisaran 12-22,5 juta jiwa. Di Indonesia, kelompok rentan yang tergelincir ke jurang kemiskinan sepanjang tahun ini diperkirakan sebanyak 2 juta jiwa. “Situasinya makin buruk karena muncul ketidakpastian. Tidak ada yang bisa memprediksi kapan pandemi akan berakhir,” ucap ekonom Center of Reform on Economics, Piter Abdullah. “Pengangguran dan kemiskinan akan meningkat.”

Pemerintah sebenarnya telah merespons besarnya potensi lonjakan tingkat pengangguran dan kemiskinan akibat Covid-19 lewat perubahan kebijakan keuangan negara yang digulirkan dua pekan terakhir. Alokasi anggaran untuk menangani dampak pandemi ditambah Rp 405,1 triliun—membuat defisit melampaui 5 persen terhadap produk domestik bruto lantaran penerimaan negara juga lesu. Separuh lebih dari duit tersebut, yakni Rp 220,1 triliun, akan dipakai untuk mengurangi beban industri dan memulihkan perekonomian nasional. Adapun belanja kesehatan dan jaring pengaman sosial masing-masing bertambah Rp 75 triliun dan Rp 110 triliun.

Dari belanja jaring pengaman sosial itulah pemerintah mengantisipasi besarnya potensi PHK. Dana Kartu Prakerja—program yang dijanjikan Presiden Joko Widodo dalam kampanye pemilihan presiden tahun lalu—dilipatgandakan menjadi Rp 20 triliun. Alokasi bantuan sosial Program Keluarga Harapan naik menjadi Rp 37,4 triliun untuk 10 juta keluarga miskin. Begitu pula dana bantuan sosial pangan Kartu Sembako, yang kini tersedia Rp 43,6 triliun untuk 20 juta penerima.

Pada Kamis, 9 April lalu, lewat *videoconference* dari Istana Merdeka, Jokowi kembali menegaskan prioritas utama pemerintah saat ini, yakni menjaga pemenuhan kebutuhan pokok dan meningkatkan daya beli masyarakat di lapisan bawah. “Saya mengajak para pengusaha berusaha keras mempertahankan para pekerjanya,” tuturnya. “Saya mengajak semua pihak peduli kepada masyarakat yang kurang mampu.”

Seolah-olah hendak memberikan contoh atas ucapannya, hari itu beredar video Jokowi membagikan ratusan paket bahan kebutuhan

pokok lewat iring-iringan mobil dinas kepresidenan kepada warga di tepi Jalan Pajajaran, Bogor, Jawa Barat, ketika hendak berangkat menuju Jakarta dari Istana Bogor. Sore harinya, aksi serupa dilakukan Jokowi di kawasan Harmoni, Jakarta Pusat, saat pulang dari Istana Merdeka.

Sementara program bantuan bahan kebutuhan pokok telah dimulai Presiden, perlindungan buruh akibat lesunya ekonomi di masa pandemi masih perlu waktu. Pendataan pekerja yang diberhentikan atau dirumahkan oleh dunia usaha baru dimulai dua pekan lalu.

Pada Selasa, 31 Maret lalu, Kementerian Ketenagakerjaan mengirimkan surat kepada kepala kantor dinas tenaga kerja di semua provinsi agar mengumpulkan dan melaporkan data perusahaan serta pekerja yang terkena dampak Covid-19. Hasil sementara menggambarkan ledakan PHK nyata di depan mata.

Hingga Selasa, 7 April lalu, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sebanyak lebih dari 39 ribu perusahaan telah memecat 137 ribu pekerja dan merumahkan 873 ribu lainnya. Jumlah tersebut melampaui gelombang PHK yang terjadi di Indonesia imbas krisis keuangan global 2008. Kala itu, hingga akhir Januari 2009, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mencatat sebanyak 27 ribu orang terkena PHK.

Data berisi identitas badan usaha dan pekerja yang telah dikantongi Kementerian Ketenagakerjaan itu otomatis bisa langsung dipakai untuk menggulirkan program penyelamatan. Kartu Prakerja yang kini dialihkan sepenuhnya bagi buruh yang terimbas pandemi Covid-19 berulang kali urung diluncurkan.

Terakhir, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengabarkan bahwa Kartu Prakerja akan diluncurkan Kementerian Koordinator Perekonomian dan Project Management Office (PMO) pada Kamis, 9 April 2020. "Skemanya diubah untuk benar-benar menangani Covid-19. Mereka yang mengalami PHK dan sektor informal yang kesulitan oleh dampak Covid-19," kata Askolani dalam konferensi pers, Rabu, 8 April lalu.

Peluncuran skema baru ini rencananya ditandai dengan dibukanya pendaftaran buruh yang terkena dampak pandemi via situs Prakerja.go.id. Adapun PMO merupakan pelaksana program Kartu Prakerja yang kini dipimpin Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden Denni Puspa Purbasari.

Namun, hingga Jumat petang, 10 April lalu, situs pelaksana Kartu Prakerja itu belum juga dilengkapi tombol pendaftaran buruh yang terkena dampak Covid-19. Direktur Komunikasi Program Kartu Prakerja Panji Winanteya Ruky mengatakan peluncuran diundurkan, tapi tetap akan dilaksanakan pada pekan kedua April ini. "Karena perlu memastikan situs dapat memberikan layanan yang andal dan aman," ujar Panji kepada *Tempo*, Jumat, 10 April. "Kami tidak ingin nantinya ada pendaftar yang kecewa karena kendala teknis."

Sebelumnya, lewat siaran pers Kementerian Koordinator Perekonomian, Panji menyebutkan peluncuran ditunda menjadi pada Sabtu, 11 April. Kelak, lewat situs ini, program Kartu Prakerja membuka pendaftaran dengan kuota 164 ribu orang per minggu. Dia berharap perusahaan juga melaporkan data pekerja yang diberhentikan atau dirumahkan kepada kantor dinas tenaga kerja setempat. "Kementerian Ketenagakerjaan yang mengelola pendataan korban PHK" tuturnya.

Pada sisi lain, pemutakhiran data di kementerian teknis juga bukannya tanpa persoalan. Selain menghendaki data kantor dinas di daerah, Kementerian Ketenagakerjaan meminta informasi dari serikat buruh.

Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Kasbi) Nining Elitos mengaku dihubungi oleh staf Kementerian Ketenagakerjaan agar memberikan data buruh di wilayah Ibu Kota yang terkena dampak corona, dua pekan lalu. Tapi jumlah data pekerja anggota Kasbi yang disebut bakal menerima bantuan pemerintah senilai Rp 300 ribu tersebut dibatasi sebanyak 70 orang.

Khawatir menimbulkan persoalan di lingkup internal serikat buruh, Ning menolak menyertakan data. "Mohon maaf saja, karena anggota kami lebih besar yang terkena dampak," kata Ning, Selasa, 7 April lalu.

Hasil pendataan sementara Kasbi menunjukkan 1.835 buruh, dari total 140 ribuan anggota konfederasi, telah diberhentikan. Sebanyak 15 ribu pekerja lain dirumahkan dengan upah dibayar hanya sebesar 25 persen.

Dimintai konfirmasi tentang keluhan Kasbi, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah membenarkan info bahwa pendataan calon penerima manfaat Kartu Prakerja sedang dilakukan, termasuk lewat serikat buruh. Data yang juga dikumpulkan Kementerian Pariwisata itu kelak diverifikasi di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Perekonomian. Namun dia menduga permintaan data kepada Kasbi tersebut dilakukan untuk program insentif lain. Sebab, besaran bantuan dalam program Kartu Prakerja adalah Rp 600 ribu per orang selama empat bulan, plus pelatihan senilai Rp 1 juta.

Ida hakulyakin target penerima bantuan Kartu Prakerja yang ditetapkan sebanyak 5,6 juta jiwa cukup untuk menjangkau semua buruh yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi. "Kami tidak berharap ada gelombang PHK lebih besar," ucap politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini.

Upaya penyelamatan juga sedang disiapkan Kementerian Perindustrian, yang merealokasi anggarannya sebesar Rp 113,15 miliar untuk menangani dampak Covid-19. "Anggaran lebih difokuskan untuk menumbuhkan wirausaha baru bagi korban PHK dan yang dirumahkan," kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih. Pemerintah juga akan membantu industri kecil-menengah lama merestrukturisasi bisnis lewat peningkatan mesin dan peralatan agar lebih efisien. Kementerian Perindustrian berencana memfasilitasi IKM untuk mendapatkan kredit usaha rakyat dari perbankan milik negara.

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance, Didik Rachbini, khawatir pemberian stimulus kepada industri tanpa penilaian yang komprehensif justru akan menjadi celah terjadinya *moral hazard*. Dia mengingatkan, dalam kondisi pembatasan sosial berskala besar seperti sekarang, bantuan langsung tunai dan pangan adalah program yang paling ditunggu oleh golongan 30 persen

keluarga termiskin. “Stimulus jangka pendek terbaik adalah untuk orang miskin, penganggur, korban PHK, agar *survive*,” ujar Didik.

Senada, ekonom senior Universitas Indonesia, Faisal Basri, berharap pemerintah berfokus pada penanganan virus dan membantu masyarakat yang rentan. “Makin tak jelas dan tak tegas menanganinya, makin lama ekonomi pulih.”

**RETNO SULISTYOWATI, M. YUSUF MANURUNG,
HENDARTYO HANGGI, AHMAD FIKRI (BANDUNG), JAMAL
A. NASHR (SEMARANG), NURHADI (SURABAYA)**





Terancam Putus tanpa Stimulus

majalah.tempo.co

4 mins read



i



Spanduk penutupan kawasan sementara terpasang di kawasan wisata Pantai Jimbaran, Badung, Bali, 1 April lalu./ ANTARA/Fikri Yusuf

- Industri pariwisata dan hiburan babak-belur lebih awal akibat pandemi Covid-19.
- Gelombang PHK mengancam pekerja formal dan informal di sektor ini.
- Paket penyelamatan disiapkan lintas kementerian.

SETELAH Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengaktifkan Pusat Krisis Terintegrasi sebagai jalur komunikasi dan edukasi bagi masyarakat pada pertengahan Maret lalu, hari-hari Ari Juliano Gema kian padat. Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi dan Regulasi Kementerian Pariwisata ini ditunjuk sebagai juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sektor Pariwisata. Timnya kini kudu mengumpulkan data tentang pekerja informal di industri pariwisata dan kreatif yang terkena dampak pelemahan ekonomi akibat pandemi. “Data itu akan diajukan ke Kementerian Koordinator Perekonomian untuk mendapatkan Kartu Prakerja,” kata Ari, Rabu, 8 April lalu.

Pemerintah belum lama ini melipatgandakan alokasi belanja untuk program Kartu Prakerja menjadi Rp 20 triliun guna mengantisipasi dampak Covid-19 terhadap pekerja. Jasa pariwisata, dari biro perjalanan hingga penginapan, merupakan salah satu sasaran utama lantaran menjadi sektor yang terpukul lebih awal, bahkan sebelum kasus positif virus *corona* diumumkan pada 2 Maret lalu.

Badan Pusat Statistik mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada Januari-Februari 2020 hanya 2,16 juta orang atau turun 11,8 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Kunjungan sepanjang Februari secara tahunan bahkan anjlok 28,85 persen. Pada saat yang sama, tingkat keterisian kamar hotel klasifikasi bintang rata-rata hanya 49,2 persen.

Hingga pekan kedua April, data yang diterima Ari Juliano menggambarkan betapa perdarahan di industri ini makin parah. Sebanyak 180 destinasi dan 232 desa wisata tutup. Belasan ribu pekerja di badan usaha pariwisata terkena pemutusan hubungan kerja. Jika ditambahkan dengan pekerja informal, jumlah korban ambruknya bisnis di sektor ini melampaui 110 ribu orang. Made Yoga Permana, pemandu wisata lepas asal Gianyar, Bali, salah satunya.

Permintaan biro perjalanan mengantarkan pelancong terakhir kali diterima Made Yoga pada Februari lalu. Sebulan terakhir, hari-hari pria 30 tahun ini hanya diisi dengan mengasuh dua anak dan mengantar pesanan pembelian bahan kebutuhan pokok secara *online*, bisnis kecil-kecilan yang baru ia rintis lantaran menganggur. Asap dapur rumahnya kini praktis hanya mengandalkan penghasilan istrinya, yang bekerja sebagai tenaga honorer instansi pemerintah di Badung, Bali. “Dulu mengantar wisatawan, sekarang antar istri kerja,” ucap Yoga, Rabu, 8 April lalu. Sejumlah kolega pemandu, kata dia, kini memilih kembali ke kampung halaman di wilayah Karangasem, Klungkung, atau Buleleng lantaran banyak obyek wisata yang tutup.

Sebagian besar obyek wisata di Bali memang tutup. Di Kabupaten Tabanan, Badan Pengelola Daya Tarik Wisata (DTW) Ulun Danu Beratan bahkan memperpanjang masa penutupan hingga waktu yang belum ditentukan dari semestinya akhir Maret lalu. Padahal kompleks wisata di sisi barat Danau Beratan ini sepanjang tahun lalu bisa menarik kunjungan hampir sejuta wisatawan domestik dan mancanegara. “Karena situasi Covid-19 ini masih belum bisa diprediksi kapan mereda,” ujar Manajer Operasional Badan Pengelola DTW Ulun Danu Beratan.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Putu Astawa menuturkan, kunjungan warga asing ke Bali sebenarnya masih ada. Namun kebanyakan dari mereka adalah orang yang memiliki keluarga di Bali. “Yang liburan sudah nol persen.”

Di Jakarta, bisnis pelesiran juga tumbang. PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk menutup wahana rekreasi dan resor sejak 14 Maret lalu meski belum sampai terpaksa memecat para karyawannya. Sejak itu, manajemen menerapkan pola bekerja dari rumah bagi 82 persen pekerja. Sebagian lain tetap bekerja di kantor atau lokasi wisata, terutama untuk pemeliharaan dan pengamanan. “Dengan segala upaya dan berbagai kebijakan perusahaan, kami tetap mempertahankan karyawan,” kata Vice President Corporate Secretary PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk Agung Praptono.

Hal serupa dilakoni Cinema XXI dan CGV Cinemas, dua jaringan bioskop yang sejak pekan ketiga Maret lalu menutup semua gerai layanannya di berbagai daerah. Head of Corporate Communications and Brand Management Cinema XXI Dewinta Hutagaol mengakui keputusan tak memberhentikan karyawan cukup berat lantaran biaya rutin gaji pegawai tetap harus dikeluarkan ketika pemasukan perusahaan nyaris kosong. “Pengeluaran semacam ini harus tetap berjalan,” ujar Dewinta kepada *Tempo*, Selasa, 7 April lalu.



Pengumuman bioskop Cinema XXI tutup di Pondok Indah Mall, Jakarta, 9 April lalu./
TEMPO/Nurdiansah

Untuk mempertahankan keberlangsungan bisnis, manajemen Cinema XXI memutuskan tidak memberikan renumerasi bagi jajaran komisaris dan direksi per April 2020 sampai kondisi kembali normal. Adapun CGV Cinemas kini menganjurkan karyawannya mengambil cuti selama perpanjangan masa penutupan operasi. Meski begitu, Public Relations Manager CGV Cinemas Hariman Chalid khawatir kosongnya pendapatan akan makin menyulitkan perusahaannya untuk melanjutkan bisnis ke depan. “Kami meminta ada kebijakan dari pemerintah untuk meringankan beban,” tutur Hariman.

Ambruknya bisnis pariwisata dan hiburan tersebut membuat usaha hotel dan restoran makin sulit bernapas. Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran mengungkapkan, sedikitnya 1.500 hotel kini berhenti beroperasi. Ia tak menampik kabar bahwa beberapa hotel terpaksa memecat karyawan. “Tapi saya tidak bisa ekspos karena belum tahu detailnya,” tuturnya. Yang jelas, dia mengungkapkan, pengusaha hotel dan restoran kini dihadapkan pada masalah baru di tengah memburuknya arus kas: pembayaran tunjangan hari raya pada Mei mendatang.

Maulana pun mengeluhkan sikap pemerintah yang belum juga merespons sejumlah permintaan asosiasi agar beban pengusaha berkurang. Dia mencontohkan, pemerintah perlu segera memberikan pelonggaran berupa pembebasan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, juga mengurangi pembayaran biaya minimum penggunaan listrik dan gas. “Kami belum dapat stimulus apa pun, padahal sudah intens memberikan masukan kepada beberapa kementerian,” ucap pria yang kerap disapa Alan tersebut.

Menurut Ari Juliano Gema, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah merumuskan strategi mengantisipasi dampak Covid-19 terhadap industri di sektor ini yang terbagi dalam tiga fase: tanggap darurat, pemulihan, dan normalisasi. Saat ini, fase tanggap darurat dijalankan dengan mengurangi kerugian akibat pandemi.

TERPUKUL PANDEMI	1.500 UNIT JUMLAH HOTEL YANG MENUTUP OPERASI, SEBAGIAN BESAR DALAM WAKTU YANG TAK DITENTUKAN.	32.559 ORANG JUMLAH TENAGA KERJA TERKENA DAMPAK DIRUMAHKAN.
	180 LOKASI JUMLAH DESTINASI WISATA YANG DITUTUP.	12.386 ORANG JUMLAH TENAGA KERJA DI SEKTOR WISATA YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA.
	232 DESA JUMLAH DESA WISATA YANG TUTUP.	68.028 ORANG ESTIMASI JUMLAH PEKERJA INFORMAL DI SEKTOR PARIWISATA YANG TERKENA DAMPAK PANDEMI.
	11.125 UNIT UNIT USAHA PARIWISATA YANG TERKENA DAMPAK COVID-19.	

Terpukul Pandemi

Kementerian, kata Ari, menghentikan promosi wisata dan merelokasi anggaran untuk membantu penanganan dampak corona. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 mencatat bujet Kementerian Pariwisata berubah menjadi Rp 4,26 triliun, berkurang Rp 207 miliar dari alokasi awal. Pada sisi lain, beberapa paket pelonggaran bagi industri pariwisata dan perhotelan tengah disiapkan untuk kemudian dikoordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait.

Dia mencontohkan, beberapa program telah digulirkan untuk mengurangi potensi pemutusan hubungan kerja. Kementerian, Ari menambahkan, telah bekerja sama dengan berbagai jaringan hotel untuk memfasilitasi 1.300 tenaga medis. "Harapannya, kerja sama ini bisa memberikan *cash flow* karena ada syarat mereka enggak boleh PHK karyawannya," ujarnya. Kerja sama dengan tujuan serupa kini sedang dibangun dengan sedikitnya 2.500 unit usaha *fashion* untuk pembuatan masker kain.

AISHA SHAIIDRA, MADE ARGAWA (BALI)



Belanja dari Rumah, Pekerja Dirumahkan

majalah.tempo.co

4 mins read



i



Suasana sepi pusat perbelanjaan Pondok Indah Mall, Jakarta, 9 April lalu./ TEMPO/Nurdiansah

- Industri retail modern memasuki periode kelam.
- Penutupan mal karena corona berimbang pada pemecatan pegawai.
- Retail model pasar raya paling terkena dampak karena konsumen menahan belanja nonpangan.

HMPAT hari setelah ditutup karena mengikuti keputusan Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat, pusat belanja Ramayana City Plaza hanya berdenyut di lantai dasar. Pada Kamis, 9 April lalu, sejumlah pengemudi ojek *online* mengantre pesanan di restoran cepat saji di lantai tersebut. Mal tiga lantai itu hanya membolehkan operasi penyewa yang berjualan makanan dan bahan pangan.

Akses utama mal yang menggunakan pintu gulir tertutup rapat. Lantai paling atas ditempati pusat jajanan serba ada dan bioskop. Toko Ramayana, jaringan *department store* terbesar untuk pasar menengah ke bawah milik PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk (RALS), menempati lantai 1.

Sementara pusat jajanan dan bioskop di mal itu hanya tutup sementara guna memutus rantai penularan Covid-19, Ramayana dipastikan tutup seterusnya. Pemilik sekaligus pengguna area terbesar Ciplaz Depok itu menutup operasinya secara permanen, membiarkan mal yang telah berdiri selama 23 tahun tersebut hidup dari para penyewa.

Kabar tutupnya Ramayana selamanya di Ciplaz Depok baru menyebar pada Selasa, 7 April lalu. Seorang pengguna Twitter, @wawat_kurniawan, mengunggah video dengan keterangan “Realitas masyarakat. Ramayana Depok PHK, karyawan histeris”. Orang-orang dalam video itu meratap, saling meminta maaf, dan berpelukan.



Suasana gerai Ramayana yang tutup di City Plaza Depok, Jawa Barat, 9 April lalu./TEMPO/M Taufan Rengganis

Hingga Jumat dinihari, 10 April lalu, cuitan itu dicuit ulang 8.000 kali dan disukai 12 ribu pengguna lain. “Itu kejadian tanggal 4 April,” kata Manajer Toko Ramayana City Plaza Depok M. Nukmal Amdar, mengklarifikasi video yang beredar, kepada *Tempo*, Rabu, 8 April lalu.

Nukmal membenarkan informasi adanya pemecatan pekerja di Ramayana Ciplaz Depok. Pada 4 April itu, dia menjelaskan, manajemen mengumpulkan semua pekerja, mengabarkan penutupan toko secara permanen sekaligus pemecatan mereka.

Sebanyak 87 pekerja Ramayana dipecat. Itu belum mencakup pekerja konsinyasi—pegawai dari distributor atau pabrik yang ditaruh di mal. Menurut Nukmal, manajemen menutup toko dan memecat pekerja karena tak kuat lagi menahan ongkos operasional. Jualan juga seret gara-gara wabah Covid-19. Tingkat penurunan, ucap dia, mencapai 80 persen. “Proyeksi ke depan akan makin berat.”

Kabar kelam ini menambah panjang daftar dampak pandemi Covid-19 terhadap dunia usaha. Retail modern menjadi salah satu korban keganasan wabah, menyusul sektor lain yang lebih dulu tumbang, seperti pariwisata dan industri turunannya.

•••

INDUSTRI retail modern memulai tahun 2020 dengan muram. Biasanya, setiap awal tahun, perusahaan-perusahaan retail modern menaruh target penjualan yang tinggi. Tanggal 1 Januari, bagi peretail modern, adalah puncak kunjungan masyarakat ke mal. “Tapi harapan itu pupus,” tutur Roy Mandey, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Kamis, 9 April lalu.

Hujan deras disusul banjir di sejumlah titik di Jakarta dan sekitarnya membuyarkan impian para peretail. Banjir yang nyaris melumpuhkan Ibu Kota memaksa masyarakat tidak *ngemal*. “Walaupun banjirnya tidak di seluruh Indonesia, pasar utama kami itu Jakarta dan sekitarnya,” ujar Roy.

Bisnis mulai pulih pada minggu kedua. Tapi ternyata hanya sesaat. Sejak pekan ketiga Januari hingga akhir Februari, kekhawatiran mulai menyeruak. Gelombang wabah Covid-19 mulai menyebar ke segala penjuru dunia. Baru pada awal Maret pemerintah mengumumkan secara resmi bahwa virus sudah masuk ke Indonesia. “Saat itu, kami berusaha mempertahankan bisnis,” kata Roy.

Sampai akhirnya keluar kebijakan pemerintah yang meminta tempat-tempat masyarakat biasa berkerumun ditutup guna mencegah penyebaran virus *corona*. Salah satunya pusat belanja.

Terdapat lima jenis anggota Aprindo, yakni minimarket, supermarket, *hipermarket*, grosir, dan *department store* atau pasar raya. Yang paling tersapu oleh kebijakan itu adalah *department store*, yang saban hari menjual kebutuhan nonpangan. “Di pusat-pusat belanja, jenis retail modern inilah yang tutup,” ucap Roy. Sementara itu, retail

penjual aneka bahan pangan tetap boleh, bahkan harus, buka. Pada saat yang sama, masyarakat memprioritaskan belanja pangan ketimbang sandang.

Direktur Utama Matahari Department Store Terry O'Connor merasakan betul dampak Covid-19 tersebut. Kondisi retail menurun tajam pada Maret kendati pada Januari dan Februari sempat memenuhi harapan. "Saat ini kami beroperasi dalam kondisi yang sangat tidak pasti," kata Terry pada akhir Maret lalu.

Perusahaan kemudian mengambil keputusan merespons kebijakan sejumlah pemerintah daerah yang menutup pusat belanja. Terry mengumumkan penutupan semua gerai Matahari mulai akhir Maret. Penutupan direncanakan berlangsung dua pekan dan bisa diperpanjang, tergantung situasi.

Tak hanya menutup gerai, direksi dan Dewan Komisaris PT Matahari Department Store (LPPF) membatalkan rekomendasi pembagian dividen tahun buku 2019. Perusahaan juga menyisir semua biaya yang sekiranya bisa disisihkan. Ini adalah upaya perusahaan memangkas beban secara besar-besaran. Misalnya lewat pengurangan jam kerja dan penerapan cuti tidak berbayar, juga pemangkasan pemasaran, perjalanan dinas, serta gaji. Pemotongan gaji terbesar dilakukan di level manajemen senior.

Imbas lain adalah sejumlah pegawai mesti dirumahkan. Roy Mandey, yang juga menjabat Wakil Presiden Komisaris Matahari Department Store, tak menyangkal informasi tersebut. Pekerja yang dirumahkan, menurut Roy, masih mendapat gaji. "Belum ada pertemuan lagi dengan dewan direksi," tuturnya. "Tapi mau bertahan berapa lama? Kita belum tahu akhir dari Covid-19 ini."

Roy mengungkapkan, anggota asosiasi bisnis *department store* belum melaporkan jumlah pegawai yang dirumahkan. Dia tidak tahu pasti berapa pegawai retail modern yang tergulung gelombang pemecatan dan dirumahkan gara-gara pandemi.

...

BERSTATUS supermarket yang sebagian besar menjual bahan pangan, PT Trans Retail Indonesia tidak sepenuhnya selamat dari pandemi Covid-19. Pemilik jaringan supermarket Transmart dan Carrefour itu juga dipaksa keadaan merumahkan sejumlah pekerja. Vice President Corporate Communication Trans Retail Satria Hamid tak merinci berapa pegawai Trans Retail yang dirumahkan, tapi menjamin mereka sudah didata dan nama-namanya disetor ke dinas tenaga kerja setempat. "Agar mendapat bantuan dari pemerintah di program Kartu Prakerja," kata Hamid ketika dihubungi, Kamis, 9 April lalu.

Menurut Hamid, Trans Retail tidak bisa menghindari gelombang merumahkan pekerja kendati sebagian supermarket mereka masih beroperasi. Di Mall of Indonesia, misalnya, ketika pusat belanja itu tutup, Carrefour tetap buka, walau harus menggunakan akses khusus.

Memang, masih ada pendapatan dari penjualan pangan ketika supermarket beroperasi. Perusahaan juga membuka layanan pembelian dari rumah lewat situsnya. Tapi ada penurunan pendapatan dari penjualan nonpangan yang juga dijajakan supermarket. “Pada sandang tetap terjadi transaksi, tapi jadi prioritas kedua,” ujar Hamid.

Apalagi Trans Retail juga terpaksa menutup jaringan Transmart, supermarket berkonsep *one-stop shopping*, lantaran harus mengikuti kebijakan pemerintah kota setempat. Ini yang membuat perusahaan memilih jalan serba efisiensi. Pegawai-pegawai di sektor operasional toko, baik pekerja Trans Retail maupun pegawai konsinyasi, paling banyak terkena dampak. “Kalau situasi sudah normal, mereka akan jadi prioritas untuk direkrut lagi.”

KHAIRUL ANAM, ADE RIDWAN YANDWIPUPTRA (DEPOK)





Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah: Kami Berharap PHK Pilihan Terakhir

majalah.tempo.co

2 mins read



i



Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah Tempo/Tony Hartawan

PADA hari yang sama, kepada Khairul Anam dari *Tempo*, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah memastikan pemerintah telah menyiapkan penanganan dampak Covid-19 terhadap sektor ketenagakerjaan. Kartu Prakerja yang semula diperuntukkan bagi para pencari kerja, politikus Partai Kebangkitan

Bangsa ini mencontohkan, kini dialihkan ke buruh yang dirumahkan dan dipecat.

Seberapa buruk kondisi gelombang PHK yang data sementaranya telah dikumpulkan Kementerian Ketenagakerjaan?

Kami berharap sekali pemutusan hubungan kerja itu benar-benar jadi pilihan terakhir. Saat ini ada sekitar 90 persen pengusaha atau perusahaan memilih merumahkan pekerjanya dengan tetap membayar penuh upah karyawan. Ada juga yang membayar separuh upah. Tapi ada juga pekerja yang tidak dibayar sama sekali.

Anda telah mengeluarkan surat edaran tentang perlindungan pekerja dan kelangsungan usaha dalam rangka penanggulangan Covid-19. Tapi serikat buruh justru menganggap surat edaran inilah yang membuka peluang pengusaha tak membayar upah sesuai dengan ketentuan karena membolehkan besaran upah dibayar seturut kesepakatan....

Jangan dibalik. Ini justru untuk menyelamatkan agar pengusaha tidak sepikah merumahkan pekerjanya. Jangan sampai pengusaha mengambil langkah sepikah. Apa pun yang dilakukan pengusaha harus didialogkan dengan buruh. Kalau tidak diatur begitu, pengusaha akan secara sepikah melakukan langkah-langkah dengan alasan wabah Covid-19.

Lalu bagaimana pemerintah menjamin para pekerja yang dipecat atau dirumahkan tidak makin miskin?

Kami sudah menyiapkan program Kartu Prakerja. Untuk menangani dampak krisis wabah corona ini, skemanya berubah. Lebih banyak diarahkan untuk pekerja yang di-PHK, tidak dibayar, atau dibayar separuh. Program ini juga untuk pelaku usaha mikro-kecil.

Orientasinya tidak lagi pada pencari kerja. Anggaran untuk Kartu Prakerja ini dulu—sebelum postur anggaran diubah untuk penanganan Covid-19—sebanyak Rp 10 triliun. Sekarang Rp 20 triliun. Dulu penerimanya hanya 2 juta orang, sekarang 5,6 juta orang.

Apa yang akan diberikan program ini?

Bantuan akan diberikan selama empat bulan. Insentifnya Rp 600 ribu per orang selama empat bulan. Pelatihannya juga mengikuti aturan *physical distancing* dan *social distancing*. Pelatihan kerja secara *online*. Nilai pelatihan maksimal Rp 1 juta.

Basis data penerima Kartu Prakerja dari mana?

Setiap kementerian dan lembaga bekerja mengumpulkan. Kementerian Ketenagakerjaan mengidentifikasi melalui serikat buruh, pengusaha, dan dinas tenaga kerja. Data pekerja di sektor

usaha mikro, kecil, dan menengah melalui Kementerian Koperasi dan UMKM. Data pekerja informal sektor pariwisata dikerjakan Kementerian Pariwisata. Pendataan ini sudah berjalan.

Lantas data siapa yang akan menjadi acuan?

Semua data akan dipakai. Nanti diverifikasi. Program ini dikomandoi Kementerian Koordinator Perekonomian. Data itu akan disinkronkan dengan data yang ada di Kementerian Dalam Negeri untuk memeriksa usianya, apakah mereka masih bersekolah atau tidak. Acuannya, usia 18 tahun sudah tidak bersekolah.

Apakah kuota sebanyak 5,6 juta orang itu akan cukup untuk mencakup besarnya potensi kenaikan tingkat pengangguran gara-gara Covid-19?

Kami merasa itu sudah cukup. Kami tidak berharap ada gelombang PHK lebih banyak. Program jaring pengaman sosial lain sudah banyak dikerjakan Kementerian Sosial. Ada program bantuan sosial yang nilainya ditambah. Ada program-program yang dulu memang tidak diorientasikan untuk mengatasi krisis, misalnya program padat karya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Pertanian. Presiden meminta sinergi kementerian dan lembaga. Kalau masih punya penghasilan tapi dirumahkan, dia masuk program Kartu Prakerja.

Jadi pekerja yang dipecat atau dirumahkan bisa mendaftar sendiri sebagai calon penerima Kartu Prakerja?

Bisa langsung melalui dinas, bisa langsung ke kami, bisa lewat serikat pekerja. Data bisa dari mana-mana. Toh, nanti diverifikasi. Mereka yang sudah dapat tidak bisa dapat untuk kedua kalinya.



Sinyal Merah dari Jenewa

majalah.tempo.co

4 mins read

8

i



Sejumlah pekerja yang diduga terinfeksi virus corona berada dalam karantina Westlite, di Singapura, 7 April 2020./Reuters/Minister of Manpower Singapore

- ILO memperkirakan 25 juta pekerjaan hilang akibat wabah Covid-19.
- Singapura dan Malaysia membuat kebijakan subsidi upah.
- Malaysia dinilai kurang memberi perhatian besar kepada usaha kecil dan menengah.

RGANISASI Buruh Internasional (ILO) memberikan peringatan bahaya dampak jangka panjang Covid-19:

Upengangguran. Dari Jenewa, Selasa, 7 April lalu, Direktur Jenderal ILO Guy Ryder menyampaikan perkiraannya bahwa 25 juta pekerjaan hilang akibat wabah ini. Jika wabah terus berlangsung hingga tiga bulan mendatang, akan terjadi pengurangan jam kerja yang setara dengan 195 juta pekerja. Badan dunia itu mencatat empat sektor global yang terkena dampak paling drastis: makanan dan akomodasi (144 juta pekerja), retail dan grosir (482 juta), layanan dan administrasi bisnis (157 juta), serta manufaktur (463 juta).

Menurut taksiran ILO, dampak terhadap pengurangan jam kerja itu di Asia-Pasifik bisa sekitar 7,2 persen atau setara dengan 125 juta pekerja penuh waktu. Wabah ini, menurut ILO, adalah krisis global terburuk sejak Perang Dunia II. “Ini ujian terbesar bagi kerja sama internasional dalam lebih dari 75 tahun,” kata Ryder, yang menambahkan bahwa dampak itu akan sangat bergantung pada penyebaran virus dan kebijakan negara-negara.

Singapura salah satu negara di luar Cina yang paling awal melaporkan adanya korban virus *corona*. Kasus pertama dikonfirmasi pada 23 Januari 2020. Hingga Jumat, 10 April lalu, jumlah kasus di negeri itu mencapai 1.910 dengan korban meninggal 6 orang. Untuk menekan dampak terhadap ekonomi masyarakat, Senin, 6 April lalu, pemerintah mengumumkan paket stimulus ketiga senilai Sin\$ 5,1 miliar. Bersama dua paket sebelumnya, nilai total stimulus itu menjadi Sin\$ 59,9 miliar atau sekitar 12 persen dari produk domestik bruto (PDB) negara tersebut.

Pemerintah juga menggelontorkan bantuan tunai langsung kepada keluarga berpenghasilan rendah dan menengah yang menjadi penganggur atau mencari pekerjaan baru. Mereka dapat menerima hibah sebesar Sin\$ 800 per bulan selama tiga bulan.

Paket stimulus terbesar diberikan untuk menggerakkan ekonomi, terutama sektor pariwisata. Salah satunya berupa Skema Dukungan Pekerjaan. Program ini dibuat untuk membantu perusahaan mempertahankan pekerja lokal. Untuk setiap pekerja lokal, pemerintah akan membayar 8 persen upahnya selama tiga bulan. Bantuan ini berlaku bagi pekerja bergaji tidak lebih dari Sin\$ 3.600 per bulan.

Menurut situs pemerintah Singapura, dana akan diberikan lewat pengusaha akhir Juli tahun ini. Dengan jumlah pekerja lokal lebih dari 1,9 juta, program ini akan menelan biaya Sin\$ 1,3 miliar.

Stimulus ekonomi lain diberikan kepada sektor pariwisata. Wakil Perdana Menteri Heng Swee Keat menyebutkan salah satu yang

terkena dampak hebat adalah Bandar Udara Internasional Changi, “pilar penting” ekonomi yang menyumbang lebih dari 5 persen PDB negeri itu dan mempekerjakan sekitar 192 ribu orang. Pemerintah memperkenalkan paket dukungan untuk membantu industri penerbangan, seperti potongan tarif pendaratan dan biaya parkir serta bantuan sewa bagi maskapai penerbangan dan agen kargo. “Hub udara mendukung sektor ekonomi lain, seperti pariwisata, manufaktur, dan logistik,” tutur Keat.

Sejumlah langkah serupa ditempuh Malaysia, negara yang mengidentifikasi kasus virus *corona* sejak Januari lalu. Untuk menekan penyebaran *corona*, negeri itu mengeluarkan kebijakan pembatasan gerak (MCO) mulai 18 Maret lalu hingga 29 April mendatang.

Malaysia sudah dua kali mengeluarkan paket kebijakan ekonomi untuk menanggulangi dampak pandemi ini. Paket pertama senilai US\$ 4,8 miliar dikeluarkan pada akhir Februari lalu. Paket kedua senilai US\$ 57 miliar diumumkan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin pada 27 Maret lalu.

Institut Riset Ekonomi Malaysia (MIER) memperkirakan sekitar 2,4 juta warga Malaysia bisa kehilangan pekerjaan jika kebijakan pembatasan pergerakan itu diperpanjang dua pekan. Menurut taksiran Bank Pembangunan Asia (ADB), jika sampai September nanti wabah tak bisa dikendalikan, 409 ribu orang akan menganggur.

Untuk mengatasi berkurangnya pendapatan atau risiko menjadi penganggur, pemerintah menggelontorkan bantuan tunai langsung sebesar US\$ 2,2 miliar bagi keluarga kelas menengah dan bawah. Rumah tangga dengan penghasilan bulanan US\$ 916 atau kurang, misalnya, akan mendapat bantuan US\$ 366 per bulan. Keluarga dengan penghasilan lebih besar menerima bantuan lebih kecil.

Pemerintah juga akan mencairkan US\$ 735 juta melalui Bantuan Sara Hidup, program distribusi bantuan keuangan kepada rumah tangga setiap tahun. Program baru lain adalah insentif layanan telekomunikasi untuk membantu warga yang bekerja dan belajar di rumah. Pemerintah berjanji mengeluarkan US\$ 138 juta untuk program Internet gratis sejak 1 April selama periode pembatasan.

Namun paket lebih besar dibuat untuk mendorong ekonomi. Salah satu yang diberikan pemerintah adalah subsidi upah. Dengan program ini, pekerja yang berpenghasilan kurang dari US\$ 916 per bulan akan menerima subsidi US\$ 137 per bulan selama tiga bulan ke depan.

Untuk memacu pertumbuhan ekonomi, pemerintah akan mengurangi kontribusi karyawan dalam Employee Provident Fund. Ini program tabungan pensiun wajib untuk pekerja swasta. Karyawan biasanya

menyetor 7-11 persen dari gaji bulanan mereka. Sekarang jumlahnya dikurangi menjadi 4 persen.

Perusahaan juga akan dibebaskan dari kewajiban pembayaran Dana Pengembangan Sumber Daya Manusia (HRDF) selama enam bulan untuk semua sektor mulai 1 April. HRDF adalah dana yang dibentuk untuk pengembangan keterampilan karyawan.

Ada skema besar juga buat usaha kecil dan menengah. Bank sentral Malaysia akan memberikan pinjaman US\$ 453 juta bagi sektor ekonomi ini dengan bunga maksimal 3,75 persen per tahun. Ada juga skema kredit mikro US\$ 43 juta bagi usaha kecil di industri pariwisata. Dalam paket stimulus kedua, terdapat tambahan alokasi US\$ 1 miliar untuk kelompok usaha ini.

Pemerintah juga akan merilis proyek infrastruktur skala kecil senilai US\$ 450 juta. Dalam paket stimulus kedua, terdapat tambahan US\$ 5,7 miliar. Sebanyak US\$ 457 juta dialokasikan untuk proyek infrastruktur skala kecil guna membantu perusahaan konstruksi kecil.

Ahli ekonomi Nadia Jalil dalam ulasan di *South China Morning Post* menilai paket stimulus ini kurang memperhatikan usaha kecil dan menengah. Program subsidi upah itu diperkirakan baru mencakup 3,3 juta pekerja. Padahal usaha kecil dan menengah punya sekitar 9-10 juta pekerja. Meskipun bisa memanfaatkan moratorium pinjaman dan memakai pinjaman lunak, usaha kecil sulit bertahan di tengah kelesuan ekonomi seperti saat ini.

Fazil Irwan Som, Direktur Eksekutif International Strategy Institute, juga menilai program perlindungan ekonomi masih kurang. Menurut dia, runtuhnya bisnis dalam ukuran apa pun secara massal berarti hilangnya pekerjaan jutaan orang. "Inilah yang tidak ada dalam paket stimulus: kesadaran bahwa bisnis penyelamatan mirip dengan melindungi kesejahteraan rakyat," ujarnya seperti dilansir *The Star*.

Ancaman Pengangguran Akibat Wabah

Negara	Populasi*	Pengangguran
Cina	1,400	52.784.000
Jepang	126	3.268.000
India	1,376	2.383.000
Thailand	69,7	1.837.000
Korea Selatan	51,2	1.732.000
Vietnam	97,1	1.463.000
Indonesia	272,8	1.405.000
Filipina	109,2	739.000
Malaysia	32,2	409.000
Kamboja	16,6	400.000
Taiwan	23,8	340.000
Bangladesh	164,3	307.000
Sri Lanka	21,3	220.000
Pakistan	219,9	176.000
Hongkong	7,4	130.000
Singapura	5,8	118.000

Nepal	29	98.000
Kazakhtan	18,7	91.000
Laos	7,2	68.000
Republik Kyrgiztan	6,5	34.000
Mongolia	3,2	29.000
Maldiv	0,436	22.000
Bhutan	0,807	3.000
Brunei	0,346	2.000
Total		68.000.000

*Dalam juta

Template Penilaian Dampak Ekonomi Covid-19 ADB soal taksiran berapa banyak pekerjaan yang akan hilang di 24 negara Asia yang disurvei jika pemerintah gagal menahan wabah pada akhir September tahun ini.

Bahan: Diolah dari ADB, worldometers.info, eco-business.com

ABDUL MANAN (CHANNEL NEWS ASIA, THE STAR, CNBC, SOUTH CHINA MORNING POST)





Depresi Bisnis Transportasi

majalah.tempo.co

4 mins read



i



Deretan bus-bus Antar Kota Antar Provinsi di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta, 1 April lalu./TEMPO/M Taufan Rengganis

- Bisnis angkutan lunglai terimbas pandemi Covid-19.
- Simpang-siur kebijakan menambah persoalan.
- Stimulus pelonggaran pembiayaan untuk pengemudi ojek online terhambat masalah data.

AMPIR dua pekan ini ratusan bus antarkota antarprovinsi (AKAP) milik Perusahaan Otobus Lorena menganggur.

Hanya 40 dari sekitar 400 unit bus milik PT Eka Sari Lorena Transport Tbk tersebut yang beroperasi setiap hari. Itu pun dengan tingkat keterisian penumpang tak lebih dari 60 persen.

Ratusan bus lain yang juga dikelola perseroan, seperti unit Transjabodetabek—layanan bus pengumpulan Transjakarta—and Jabodetabek Airport Connexion tujuan bandar udara, lebih dulu mandek. “Percuma jalan, enggak ada penumpang,” kata Managing Director PT Eka Sari Lorena Transport Tbk Dwi Ryanta Soerbakti, Kamis, 2 April lalu.

Bisnis transportasi lunglai sejak pemerintah menerapkan kebijakan bekerja dari rumah (*work from home*) mulai 16 Maret lalu untuk mencegah meluasnya penyebaran wabah virus corona. Simpang-siur kebijakan pembatasan operasi angkutan umum selama masa tanggap darurat corona pun sempat membuat industri kalang-kabut.

Semula, Dinas Perhubungan DKI Jakarta menerbitkan surat penghentian layanan semua bus AKAP, bus antar-jemput antarprovinsi yang trayek asal dan tujuannya DKI Jakarta, serta bus pariwisata yang berdomisili di Ibu Kota. Sedianya, pembatasan akses bus berlaku mulai Senin, 30 Maret lalu, pukul 18.00.

Diteken Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo, surat bernomor 1588/-1.819.611 itu juga menyiapkan sanksi bagi para pelanggar. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menindaklanjutinya dengan mengeluarkan surat edaran bernomor SE 5 BPTJ Tahun 2020 yang meminta pembatasan angkutan umum hingga jalan tol.

Pengusaha bus, yang mengetahui rencana tersebut beberapa hari sebelumnya, berancang-ancang. Organisasi Angkutan Darat (Organda) sempat menyebutkan bahwa sekitar 48 ribu bus akan dikandangkan mulai Senin sore itu.

Namun, belakangan, semuanya berubah setelah Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan membantalkannya. Pelaksana tugas (plt) Menteri Perhubungan itu—menggantikan sementara Budi Karya Sumadi, yang tengah dirawat karena terjangkit Covid-19—menunda rencana pembatasan operasi bus hingga ada kajian mengenai dampak ekonomi. “Sesuai dengan arahan Menko Maritim dan Investasi selaku plt Menhub, pelarangan operasi itu ditunda dulu, sambil menunggu kajian dampak ekonomi secara keseluruhan,” juru bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati, menginformasikan.

Di tengah kondisi yang serba tak pasti, Organda kini kembali dipusingkan oleh rencana baru kenaikan harga tiket dan pembatasan jumlah penumpang bus untuk membatasi jumlah pemudik di tengah pandemi. Rancangan kebijakan ini disampaikan juru bicara Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi.

Menurut Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Organda Ateng Haryono, kas operator bus kini tengah berdarah-darah. Omzet angkutan penumpang turun lebih dari 75 persen. “Ini sudah dialami bahkan jauh saat corona mulai diumumkan, kemudian ada *physical distancing*,” tutur Ateng, Ahad, 5 April lalu. Akibat situasi ini, pengusaha bus kini khawatir tidak bisa membayar sejumlah kewajiban pajak, retribusi, juga kredit bank.

•••

SIMPANG-siur kebijakan pemerintah di tengah penanganan pandemi Covid-19 tak hanya merepotkan pengusaha transportasi. Sebelumnya, pidato Presiden Joko Widodo pada 24 Maret lalu juga sempat membuat bingung pengemudi ojek *online* dan industri pembiayaan kendaraan bermotor.

Selasa itu, dalam konferensi pers, Jokowi menyatakan akan memberikan keringanan pembayaran cicilan kendaraan, antara lain kepada pengendara ojek. “Kepada tukang ojek, kepada sopir taksi yang sedang kredit kendaraan bermotor dan kredit mobil, nelayan yang sedang kredit perahu, tidak perlu khawatir,” ucapnya. “Pembayaran bunga dan angsuran diberi kelonggaran satu tahun.”



Pengemudi ojek online menunggu penumpang di Shelter Dukuh Atas, Jakarta, 19 Maret lalu./TEMPO/Muhammad Hidayat

Mendadak sontak pernyataan itu memicu kesalahpahaman. Sejumlah perkumpulan pengemudi ojek *online* mengeluhkan masih adanya penagihan pembayaran cicilan kendaraan bermotor oleh lembaga pembiayaan. Belakangan baru jelas bahwa kebijakan kelonggaran kredit atau pembiayaan itu merupakan bagian dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19.

Mulai berlaku 16 Maret lalu, kebijakan OJK ini memang membuka peluang dilakukannya restrukturisasi kredit dan pelonggaran cicilan. Sasarannya tak spesifik menyebutkan sopir ojek *online*, tapi membidik debitur kecil seperti pekerja harian dan sektor informal serta usaha mikro. Syaratnya pun beraneka macam, yang paling utama debitur terkena dampak Covid-19. Adapun jenis pelonggaran, termasuk jangka waktu penundaan pembayaran cicilannya, bergantung pada penilaian bank atau lembaga pembiayaan.

Itu sebabnya, bagi pengemudi Gojek seperti Kurniawan Agung dan sejumlah koleganya, kegembiraan mendengarkan pidato Jokowi pada 24 Maret lalu tak berlangsung lama. Setelah bertanya ke sana-ke sini, termasuk ke lembaga pembiayaan, mereka pesimistis bisa mendapat pelonggaran tersebut. “Ada sejumlah persyaratan yang mungkin sulit dipenuhi,” ujar Kurniawan, ciut. Salah satunya, kata dia, kebanyakan pengemudi ojek *online* mengambil kredit bukan atas nama pribadi, melainkan meminjam identitas saudara lantaran hampir semua perusahaan pembiayaan meminta rekam penghasilan tetap berupa rekening koran tiga bulan terakhir.

Bisa Meningkat Setelah Tertekan Corona

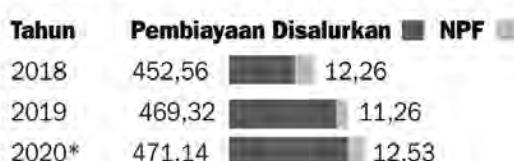
Tingkat kredit dan pembiayaan bermasalah mulai menunjukkan tanda-tanda kenaikan pada awal tahun ini. Situasi bisa bertambah runyam setelah pandemi virus *corona* menghantam sejumlah sektor usaha. Sejumlah pengusaha sudah berancang-ancang meminta keringanan pembayaran utang.

Penyaluran Kredit dan Tingkat Kredit Bermasalah (NPL) (Rp triliun)



*hingga Januari 2020

Piutang Pembiayaan dan Tingkat Pembiayaan Bermasalah (NPF) (Rp triliun)



Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia Suwandi Wiratno menjelaskan, syarat legal memang harus dipenuhi untuk memperoleh fasilitas keringanan kredit. Ketentuan bahwa fasilitas pinjaman diberikan kepada orang yang menandatangi pinjaman, ujar dia, "Syarat nomor satu."

Syarat lain adalah debitor tidak memiliki tunggakan sebelum 2 Maret 2020—hari ketika pemerintah mengumumkan kasus pertama Covid-19 di Indonesia. Ada juga syarat jaminan kendaraan atau jaminan lain masih dalam penguasaan debitor sesuai dengan perjanjian pembiayaan.

Menurut Suwandi, sejauh ini sudah ada beberapa debitor yang mengajukan permohonan fasilitas tersebut. Nantinya, perusahaan pembiayaan melihat kasus per kasus, seperti seberapa persen pendapatan debitor turun akibat Covid-19 sehingga mempengaruhi kemampuan membayar cicilan. "Tiap debitor akan berbeda-beda hasil penilaian," ucapnya, Kamis, 2 April lalu.

Toh, rencana pelonggaran cicilan kredit kepada pengemudi ojek *online* ini tak mudah dilaksanakan. Persoalan muncul karena perusahaan pembiayaan belum mengetahui siapa saja nasabah mereka yang benar-benar merupakan pengemudi ojek *online*.

Otoritas Jasa Keuangan telah meminta dua perusahaan *ride-hailing* terbesar, Gojek dan Grab, melakukan pendataan. "Sayangnya, sampai hari ini datanya belum masuk. Kami terus mengejar setiap hari supaya Grab dan Gojek segera mengirimkan datanya," kata anggota Dewan Komisioner OJK, Riswinandi, dalam rapat virtual OJK dan Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa, 7 April lalu.

**RETNO SULISTYOWATI, FRANCISCA CHRISTY ROSANA,
CAESAR AKBAR, FAJAR PEBRIANTO**



Sementara Untuk Dalam Negeri

majalah.tempo.co

2 mins read

i



Karyawan Pabrik Alkohol dan Spiritus Abadi (PASA) Jatiroti, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, sedang memasukkan cairan disinfektan ke dalam jiriken./Tempo/David Priyasadidharta

- **Pabrik alkohol anak usaha PTPN XI bersiap memulai produksi untuk memenuhi kebutuhan domestik.**
- **Pemerintah menjamin permintaan dalam negeri meningkat.**

KETEL di Pabrik Alkohol dan Spiritus Abadi (PASA) Jatirotto, Lumajang, Jawa Timur, segera bekerja lagi dalam satu- dua pekan ke depan. Mesin giling akan kembali memproses sedikitnya 50 ton tetes tebu per hari. Bahan baku telah tersedia sebanyak 1.700 ton molase dari beberapa pabrik gula terdekat, seperti Pabrik Gula (PG) Panji, Situbondo; PG Semboro, Jember; dan PG Jatirotto. “Saat ini akan dilakukan tes ketel lebih dulu,” kata General Manager PASA Jatirotto Mochamad Khoiri kepada *Tempo*, Rabu, 1 April lalu.

Produksi alkohol kali ini mungkin hanya akan memenuhi satu dari tiga tangki penyimpanan yang masing-masing berkapasitas 450 ribu liter. Sebelumnya, produksi alkohol bisnis anak usaha PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XI ini terhenti karena tangki penuh ketika penjualan tak lancar.

Belakangan, kondisinya berbalik. Sejak awal tahun, PASA Jatirotto kebanjiran permintaan etanol dari beberapa negara yang siap membeli berapa pun stok yang tersedia. Kebutuhan etanol untuk bahan antiseptik memang meningkat seiring dengan pandemi Covid-19. “Mereka mau mengambil semua,” ucap Khoiri.

Mesir, misalnya, sempat meminta sampel produk dan akan memesan Rp 30 ribu per liter. Namun kemudian rencana dagang ini batal. Pemerintah untuk sementara melarang ekspor etil alkohol atau etanol untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan dalam negeri lantaran meluasnya penyebaran wabah *corona*. Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Larangan Sementara Ekspor Antiseptik, Bahan Baku Masker, Masker, dan Alat Pelindung Diri yang berlaku efektif 18 Maret lalu.

Larangan itu belakangan menuai protes Asosiasi Spiritus dan Etanol Indonesia (Asendo). Wakil Sekretaris Jenderal Asendo Hendra Setiawan menyebutkan total produksi etanol domestik sangat melimpah, yakni mencapai 180-185 juta liter per tahun. Sedangkan kebutuhan di dalam negeri diperkirakan hanya 13-14 juta liter. Surplus itu, kata dia, semestinya tetap bisa dieksport. “Sesuai dengan imbauan Pak Presiden untuk mendorong ekspor produk Indonesia,” ujarnya.

Hendra memastikan para produsen akan memprioritaskan etanol untuk kepentingan dalam negeri di masa pandemi. Namun, pada saat yang sama, dia mendesak pemerintah memperjelas pasar domestik, termasuk memetakan kebutuhan di setiap daerah. Dengan begitu, produsen bisa mengalkulasi potensi penyerapan produk di dalam negeri.

Hendra pun mempertanyakan kebijakan pemerintah yang justru mengizinkan impor produk etil alkohol dalam bentuk sudah jadi. Dia menilai langkah ini justru mencederai industri dalam negeri.

Unek-unek dari kalangan industri tersebut sebenarnya telah disampaikan kepada Kementerian Perindustrian sebelum regulasi larangan ekspor terbit. Asosiasi juga melayangkan surat kepada Kementerian Perdagangan, Kantor Staf Presiden, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk memaparkan data produksi alkohol industri dalam negeri. Hanya Kementerian Perindustrian yang merespons keluhan produsen.

Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kementerian Perindustrian Muhammad Khayam membenarkan adanya keluhan dari asosiasi produsen etanol. Kementerian Perindustrian, dia menjelaskan, sebenarnya juga telah mengusulkan kebijakan tidak melarang ekspor dengan syarat industri menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri. Artinya, hanya produk yang tidak terserap pasar domestik yang dieksport.

Khayam mengatakan yang perlu diatur sebenarnya adalah tata niaga bahan baku pembuatan etanol, yakni molase atau tetes tebu. Produk tersebut selama ini masih bebas dieksport. Namun, menurut Khayam, rapat koordinasi lintas kementerian memutuskan lain. “Ya sudah, enggak apa-apa. Toh, pelarangan ini sifatnya sementara, sampai Juni saja,” tuturnya.

Adapun ihwal impor produk etanol, Khayam mengatakan itu merupakan bagian dari negosiasi dagang pemerintah dengan Pakistan. “Jumlahnya enggak banyak,” ucapnya. Khayam memastikan kebutuhan etanol dalam negeri meningkat tajam untuk pembuatan penyemprotan tangan (*hand sanitizer*), disinfektan, dan keperluan medis lain.

Di pabrik PASA Jatiroti, Khoiri punya keyakinan sama. Kelangkaan bahkan telah mendongkrak harga jual alkohol, yang kini di pasar telah mencapai Rp 100 ribu per liter. “Teman-teman di luar Jawa juga akan membutuhkannya.”

**RETNO SULISTYOWATI, DAVID PRIYASIDHARTA
(LUMAJANG)**



Bersiasat Menutup Ibu Kota

majalah.tempo.co

6 mins read



i



Suasana lengang hari pertama penerapan PSBB di kawasan Sudirman, Jakarta, 10 April 2020. Tempo/Tony Hartawan

- Persiapan DKI membatasi pergerakan penduduk dimulai awal Maret lalu.
- Diperkirakan 1,5 juta pekerja informal dan harian terkena imbas penyebaran virus corona.
- Jakarta juga akan memperbanyak rapid test dan swab test.

MELALUI telepon, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menyampaikan kabar pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) kepada Ketua Kamar Dagang

dan Industri DKI Diana Dewi pada Selasa siang, 7 April lalu. Kepada Diana, Anies mengatakan surat persetujuan dari Kementerian Kesehatan telah diterima pemerintah DKI. Kebijakan untuk mencegah penyebaran virus *corona* tersebut bakal berlaku tiga hari kemudian. “Beliau bertanya soal sikap Kadin,” ujar Diana menceritakan komunikasi tersebut kepada *Tempo*, Rabu, 8 April lalu.

Diana mengatakan para pengusaha yang tergabung di Kadin sudah membaca isi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Aturan itu menyebutkan ada delapan industri yang dikecualikan dalam penerapan PSBB. Salah satu yang menimbulkan kebingungan di kalangan pengusaha adalah definisi industri strategis yang mendapat pengecualian dalam peraturan itu.

Diana lalu meminta Gubernur menetapkan kriteria industri strategis agar definisinya tidak meluas. Misalnya industri yang memproduksi kepentingan masyarakat, seperti farmasi dan makanan. Gubernur juga diminta memperhatikan industri skala mikro yang sudah kehilangan pembeli. Menurut Diana, Anies mengatakan sedang menyusun peraturan gubernur untuk menjelaskan lebih detail soal pengaturan untuk industri. “Beliau bilang mudah-mudahan permintaan kami bisa dimasukkan,” ucapnya.

Pada Kamis, 9 April lalu, Anies Baswedan menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial di DKI Jakarta. Setelah menyebutkan ada delapan sektor yang dikecualikan, seperti kesehatan, bahan pangan, energi, komunikasi, dan teknologi informasi, Anies menambahkan dua sektor, yaitu pelayanan dasar dan utilitas publik, juga industri yang ditetapkan sebagai obyek vital nasional serta obyek tertentu dan kebutuhan sehari-hari. “Mesti ada pengaturan jumlah karyawan yang bekerja dan mesti ada pembatasan fisik,” kata Anies.

Komunikasi intensif antara Anies dan para pengusaha terjalin tak lama setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus positif *corona* pertama pada Senin, 2 Maret lalu. Sepuluh hari berselang, Anies bertemu dengan para pengusaha di Balai Kota. Kala itu, dia memaparkan penyebaran *corona* di Jakarta. Diana Dewi menuturkan, situasi saat itu belum terlalu mencekam. Sepekan berselang, Anies mengumpulkan pengusaha melalui konferensi video. Dalam rapat ini, Anies menanyakan kebutuhan pengusaha selama masa darurat *corona*. “Termasuk stimulus apa yang diminta pengusaha,” ujar Diana.

Untuk memperlancar komunikasi dengan Gubernur dan pejabat di Balai Kota, para pengusaha berinisiatif membuat grup WhatsApp bernama “Dunia Usaha”. Mereka mengundang Anies Baswedan, Sekretaris Daerah Jakarta Saefullah, dan sejumlah kepala dinas ke

grup ini. Para pengusaha kerap berdiskusi dan menyampaikan aspirasi kepada pemerintah DKI. “Meskipun Gubernur jarang berkomentar di grup,” kata Diana.

• • •

PEMERINTAH DKI sebenarnya sudah menyiapkan berbagai skenario untuk menghadapi penyebaran Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19 sejak awal Maret lalu. Ketika itu, pemerintah DKI Jakarta menyiapkan skenario karantina wilayah. Namun, belakangan, pemerintah pusat menolak rencana tersebut. Pada pertengahan Maret lalu, Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian Sri Hartati mengundang sejumlah ekonom, seperti peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati; ekonom Universitas Gadjah Mada, Elan Satriawan; serta seorang mantan ekonom Bank Dunia.

Enny Sri Hartati menuturkan, pejabat di DKI meminta masukan jika karantina wilayah diberlakukan. Dia memprediksi, ada 1,5 juta pekerja informal dan pekerja harian di DKI Jakarta yang bakal terkena dampak Covid-19. Jumlah penerima bantuan bisa lebih dari dua kali lipat. “Kami mengusulkan, coba dulu selama 14 hari,” ujar Enny. Dia juga menyarankan pemerintah Jakarta bekerja sama dengan warung makan guna menyiapkan makanan bagi penduduk Jakarta. Untuk distribusinya, pengelola warung bisa bekerja sama dengan ojek *online*.



Petugas gabungan Polisi dan Dinas Perhubungan melakukan pengawasan pelaksanaan PSBB di Jalan Raya Kalimalang, Jakarta, 10 April 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

Ihwal pengaturan ojek *online*, hingga Rabu, 8 April lalu, Anies Baswedan masih melobi Kementerian Perhubungan agar melonggarkan pembatasan. Pemerintah DKI Jakarta tak melarang ojek

membawa penumpang selama pengemudinya memenuhi protokol, seperti mengenakan masker dan menggunakan *hand sanitizer*. Persoalannya, Peraturan Menteri Kesehatan menyatakan pengemudi sepeda motor hanya diperbolehkan membawa barang, bukan penumpang. Jika peraturan di atasnya berubah, kata Anies, pemerintah DKI akan menyesuaikan diri.

Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Ahmad Yani sudah menyampaikan permintaan DKI Jakarta ke Kementerian Kesehatan. Menurut Yani, usul itu selaras dengan gagasan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi serta Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Pemerintah akan membuat protokol keamanan untuk pengojek dan penumpang jika regulasi dilonggarkan. "Tim Kementerian Kesehatan akan memformulasikan ulang," ujar Yani.

Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta juga sempat mengumpulkan sejumlah asosiasi pengusaha untuk membicarakan berbagai skenario karantina wilayah. Wakil Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluru Indonesia Sarman Simanjorang mengatakan pengusaha mesti diberi kelonggaran dalam beberapa hal tertentu. Misalnya yang terkait dengan penyaluran distribusi pangan. "Banyak kebutuhan retail dan perdagangan yang disuplai pabrik di luar Jakarta," kata Sarman.

Mengikuti aturan PSBB, mulai Jumat, 10 April lalu, pengelola aplikasi Gojek dan Grab menghentikan sementara pelayanan pengantaran penumpang di Jakarta. Namun taksi *online* masih diperbolehkan. Chief Corporate Affairs Gojek Nila Marita dan Managing Director Grab Indonesia Neneng Goenadi menyadari pembatasan itu untuk mencegah meluasnya penyebaran Covid-19.

Meski ada pembatasan transportasi, Dinas Perhubungan DKI tak menghentikan operasi bus antarkota selama PSBB berlaku. Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo menyebutkan hanya ada pembatasan jam operasi angkutan antarkota, yaitu pukul 6 pagi hingga 6 sore. Ketentuan ini berbeda dengan usul Dinas Perhubungan ke Kementerian Perhubungan pada akhir Maret lalu, yakni menyetop transportasi antarkota. Syafrin mengakui kelonggaran itu juga tak sesuai dengan rekomendasi Badan Pengelola Transportasi Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi. "Rekomendasi tidak kami laksanakan," kata Syafrin.

• • •

PEMERINTAH DKI sejak pertengahan Maret lalu juga *ngebut* mempersiapkan logistik untuk menghadapi skenario pembatasan pergerakan manusia. Pada 18 Maret lalu, Direktur Utama Tjipinang Food Station Arief Prasetyo menerima kunjungan Kepala Badan

Reserse Kriminal Kepolisian RI Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Arief menuturkan, kepolisian ingin memastikan jaminan ketersediaan logistik dari sentra produksi dan distribusi. Listyo Sigit kala itu menjelaskan stok pangan seperti beras dan bawang putih masih mencukupi.

Hingga Rabu, 8 April lalu, stok beras di Pasar Induk Beras Cipinang masih sebanyak 30 ribu ton. Hari itu, Pasar Beras Cipinang mendapat tambahan pasokan 198 truk beras atau sebanyak 2.342 ton. Pasar tersebut juga sudah mendapat stok gula sebanyak 500 ton dan tambahan 1.000 ton dari sejumlah pabrik di Jawa Timur. Targetnya, kata Arief, ketersediaan gula mencapai 4.000 ton. “Ini untuk mencukupi kebutuhan 14 hari di Jakarta,” ujarnya.



Stok ketersedian beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, 18 Maret 2020.
(TEMPO/Muhammad Hidayat)

Selama pembatasan sosial, sesuai dengan Pasal 21 ayat 1 Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2020, pemerintah daerah memberikan bantuan kebutuhan pokok kepada penduduk rentan. Anies Baswedan mengatakan DKI Jakarta menyiapkan bantuan pangan kepada 1,2 juta warga DKI dengan kategori miskin dan rentan miskin. Anggaran yang disiapkan sebesar Rp 7 triliun. Hingga Kamis, 9 April lalu, sebanyak 20 ribu keluarga telah menerima bantuan pangan pemerintah.

Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Irmansyah mengatakan pemberian bantuan tahap pertama bakal dilakukan hingga 18 April. Pada periode selanjutnya, 19-23 April, DKI Jakarta bakal mendata mereka yang belum terdaftar. Bahan kebutuhan pokok rencananya didistribusikan ke tingkat rukun tetangga dan rukun warga dengan bantuan pasukan TNI/Polri.

Distribusi logistik mulai digelar pada Kamis, 9 April lalu. Komandan

Distrik Militer Jakarta Utara Letnan Kolonel Tri Handaka mengaku sudah menyiagakan pasukan untuk pendistribusian di 18 rukun warga di Kelurahan Penjaringan. Bantuan logistik akan ditempatkan di sejumlah titik di kelurahan sebelum didistribusikan dari pintu ke pintu. “Kami siagakan pasukan di setiap RW,” ujar Tri Handaka.

DKI Jakarta juga meningkatkan pengujian Covid-19 melalui *rapid test* atau tes cepat dan *polymerase chain reaction* (PCR). Pemerintah DKI menargetkan sebanyak 100 ribu penduduk bisa mengikuti tes tersebut. Sejauh ini, kata Ketua Gugus Tugas Covid-19 DKI Jakarta Catur Laswanto, sebanyak 30.802 orang telah menjalani tes cepat. “Angka persentase positif sebanyak 3,1 persen atau 949 orang,” ujar Catur.

Laboratorium Kesehatan DKI Jakarta pun telah menyiapkan satu unit alat tes PCR yang ditempatkan di Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu. Dalam akun Instagramnya, Laboratorium Kesehatan DKI menyatakan laboratoriumnya sudah beroperasi sejak Kamis, 9 April lalu. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widayastuti dan Kepala Laboratorium Kesehatan DKI Endra Muryanto belum bisa dimintai konfirmasi mengenai kapasitas laboratorium tersebut. Namun juru bicara RSUD Pasar Minggu, Wati, justru mengatakan tak tahu soal keberadaan laboratorium itu. “Nanti saya cek,” katanya.

**WAYAN AGUS PURNOMO, FRANCISCA CHRISTY ROSANA,
TAUFIQ SIDDIQ**



Halang Rintang Proposal Kilat

majalah.tempo.co

4 mins read



i



Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan didampingi Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo (kanan) memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di Jakarta, 18 Maret 2020.
ANTARA/Dewanto Samodro

- Gugus Tugas Covid-19 turun tangan membantu DKI mendapatkan izin penerapan PSBB.
- Anies Baswedan mengajukan status PSBB dua hari sebelum peraturan Menteri Kesehatan terbit.

- Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dinilai terlalu birokratis soal PSBB.
-

MENGHADIRI rapat di kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada Ahad, 5 April lalu, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyinggung soal usul pemerintah DKI Jakarta untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Dalam persamuan itu, Terawan menyebutkan ada sejumlah data yang belum dipenuhi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Kepala BNPB yang juga Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo, merespons dengan menyatakan Jakarta secara prinsip siap melaksanakan PSBB. Pelaksana tugas Deputi Penanganan Darurat BNPB, Dody Ruswandi, yang hadir dalam forum itu, mengatakan Doni juga meminta Terawan segera memberi tahu Anies agar melengkapi dokumen yang diminta Kementerian. “Pak Doni juga menyarankan Kementerian menanyakan kesiapan Jakarta soal logistik, bantuan sosial, dan keamanan,” ujar Dody ketika dihubungi lewat telepon pada Jumat, 10 April lalu.

Empat hari sebelum rapat di kantor BNPB atau 1 April 2020, Anies mengirim surat ke Menteri Terawan. Ada dua hal yang ditulis dalam surat tersebut, yaitu agar Jakarta segera diberi status PSBB dan meminta supaya daerah penyangga Ibu Kota dianggap sebagai bagian dari episentrum wabah. Surat itu dikirim dua hari sebelum Kementerian Kesehatan mengeluarkan peraturan penerapan PSBB. Sesuai dengan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, status PSBB baru bisa dikeluarkan setelah ada peraturan Kementerian Kesehatan.

Dua pejabat di Balai Kota yang mengetahui penyusunan draf surat itu mengatakan Anies semula menyertakan sejumlah data penunjang. Misalnya soal jumlah dan sebaran kasus positif corona di Jakarta. Belakangan, informasi itu dicabut dari surat resmi yang dikirim ke Terawan karena Balai Kota menilai telah rutin melaporkan pembaruan kasus ke Kementerian Kesehatan.

Surat Anies dibalas Menteri Terawan setelah rapat di kantor BNPB. Dalam balasannya, Terawan mengatakan pemerintah DKI perlu melengkapi surat permohonan PSBB dengan data penunjang, antara lain jumlah kasus, peta sebaran, dan skenario mitigasi bila pembatasan sosial berlaku. Di ujung suratnya, Terawan meminta Anies mengajukan ulang surat permohonan yang dilengkapi dokumen yang diminta Kementerian.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Oscar Primadi mengatakan institusinya meminta pemerintah DKI Jakarta melengkapi data karena hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB. Menurut dia, data itu diperlukan untuk melihat tren dan skala penularan virus corona yang terjadi di Jakarta. “Kami berupaya hati-hati memberikan izin, namun tetap responsif,” ujar Oscar.

Pada hari yang sama dengan pengiriman surat Terawan kepada Anies, Kementerian Kesehatan menerima surat dari Kepala Gugus Tugas Covid-19 Doni Monardo. Surat bernomor B-29/KA GUGAS/PD 01.02/04/2020 itu berisi rekomendasi atas usul penetapan status pembatasan sosial di Jakarta. Doni membentarkan kabar bahwa timnya mengirimkan surat kepada Menteri Kesehatan sebagai kelanjutan hasil rapat dengan Terawan di kantornya.

Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Covid-19 Wiku Adisasmito menyebutkan institusinya mengajukan rekomendasi penetapan status pembatasan sosial setelah mencermati penyebaran virus corona di Jakarta. Menurut dia, jumlah kasus positif dan angka kematian pasien di Ibu Kota terus bertambah secara signifikan. "Kami melihat Jakarta sudah memenuhi kriteria untuk segera menerapkan pembatasan sosial," ujar guru besar Universitas Indonesia ini.

Saat menimbang izin PSBB untuk DKI, pada Senin siang, 6 April lalu, Terawan juga mengikuti pertemuan telekonferensi yang dipimpin Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhamdijir Effendy. Rapat beragenda pembahasan pemodelan kasus Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19 itu juga diikuti sejumlah ahli kesehatan. Muhamdijir meminta ahli kesehatan masyarakat memberikan saran kepada Terawan tentang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar.

Pandu Riono, pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia yang ikut dalam pertemuan itu, menilai konten regulasi pembatasan sosial sekadar menjiplak Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Begitu pula isi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB. Pandu mengatakan, dengan situasi virus telah menyebar ke berbagai penjuru, pembatasan sosial seharusnya tak hanya berlaku di tingkat daerah, tapi secara nasional. "Syarat pengajuannya juga aneh dan terlalu birokratis," ujarnya. Menurut Pandu, Terawan berjanji memperhatikan kritiknya dalam pemberian izin PSBB.

Sebelum pertemuan telekonferensi itu digelar, Balai Kota menerima surat permintaan data tambahan dari Kementerian Kesehatan. Merespons isi dokumen tersebut, Gugus Tugas Covid-19 DKI Jakarta sempat menyiapkan sejumlah dokumen yang diminta Kementerian. Namun, menurut dua pejabat di Balai Kota, data itu cuma dikirim via pesan elektronik setelah Kementerian mengontak pejabat Dinas Kesehatan dan memberitahukan bahwa tak perlu membalas surat secara resmi. Wakil Kepala Dinas Kesehatan Khafifah Any tak membenarkan ataupun membantah. "Kira-kira seperti itu," ujar Khafifah.

Upaya pemerintah Jakarta mengajukan pembatasan mobilitas penduduk di wilayahnya dimulai menjelang akhir Maret lalu. Anies mengirimkan surat permohonan karantina wilayah kepada Presiden Joko Widodo melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Seorang pejabat Balai Kota yang ikut merancang isi surat tersebut mengatakan pemerintah DKI menyatakan virus corona telah menyebar ke penjuru Jakarta.

Proposal itu diajukan sebelum ada peraturan pemerintah yang merupakan turunan dari Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Presiden Jokowi pun sebelumnya menyampaikan tak ingin ada karantina wilayah.

Tiga hari setelah Anies mengusulkan karantina, Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Regulasi itu mengatur pembatasan kegiatan masyarakat untuk memutus penularan virus, alih-alih mengkarantina wilayah. Juru bicara Presiden, Fadjroel Rachman, mengatakan usul Gubernur Anies otomatis gugur setelah aturan tersebut keluar.

Jumat, 10 April lalu, pembatasan sosial berskala besar resmi berlaku di Jakarta. Provinsi itu menjadi yang pertama menerapkan PSBB. Hari itu, dari 3.293 kasus positif corona di seluruh Indonesia, dengan 306 orang meninggal, lebih dari separuhnya terjadi di Ibu Kota, dengan 1.810 kasus positif dan 156 orang meninggal.

RAYMUNDUS RIKANG, DEVY ERNIS

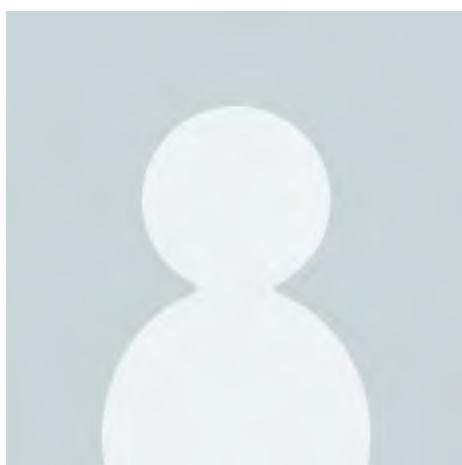




Penyangga Mengharap Tetangga

majalah.tempo.co

4 mins read



i



Pemberlakuan pembatasan pengunjung supermarket di Tiptop, Depok, Jawa Barat, 30 Maret 2020.
ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

- Sejumlah daerah di Jawa Barat dan Banten akan mengikuti jejak DKI menerapkan PSBB.
 - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyerahkan proposal pengajuan ke Kementerian Kesehatan.
 - Pembatasan transportasi menuju Jakarta mulai terlihat.
-

HARI belum berganti setelah Kementerian Kesehatan menyetujui status pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil langsung menggelar rapat dengan sejumlah kepala daerah pada Selasa malam, 7 April lalu. Digelar secara *online*, rapat itu dihadiri para kepala daerah di Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, dan Depok.

Rapat yang berlangsung mulai sekitar pukul 20.00 hingga 22.30 itu membahas prosedur pengajuan status PSBB dalam penanganan wabah virus corona di Jawa Barat. Kepada peserta rapat, Ridwan menyampaikan bahwa wilayah Bogor, Bekasi, dan Depok, yang merupakan daerah penyangga Ibu Kota, harus menjadi satu kluster dengan Jakarta. Alasannya, 70 persen sebaran pasien Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19 berada di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. “Apa pun kebijakan DKI harus diikuti oleh daerah tersebut,” ujar Ridwan, Rabu, 8 April lalu.

Pada Jumat, 10 April lalu, DKI Jakarta telah menerapkan status PSBB. Dengan status itu, DKI memiliki pijakan untuk menerapkan pembatasan pergerakan orang dan transportasi serta menyalurkan bantuan kepada penduduk yang miskin dan rentan terkena dampak. Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim mengatakan daerah yang berbatasan dengan Jakarta akan mengajukan proposal melalui Gubernur Ridwan. “Gubernur akan menyampaikan ke pusat,” ujar Dedie.

Sehari setelah rapat para kepala daerah Jawa Barat, Rabu, 8 April lalu, dokumen pengajuan diteruskan Ridwan ke Kementerian Kesehatan. Ridwan juga mengajukan secara lisan usul pengajuan status PSSB dalam rapat *online* bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada Selasa, 7 April lalu. Gubernur Banten Wahidin Halim, yang menjadi peserta rapat, sepakat mengajukan status yang sama untuk diterapkan di wilayah Tangerang Raya. “Persoalan ini mesti ditangani secara khusus melalui skema kluster,” kata juru bicara Ma'ruf Amin, Masduki Baidlowi.





Petugas Dinas Perhubungan (Dishub) melakukan pendataan mobil kendaraan menuju Jakarta di gerbang tol Bekasi Barat, Jawa Barat, 8 April 2020. ANTARA/Fakhri Hermansyah

Para kepala daerah penyangga Ibu Kota mulai menyusun sejumlah rencana teknis, dari pembatasan orang hingga skema pemberian bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak. Dedie A. Rachim menyebutkan telah menyiapkan anggaran Rp 334 miliar untuk percepatan penanganan corona dan persiapan penerapan PSBB. Duit itu antara lain digunakan untuk keperluan logistik senilai Rp 210 miliar serta paket bahan kebutuhan pokok dan dapur umum Rp 42 miliar.

Pemerintah Kota Bogor juga menyiapkan program pascabencana yang meliputi kompensasi retribusi Rp 18 miliar serta modal untuk usaha kecil dan mikro Rp 16 miliar. “Saat ini, kami masih melakukan pendataan penerima bantuan,” ucap Dedie. Penerima bantuan antara lain berasal dari para penerima beras sejahtera, pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja, dan pekerja informal.

Meskipun proposal PSBB sudah diajukan, para kepala daerah khawatir terhadap durasi status PSBB. Apalagi Jakarta belum menetapkan sampai kapan status PSSB berlangsung. Menurut Dedie, wilayahnya hanya sanggup mengalokasikan dana penanganan corona selama satu-dua bulan. Jika durasi PSBB melebihi jangka waktu itu, Dedie khawatir keuangannya bakal kembang-kempis. Musababnya, pemasukan ke kas daerah dari pajak dan bidang jasa lain seret karena pembatasan sosial.

Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar menyampaikan hal serupa. Dia mengatakan kabupatennya tak sanggup menanggung sendiri anggaran penanganan wabah corona. Zaki memperkirakan daerahnya membutuhkan lebih dari Rp 1 triliun untuk penanganan corona selama tiga bulan jika PSBB diterapkan. Anggaran itu terutama ditujukan untuk bantuan sosial kepada 100 ribu keluarga di wilayahnya dengan besaran Rp 600 ribu per bulan. “Makanya harus dibantu pemerintah pusat, Banten, dan DKI,” ujarnya.

Sejumlah kepala daerah penyangga mengusulkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut memberikan bantuan sosial kepada warga non-DKI. Soalnya, kata Dedie, tak sedikit warga Bogor yang bekerja atau tinggal di DKI. Usul itu telah disampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam rapat *online* pada Rabu, 8 April lalu. Ihwal usul permintaan bantuan dari daerah, Asisten Bidang Perekonomian DKI Jakarta Sri Haryati mengatakan bantuan bagi warga non-DKI akan diberikan pemerintah pusat.

Supaya PSBB di wilayah penyangga bisa lekas terlaksana, Gubernur DKI Anies Baswedan mengusulkan daerah mengadopsi teknis PSSB yang telah ditetapkan pada Kamis, 9 April lalu. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat Berli Hamdani Gelung Sakti, sekaligus juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Barat, mengatakan pelaksanaan PSBB di Bogor, Depok, dan Bekasi akan mengikuti DKI. Hampir semua aktivitas dibatasi kecuali transportasi untuk keperluan logistik dan medis, kebutuhan dasar masyarakat, serta keperluan lain yang mendesak.



Petugas mengawasi mobilitas kendaraan dari dan ke luar wilayah Bekasi setelah pembatasan sosial berskala besar berlaku di DKI Jakarta. TEMPO/M. Taufan Rengganis

Hanya, untuk pembatasan ojek *online*, yang tak boleh mengangkut penumpang, Jawa Barat belum mengambil sikap. Peraturan Kementerian Kesehatan melarang kendaraan roda dua mengangkut penumpang. Jawa Barat akan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. "Tentu akan dilihat situasinya karena ada kebijakan-kebijakan khusus yang akan diambil kepala daerah," ujar Berli.

Pembatasan transportasi juga dilakukan Kota Tangerang. Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangerang Wahyudi Iskandar mengatakan pembatasan jam operasional diterapkan pada bus *rapid transit* (BRT),

yakni hanya sampai pukul 20.00. "Kapasitasnya juga kami batasi 50 persen," ucap Wahyudi. Sebanyak 30 BRT yang ada saat ini masih beroperasi. Hanya, jumlah penumpangnya dibatasi, dari 24 menjadi 12 orang.

Di Bekasi, lalu lintas kendaraan yang mengarah ke Jakarta terpantau sepi di hari pertama pemberlakuan PSBB di DKI. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Dadang Ginanjar mengatakan volume kendaraan menurun signifikan dibanding tiga hari belakangan. Dari pengamatannya sejak pukul enam hingga tujuh pagi, hanya ada 20 kendaraan pribadi yang masuk ke Jakarta melalui Gerbang Tol Bekasi Barat setiap 15 menit. "Biasanya 200 kendaraan pribadi setiap 15 menit," ujar Dadang. Namun ia mengingatkan, Jumat, 10 April, merupakan hari libur memperingati wafatnya Isa Almasih.

Adapun Depok dan Bogor berencana menetapkan jam malam. Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan aturan itu masih dikaji mengingat banyaknya warga Depok yang masih bekerja hingga larut malam.

**DEVY ERNIS, AHMAD FIKRI (BANDUNG), ADI WARSONO (BEKASI), ADE RIDWAN (DEPOK),
M.A. MURTADHO (BOGOR), JONIANSYAH (TANGERANG)**



Jangan Sampai Ada Moral Hazard

majalah.tempo.co

9 mins read

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan wabah Covid-19 bakal menggerus pertumbuhan ekonomi nasional tahun ini. Pandemi juga berpotensi menambah jutaan orang miskin baru. Untuk mengatasi dampak Covid-19, pemerintah menyiapkan dana ratusan triliun rupiah sebagai jaring pengaman sosial hingga program pemulihan ekonomi. Pembangunan ibu kota negara yang baru dipastikan tetap berjalan.



Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa saat ditemui TEMPO di ruang kerjanya di kediamannya, Jakarta, Rabu, 8 April 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

- **Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan pertumbuhan ekonomi nasional sangat terdampak dengan merebaknya wabah corona.**
- **Sesuai pemodelan dari beberapa perguruan tinggi dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Bappenas memperkirakan puncak wabah terjadi pada Mei dengan 92 ribu kasus.**
- **Walaupun pandemi Covid-19 diperkirakan berlangsung dalam beberapa bulan hingga akhir tahun ini, pemerintah tetap melanjutkan proyek pembangunan ibu kota baru.**

PEMERINTAH merombak postur serta rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun ini akibat pandemi virus corona yang mulai membahayakan perekonomian nasional. Anggaran di beberapa kementerian dan lembaga tinggi negara dipangkas dan dialihkan untuk penanganan Covid-19. "Pemotongan anggaran lebih banyak

dilakukan Kementerian Keuangan, tapi didiskusikan dengan Bappenas,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa dalam wawancara khusus dengan *Tempo*, Selasa, 7 April lalu.

Suharso, 65 tahun, mengatakan pandemi Covid-19 yang diprediksi berlangsung hingga beberapa bulan ke depan berpotensi mendongkrak tingkat kemiskinan melebihi angka tahun lalu yang sebesar 9 persen. Jika pagebluk ini tidak lekas ditangani, target pemerintah mengentaskan angka kemiskinan di kisaran 7 persen pada 2024 juga dapat terancam. Apalagi, hingga pekan lalu, lebih dari 1 juta pekerja dirumahkan dan terkena pemutusan hubungan kerja.

Pemerintah telah menambah alokasi anggaran Rp 405,1 triliun untuk membeli alat kesehatan, perlindungan sosial, insentif pajak, hingga program pemulihan ekonomi. Suharso memastikan penataan ulang keuangan negara tidak berimbang signifikan pada proyek strategis nasional, termasuk pembangunan ibu kota baru. “Menurut kami, tidak perlu diberhentikan,” ujar politikus Partai Persatuan Pembangunan itu.

Kepada wartawan *Tempo*, Mahardika Satria Hadi, Wayan Agus Purnomo, Hussein Abri Dongoran, Khairul Anam, dan Raymundus Rikang, Suharso menjelaskan sejumlah hal, dari dampak Covid-19 terhadap perekonomian hingga kelanjutan proyek-proyek strategis nasional. Wawancara berlangsung melalui video konferensi pada Selasa, 7 April lalu. Wawancara dilanjutkan di kediaman Suharso di Dharmawangsa, Jakarta Selatan, keesokan harinya.



Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa (tengah) berbincang dengan pekerja Jalan tol trans Sumatera ruas Sigli - Banda Aceh

di Blang Bintang, Aceh Besar, Aceh, Jumat, 13 Maret 2020. (ANTARA/Irwansyah Putra)

Bagaimana dampak pandemi *corona* terhadap rencana pembangunan nasional?

Pasti ada pengaruhnya. Rencana pembangunan nasional itu berisi asumsi-asumsi dan target-target. Kalau salah satu asumsinya berubah, dengan sendirinya semua perhitungan berubah, baik dari sisi pembiayaan maupun waktu pengerjaannya. Asumsi yang paling penting bagi kami adalah asumsi pertumbuhan ekonomi makro. Pertumbuhan ekonomi kita tentu sangat terkena dampak.

Apakah dampak ekonominya saat ini jauh di luar perkiraan Bappenas?

Hampir semua negara tidak menduga virus *corona* memberi pengaruh negatif sedemikian rupa terhadap perkembangan ekonomi negara masing-masing. Bahkan Amerika Serikat sampai hari ini juga mencoba dengan berbagai macam alternatif kebijakan fiskalnya. Begitu pula Jepang, Singapura, dan negara-negara besar lain.

Bagaimana Bappenas menilai kesiapan ekonomi Indonesia menghadapi pandemi?

Indonesia tidak bisa dibandingkan dengan, misalnya, Singapura dan Malaysia, yang produk domestik bruto (PDB) per kapitanya jauh di atas kita. Bahkan Cina sudah 11 ribu dolar per kapita. Dilihat dari sisi itu, tentu kapasitas kita tidak dalam posisi yang siap. Negara-negara itu bisa menghadapi wabah dengan memberikan kebijakan fiskal, bahkan belanja fiskal yang lebih besar. Sementara itu, kita masih berharap dengan tingkat pertumbuhan ekonomi paling tidak 5 persen dan rata-rata ingin sampai 6 persen pada 2024. Jadi tidak *apple to apple* kalau dibandingkan dengan Indonesia.

Menteri Keuangan memperkirakan pertumbuhan ekonomi turun ke angka 2,3 persen sampai minus 0,4 persen karena pandemi ini. Bagaimana perhitungan Bappenas?

Kami justru menganggap mungkin sampai akhir tahun 2,2 persen. Ya, mudah-mudahan yang benar Kementerian Keuangan. Kami lebih sedikit pesimistik karena terjadi *shortfall* yang cukup besar di penerimaan pajak. Lalu konsumsi menurun. Kontribusi terbesar di dalam PDB kita adalah konsumsi (rumah tangga), sekitar 56 persen. Kalau konsumsi turun, itu tandanya peringatan. Investasi juga terganggu. Kita tidak bisa mengharapkan investasi dengan situasi seperti ini. Di sisi lain, kemampuan fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi juga terbatas. Untungnya, surat utang negara

global sebesar US\$ 4,3 miliar diserap (pasar). Tapi harganya mahal dan *yield*-nya besar.

Bagaimana dengan sumber pendanaan lain?

Kalau dilihat di dalam negeri, kapasitas kita juga sangat terbatas. Contoh, kita punya dana pihak ketiga di perbankan Indonesia, mungkin saat ini sekitar Rp 5.500 triliun. Nah, rasio *loan-to-deposit* kira-kira 95 persen. Artinya, uang Rp 5.500 triliun dari dana pihak ketiga sudah dikreditkan 95 persen. Sisanya tinggal 5 persen, dikalikan Rp 5.500 triliun itu Rp 275 triliun. Sementara itu, kebutuhan kita jauh di atas itu.

Bukankah pemerintah sudah menganggarkan Rp 405,1 triliun untuk mengatasi pandemi Covid-19?

Untuk membelanjakan Rp 405,1 triliun, kita mesti menciptakan defisit sebesar Rp 853 triliun. Di samping itu, kita masih menciptakan lagi Rp 150 triliun yang *below the line*. Artinya, bukan masuk belanja, tapi juga pembiayaan. Kalau dijumlahkan sudah Rp 1.000 triliun dana yang diperlukan untuk pemulihan ekonomi. Anda bayangkan. Jadi menciptakan utang baru dengan jumlah yang lumayan. Tapi memang kita tidak punya pilihan.

Apakah kebutuhan dana yang besar untuk mengatasi Covid-19 bakal mempengaruhi kelanjutan proyek-proyek strategis nasional?

Proyek-proyek strategis nasional itu kebanyakan sifatnya tahun jamak. Kalau titik awalnya misalnya April atau Mei, akan ada pergeseran enam bulan, sembilan bulan, sampai satu tahun. Jadi bisa diakomodasi di waktu berikutnya. Cuma, kita berharap terjadi efek kejut pegas. Mudah-mudahan pertumbuhan ekonomi yang rendah tahun ini seperti kita menekan pegas serendah-rendahnya, lalu dia melenting lebih tinggi. Siapa tahu tahun depan tumbuh 7 persen. Tapi untuk mencapai itu harus digerakkan lewat fiskal. Swasta kan sedang lesu semua. Bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia.

Adakah proyek-proyek infrastruktur yang ditangguhkan?

Yang sudah dimulai silakan dimulai, hanya mungkin ada jedanya sedikit, kemudian dilanjutkan. Jadi tidak ada yang kami hentikan. Bahkan untuk ibu kota negara masih terus. Menurut kami, tidak perlu diberhentikan. Cuma, sekarang hanya kerja *soft* supaya, kalau waktunya sudah memungkinkan, baru kita tancap gas.

Kerja *soft* seperti apa?

Untuk pekerjaan yang tidak terkait dengan konstruksi tetap diteruskan. Kami sekarang sedang menyelesaikan rancangan

induknya. Saya berharap rencana detailnya juga selesai akhir tahun ini atau lebih cepat sehingga tahun ini kita bisa melakukan *groundbreaking*. Kalaupun itu tertunda, mungkin hanya sampai tahun depan. Tapi semua kebutuhan untuk sampai pada *groundbreaking* sudah dikerjakan.

Pembangunan ibu kota baru diperkirakan menelan dana Rp 466 triliun, 19 persennya dari APBN. Dengan kondisi keuangan seperti sekarang, bagaimana jalan keluarnya?

Dari APBN diperlukan Rp 90-an triliun. Kami bisa bikin dalam tiga tahunlah. Sisanya tentu kami minta investasi dari investor dan KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha). Ini bisa menjadi peluang bisnis besar dalam rangka pemulihan ekonomi setelah wabah berakhir.



Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa saat ditemui *Tempo* di ruang kerjanya di kediannya di Jakarta, Rabu, 8 April 2020. TEMPO/M. Taufan Rengganis

Mengapa pemerintah tampak *ngotot* melanjutkan pembangunan ibu kota baru?

Saya memahami seakan-akan kalau saya katakan lanjut artinya pemerintah tidak punya empati kepada publik bahwa kita sedang menghadapi Covid. Saya kira itu keliru. Covid tetap kami nomorsatukan. Kalau Covid tidak selesai tahun ini, (proyek ibu kota baru) akan tertunda lebih lama. Tapi, kalau sampai dibatalkan, saya kira enggak karena sudah menjadi keputusan politik. Kalau rancangan undang-undangnya bisa diselesaikan tahun ini, artinya semua sudah mengikat.

Bagaimana Bappenas melihat potensi melonjaknya tingkat kemiskinan menyusul terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja selama pandemi ini?

Tingkat kemiskinan naik karena yang rentan miskin makin miskin, menengah yang pas-pasan jatuh miskin, yang miskin biasa menjadi miskin ekstrem. Akibatnya, penduduk ekstrem miskin makin bertambah. Karena itu, jaring pengaman sosial menjadi penting dan kami perlebar. Jadi kelompok sasarannya tidak lagi seperti yang di data kemiskinan itu, tapi buat masyarakat yang rentan yang bisa jatuh miskin karena penghasilan harian atau orang yang punya cicilan tiap bulan dan bergantung pada penghasilan harian. Semuanya kami masukkan dalam kebijakan fiskal untuk mengatasi Covid-19. Karena itu, selain anggaran kesehatan yang Rp 75 triliun, ada Rp 70 triliun yang kami alokasikan supaya tidak terbentuk kemiskinan baru, selain dana Rp 110 triliun yang sifatnya *social safety net* dan memang untuk mengatasi kemiskinan.

Jumlah penerimanya dilebarkan menjadi berapa?

Sekarang kami naikkan sampai 20 juta dari sebelumnya 15 koma sekian juta jiwa. Kalau kita bisa mengatasi se-Pulau Jawa saja, itu sudah bisa mengatasi kemiskinan yang luar biasa besarnya. Sebenarnya kemiskinan yang paling rentan itu justru di Jawa karena penduduknya 150 juta. Rasio kemiskinan tertinggi ada di Jawa.

Berapa persen tingkat kemiskinan nantinya gara-gara wabah Covid-19 ini?

Mungkin tetap di 9 persen. Mudah-mudahan enggak naik karena ada *social safety net* yang menahannya. Kalau tidak, ya tembus ke angka yang tidak kita inginkan. Sementara harapannya bisa 7 persen pada 2024. Tapi untuk menuju ke situ terhambat oleh kondisi sekarang.

Jumlah penderita Covid-19 terus bertambah. Menurut Bappenas, kapan pandemi ini mencapai puncaknya?

Kami melibatkan Institut Teknologi Bandung, Universitas Indonesia, bahkan Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan UNICEF (Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa) untuk menghitung peluang terbaik sampai skenario terburuk. Puncaknya seperti yang disampaikan Pak Doni Monardo (Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19) itu betul. Sebanyak 92 ribu kasus pada Mei. Angka itu artinya ada intervensi maksimal yang kami lakukan.

Intervensi maksimalnya seperti apa?

Pertama, menjaga seperti sekarang ini dengan *physical distancing*. Kedua, menyediakan tes di daerah-daerah yang dianggap zona merah. Saat tes diperbanyak, maka kapasitas laboratorium ditambah, diperkuat, dan diperlebar. Lalu kita siapkan, kalau puncaknya terjadi, berapa kapasitas dari rumah sakit yang tersedia.

Apakah kebijakan yang diambil pemerintah sejauh ini sudah intervensi maksimal?

Sambil jalan tentu kami perbaiki. Ada tahap-tahap skenario. Kalau dengan intervensi seperti ini hasilnya seperti apa.

Seberapa banyak jumlah penderita Covid-19 jika tanpa intervensi pemerintah?

Kalau tanpa intervensi, ibaratnya dari 100 orang dalam populasi, 50 di antaranya kena dulu. Dari situ rata-rata 2-3 persennya wafat, berarti 4-6 orang. Itu teori *herd immunity*. Jika tidak ada intervensi, waktunya juga lebih lama.

Bagaimana dinamika di dalam Istana selama penanganan Covid-19?

Saya kira Presiden Joko Widodo percaya kepada tim dan penyelesaiannya secara tim. Kalau ada yang berbeda pendapat, pasti terakhir kami berikan kepada Presiden, jadi beliau yang akan memutuskan.

Seperti apa contohnya?

Misalnya soal defisit APBN mau dibuka selebar berapa. Saya mengusulkan 4 persen cukup. Menteri Keuangan bilang bisa 5 persen lebih. Kami mengikuti keputusan Presiden.

Mengapa Anda memperkirakan defisit APBN cukup 4 persen?

Saya ini orang yang konservatif dalam hal kebijakan fiskal. Saya dulu sewaktu jadi anggota staf khusus Pak Hamzah Haz (Wakil Presiden 2002-2004) ikut menyusun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Saya pelajari dan diskusikan dengan Pak Hamzah Haz yang ahli pajak dan APBN. Kenapa ada batas defisit 3 persen, kenapa ada batas utang total 60 persen dari PDB. Kalau kita buka kembali perdebatan-perdebatan di masa itu, saya kira masih relevan untuk menjaga Indonesia beberapa tahun kemudian. Saya kan juga pernah di Dewan Perwakilan Rakyat dan menghadapi APBN berubah dua kali pada 2008 karena krisis kredit perumahan di Amerika Serikat yang berimbas pada sistem pembayaran di seluruh dunia. Waktu itu saya wakil ketua panitia anggaran yang ikut menentukan. Dengan pengalaman itu, saya ingin mencegah agar kita tidak terjebak dalam situasi yang buruk setelah wabah.

Mengapa pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk menghadapi pandemi Covid-19?

Sebenarnya kita punya KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan). Saya bukan anggota KSSK, ya. Rapat-rapat KSSK itu sampai pada satu usulan, yang kemudian oleh Menteri Keuangan dibawa ke sidang kabinet. Itulah asal-muasalnya perpu tersebut.

Apa pertimbangannya ketika itu?

Memang yang harus diselamatkan adalah semua sektor ekonomi. Dan ekonomi yang paling rentan juga adalah sektor moneter. Misalnya, ada pabrik tidak bisa berproduksi, artinya *cash flow*-nya terganggu dan tidak bisa memenuhi kewajibannya membayar bunga bank dan menggaji pegawai. Kalau dia punya utang bahan baku, enggak bisa bayar juga. Kalau secara kumulatif semua perusahaan terjadi seperti ini, akan mengganggu bank. Karena tidak bisa tertagih, itu akan mengancam sistem pembayaran dan mengancam likuiditas ekonomi. Mandek. Ibaratnya darahnya tak bergerak. Bisa terjadi lagi kasus seperti Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Karena itu, harus dicegah. Caranya dengan penyelamatan ekonomi dengan suntikan Rp 150 triliun.

Pasal 27 perpu itu menuai kritik karena membebaskan para pengelola anggaran dalam KSSK dari ancaman pidana jika mengakibatkan kerugian negara. Bagaimana tanggapan Anda?

Yang dikhawatirkan akan terjadi kriminalisasi terhadap kebijakan. Anda kan tidak bisa menghakimi, mengadili peristiwa masa lalu dengan keadaan sekarang. Misalnya, yang lalu itu salah karena menimbulkan kerugian negara. Oh, enggak bisa. Untuk itulah dibuat

aturan itu supaya apa yang diperlakukan pada hari itu, ya setop di hari itu. Tapi memang harus berdasarkan niat baik. Jangan sampai ada *moral hazard*. Itu penting. Karena itu, publik harus mengawasi, termasuk wartawan. Perpu ini sebenarnya mempersandingkan otoritas fiskal dan otoritas moneter untuk menghadapi situasi perekonomian Indonesia karena wabah Covid. Semua itu mengesampingkan keadaan yang biasa, dan menurut saya keadaan kahar sudah terpenuhi. Pertama, pendapatan negara anjlok, sementara belanja tetap. Kedua, wabah ini meluas.

Tapi perpu ini dinilai memberikan kewenangan yang terlampau besar kepada Presiden dan Menteri Keuangan.

Sebenarnya kewenangan pemerintah enggak terlalu besar kecuali soal defisit 3 persen itu. Yang banyak justru kami berikan kepada otoritas moneter dan KSSK.

Bagaimana reaksi Presiden ketika Menteri Keuangan menyampaikan gagasan tentang perpu tersebut?

Pertama soal mau enggak mau defisit akan melampaui 3 persen. Itu kan sudah melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Jadi memang harus ada undang-undang yang membolehkan itu. Tapi kita memberi batas bahwa pembolehan itu hanya pada 2020, 2021, dan 2022. Jadi bukan tanpa batas.

SUHARSO MONOARFA | Tempat dan tanggal lahir: Mataram, Nusa Tenggara Barat, 31 Oktober 1954 | **Pendidikan:** Fakultas Planologi Institut Teknologi Bandung (1974-1978); Executive Development Program di University of Michigan, Amerika Serikat (1994); Executive Program di Stanford University, Amerika Serikat (1995); Visiting Professor di Guangdong University of Finance, Cina, dan Business School University of Nottingham, Inggris (2016-2018) | **Karier:** Eksekutif di beberapa perusahaan (1984-2002), antara lain PT Bukaka Sembawang Engineering; Anggota staf khusus Wakil Presiden Hamzah Haz (2002-2004); Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (2004-2009); Menteri Perumahan Rakyat (2009-2012); Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (2015-2019); Pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (sejak 2019); Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas (sejak 2019) | **Penghargaan:** *Doctor honoris causa* bidang bisnis dari Central Queensland University, Australia (2019)

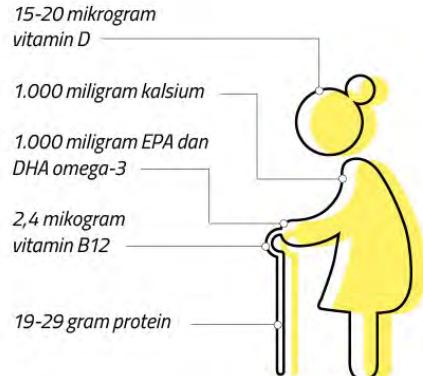


VITAMIN



SEJAK pertama kali muncul di Wuhan, Cina, akhir tahun lalu, virus corona kini sudah menyebar hampir ke seluruh dunia. Virus ini merusak kekebalan tubuh dan menyerang organ yang paling rapuh. Ia memang virus flu yang menyebabkan pneumonia. Tapi ia juga bukan sekadar flu karena daya tularnya yang masif dan mematikan. Cara menahan daya infeksinya dengan meningkatkan imunitas tubuh. Salah satunya dengan vitamin.

Kebutuhan gizi per hari untuk usia 60-70 tahun



Vitamin di sekitar kita

- » 1 ubi mengandung 1,4 miligram vitamin A
- » 1 jeruk mengandung 70 miligram vitamin C
- » 15 menit berjemur di bawah sinar matahari pagi pukul 08.00-10.00 cukup untuk memenuhi kebutuhan vitamin D
- » 100 gram kacang tanah mengandung 4,93 miligram vitamin E



Kecaman untuk Telegram Kapolri

majalah.tempo.co

3 mins read



i



Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Idham Azis. TEMPO/M. Taufan Rengganis

- Syarifuddin pimpin Mahkamah Agung.
- Gubernur Kepulauan Riau divonis empat tahun penjara.
- PNS dilarang mudik.

Kpencegahan dan penindakan selama masa pandemi virus corona pada 4 April lalu. Salah satu isinya memerintahkan jajaran kepolisian di pusat dan daerah menggelar patroli siber untuk memantau penyebaran kabar bohong di media sosial serta hoaks yang terkait dengan Presiden dan pejabat pemerintah.

Telegram tersebut menuai kritik dari berbagai kalangan. Wakil Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi NasDem, Ahmad Sahroni, mengatakan surat itu berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. “Nanti ada kritik sedikit langsung ditindak oleh polisi,” ujar Sahroni.

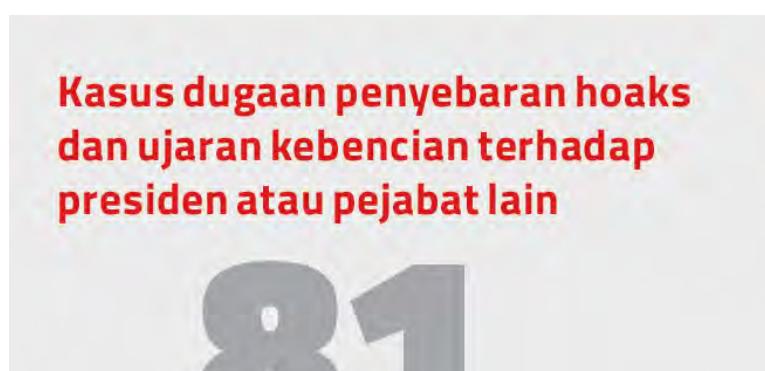
Cendekiawan muslim, Azyumardi Azra, menyebutkan isi telegram itu hanya menambah impitan psikososial masyarakat yang tidak puas dan kritis terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dan jajarannya soal penanganan pandemi corona. “Telegram itu membuat demokrasi Indonesia makin cacat,” katanya.

Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, juga menilai telegram tersebut berlebihan. Fickar mengatakan pasal penghinaan terhadap presiden tidak relevan lagi untuk Indonesia. Adapun peneliti dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Rivanlee Anandar, menyebutkan pemerintah memanfaatkan wabah untuk menekan kelompok yang bertentangan dengan Presiden Jokowi.

Merespons berbagai kritik tersebut, Jenderal Idham tak ambil pusing. “Pro-kontra itu biasa,” ucapnya. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Markas Besar Polri Brigadir Jenderal Argo Yuwono mengatakan telegram tersebut diterbitkan agar masyarakat tak terpengaruh oleh berita bohong di tengah wabah corona. “Juga supaya tidak ada individu yang memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan pribadi,” ujar Argo.

Tambah Tahanan di Tengah Wabah

MENCEGAH penyebaran kabar bohong, polisi mengintensifkan patroli siber di jagat maya. Hingga Kamis, 9 April lalu, jumlah kasus pun kian bertambah.



TERSANGKA

12

ORANG

WAJIB LAPOR

69

ORANG

ANCAMAN HUKUMAN:

- » **Pasal 45 dan 45-A** Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pidana maksimal enam tahun penjara
- » **Pasal 14 dan 15** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, hukuman maksimal 10 tahun penjara

**Penimbunan dan permainan
harga alat kebutuhan medis atau
bahan kebutuhan pokok**

18

KASUS

ANCAMAN HUKUMAN:

- » **Pasal 29 dan Pasal 107** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, hukuman maksimal lima tahun bui
- » **Pasal 62** Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pidana penjara paling lama lima tahun

SUMBER: MARKAS BESAR KEPOLISIAN RI, TEMPO.

Tambah Tahanan di Tengah Wabah

Ketua Baru Mahkamah Agung

MUHAMMAD Syarifuddin terpilih sebagai Ketua Mahkamah Agung

periode 2020-2025 menggantikan Hatta Ali, yang pensiun. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial ini menyisihkan dua pesaingnya, yakni Ketua Muda Bidang Pengawasan Andi Samsan Nganro dan Wakil Ketua Bidang Non-Yudisial Sunarto. “Saya tidak lebih baik dari Bapak-Ibu,” kata Syarifuddin dalam pidato sambutan pada Senin, 6 April lalu.



Hakim Agung Syarifuddin terpilih sebagai Ketua Mahkamah Agung periode 2020-2025 di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, 6 April 2020. ANTARA/Hafidz Mubarak A

Syarifuddin terpilih melalui voting dua putaran. Pada putaran pertama, ia mendapat 22 dari 44 suara sah. Berhadapan dengan Andi pada tahap berikutnya, ia mendapat 32 dari 46 suara sah.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. menyambut terpilihnya rekan satu almamaternya di Universitas Islam Indonesia itu. “Semoga bisa melanjutkan reformasi dunia hukum dan peradilan,” ujar Mahfud.

Gubernur Kepulauan Riau Divonis Empat Tahun

PENGADILAN Tindak Pidana Korupsi memvonis Gubernur Kepulauan Riau nonaktif Nurdin Basirun empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan. Majelis hakim menilai Nurdin terbukti menerima suap senilai Rp 45 juta dan Sin\$ 11 ribu serta gratifikasi sebesar Rp 4,2 miliar.

“Menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak pilih dalam jabatan publik selama lima tahun,” ujar ketua majelis hakim Yanto dalam persidangan telekonferensi, Kamis, 9 April lalu. Putusan

itu lebih rendah daripada tuntutan jaksa, yaitu penjara selama enam tahun dan denda Rp 250 juta subsider enam bulan kurungan.

Nurdin diduga menerima suap terkait dengan dua surat izin pemanfaatan laut. Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi, Muhammad Asri, dan Nurdin menyatakan akan menentukan sikap dalam tujuh hari ke depan. “Kami pikir-pikir,” ujar Asri.

Pegawai Negeri Dilarang Mudik

PRESIDEN Joko Widodo melarang aparatur sipil negara, personel Kepolisian RI dan Tentara Nasional Indonesia, serta pegawai badan usaha milik negara dan anak usahanya mudik untuk mencegah penyebaran virus *corona*. “Sudah kami putuskan. ASN, TNI, Polri, serta pegawai BUMN dilarang mudik,” kata Jokowi, Kamis, 9 April lalu.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo sebelumnya menerbitkan surat edaran tentang pembatasan kegiatan pegawai negeri sipil bepergian ke luar kota. Menurut Tjahjo, pegawai negeri yang nekat mudik akan kena sanksi kategori sedang. Sanksinya adalah penundaan kenaikan gaji dan kenaikan pangkat atau penurunan pangkat satu tingkat selama satu tahun.

Jika terbukti positif *corona*, amtenar tersebut dikenai sanksi disiplin berat karena membahayakan orang lain. Sanksinya berupa penurunan pangkat satu tingkat selama tiga tahun, pencopotan jabatan, serta pemberhentian secara tidak hormat.

Narapidana Koruptor Batal Bebas

KEMENTERIAN Hukum dan Hak Asasi Manusia membatalkan rencana pembebasan narapidana kasus korupsi dan narkotik untuk mencegah penularan virus *corona* di dalam penjara. “Saat ini tidak ada revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan,” kata Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Rika Aprianti pada Rabu, 8 April lalu.

Rencana pembebasan ini sebelumnya disampaikan Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly saat rapat dengan Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat. Keinginan Yasonna itu mendapat kecaman publik. Pada Senin, 6 April lalu, Presiden Joko Widodo menegaskan tak ada pembebasan untuk narapidana kasus korupsi.

Ketua Komisi Hukum DPR Herman Herry menyarankan Menteri Yasonna Laoly memperhatikan aspirasi masyarakat. Dia meminta Yasonna berfokus pada pembebasan 30 ribu narapidana umum.





Omnibus Law Rasa Corona

majalah.tempo.co

4 mins read

8

i



Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Persidangan III
Tahun Sidang 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan,
30 Maret 2020. ANTARA/Rivan Awal Lingga

- DPR mengebut pembahasan sejumlah RUU bermasalah.
- Omnibus law Cipta Kerja akan dibahas di Badan Legislasi karena dianggap lebih cepat.
- Sedangkan Revisi UU KUHP dan Pemasyarakatan bakal langsung dibahas tanpa surat presiden.

AZIS Syamsuddin langsung tancap gas begitu dipersilakan memimpin rapat Badan Musyawarah yang dibuka Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani dari balik layar monitor pada Rabu, 1 April lalu. Wakil Ketua DPR itu meminta para pemimpin fraksi menyampaikan sikap tentang pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Azis mempersilakan pemimpin fraksi memilih pembahasan dilakukan di panitia khusus atau Badan Legislasi DPR.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan ditunjuk Azis sebagai yang pertama menyampaikan sikap. Setelah oleh PPP, penyampaian sikap oleh fraksi dilakukan secara bergilir sesuai dengan perolehan kursi DPR, dari yang paling kecil hingga yang paling banyak, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. “Agar terjadi kesepakatan bersama untuk pembahasan,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menceritakan isi pertemuan, Kamis, 9 April lalu.

Rapat itu merupakan pertemuan perdana pimpinan DPR membahas *omnibus law* Cipta Kerja. Diserahkan pemerintah pada 12 Februari lalu, rancangan undang-undang itu tak kunjung dibahas karena Puan Maharani enggan menggelar rapat pimpinan. Puan meminta pemerintah dan DPR mengkaji dan mensosialisasi lebih dulu rancangan *omnibus law* agar tak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Presiden Joko Widodo menargetkan rancangan itu bisa disahkan dalam waktu seratus hari.

Tiga peserta rapat bercerita, pengambilan keputusan sempat ditunda karena tak tercapai kesepakatan di antara fraksi. Fraksi PDIP, Demokrat, dan Partai Amanat Nasional ingin pembahasan digelar di panitia khusus. Alasannya, materi dalam *omnibus law* Cipta Kerja perlu dikaji lintas komisi karena menyangkut berbagai persoalan. Misalnya perizinan tanah, syarat investasi, dan ketenagakerjaan. Rancangan aturan tersebut juga bakal mempengaruhi 74 undang-undang yang ada. Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto mengatakan partainya ingin pembahasan dilakukan secara teliti. “Tidak kebut-kebutan,” ujarnya.

Adapun Fraksi Golkar, Gerindra, dan NasDem ingin pembahasan dilakukan di Badan Legislasi. Sisanya, fraksi PPP, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera, berada di tengah. Anggota Fraksi Gerindra, Supratman Andi Agtas, yang hadir dalam rapat, mengatakan pembahasan di Badan Legislasi DPR lebih cepat ketimbang di panitia khusus. “Badan Legislasi juga ada perwakilan dari lintas komisi,” ujar Supratman, yang juga Ketua Badan Legislasi, Rabu, 8 April lalu.

Tiga politikus yang mengetahui proses lobi mengatakan partai banteng akhirnya melunak dan menerima pembahasan di Badan

Legislati. Partai yang awalnya tidak memberikan sikap akhirnya juga menyetujui opsi tersebut. Sekretaris Fraksi PPP Achmad Baidowi menyebutkan partainya memilih pembahasan di Badan Legislasi karena ingin pengkajian berjalan lebih tertib. Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengatakan *omnibus law* Cipta Kerja akan dibahas bersama pemerintah pada Selasa, 14 April mendatang.

Wakil Ketua Fraksi Demokrat Benny Harman menuduh koleganya di DPR memanfaatkan wabah virus *corona* untuk mempercepat pengesahan *omnibus law*. Menurut dia, kondisi ini mirip dengan pembahasan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Badan Legislasi pada September 2019. Saat itu, revisi hanya memakan waktu 15 hari dan langsung disahkan. Sebelumnya, revisi Undang-Undang KPK selalu terpental saat dibicarakan di Komisi Hukum DPR ataupun dalam panitia khusus.

Benny pun khawatir pembahasan rancangan tersebut bakal tertutup dan membuka peluang masuknya pasal selundupan. Tertutupnya pembahasan sudah dirasakan Benny. Menurut dia, saat rapat perdana Badan Legislasi membicarakan jadwal pembahasan pada Selasa, 7 April lalu, Benny yang ikut dalam persamuan itu tiba-tiba ditendang dari rapat virtual. "Setelah itu, saya tidak bisa masuk lagi, dan tahu-tahu sudah ada keputusan," ujar Benny. Keputusan rapat itu di antaranya meminta setiap fraksi segera mengirimkan daftar inventarisasi masalah *omnibus law*.

Supratman Andi Agtas menampik tuduhan bahwa pembahasan di Badan Legislasi yang dipimpinnya mudah diatur dan memungkinkan masuknya pasal selundupan. Menurut dia, pembahasan RUU Cipta Kerja akan dilakukan secara terbuka. Badan Legislasi bakal memulai pembahasan dari kluster yang minim penolakan. Misalnya ketentuan tentang kawasan ekonomi khusus serta usaha mikro dan kecil-menengah. Sedangkan pengkajian mengenai ketenagakerjaan bakal dilakukan terakhir. Badan Legislasi pun akan mengundang semua lapisan masyarakat, terutama kalangan buruh yang menolak RUU Cipta Kerja.

Rencana DPR tersebut menuai kecaman dari banyak pihak. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal mengatakan ajakan DPR membahas *omnibus law* itu hanya sekadar pemanis. Apa pun masukan kalangan buruh, kata Said, bakal dijadikan stempel persetujuan oleh DPR. Said memastikan federasinya tak akan menghadiri rapat pembahasan tersebut.

Peneliti Yayasan Auriga Nusantara, Iqbal Damanik, dan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Asfinawati menilai DPR memanfaatkan wabah *corona* untuk menghindari tekanan publik.

“Tidak mungkin masyarakat sipil dan buruh berdemonstrasi besar-besaran saat ada bencana kesehatan,” ujar Iqbal. Asfinawati meyakini pembahasan tak akan menghasilkan undang-undang berkualitas. “Pembahasan itu menunjukkan DPR tak bermoral.”



Aksi menolak omnibus law RUU Cipta Kerja di depan Gedung DPR RI, Jakarta, 9 Maret 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

DPR juga akan menyelesaikan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan. Dua rancangan itu sebenarnya sudah selesai dibahas DPR periode 2014-2019. Namun pengesahan tak terjadi karena ribuan orang turun ke jalan menolak aturan tersebut.

Dua rancangan itu menuai kecaman masyarakat karena mengandung sejumlah pasal bermasalah. Misalnya, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih memuat pasal penghinaan kepada kepala negara serta memasukkan korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan terorisme sebagai pidana umum. Sedangkan Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan memudahkan pembebasan bersyarat bagi narapidana khusus, termasuk koruptor.

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengatakan, dalam aturan pengambilalihan atau *carryover*, setiap aturan yang selesai dibahas tak perlu dikaji lagi. Drafnya pun bisa dibahas tanpa surat presiden yang baru. Azis mengaku sudah berkoordinasi dengan Presiden Joko Widodo soal mekanisme itu.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly membenarkan info bahwa Azis telah bertemu dengan bosnya. Namun, menurut politikus PDIP ini, tetap diperlukan surat presiden untuk membahas dua rancangan tersebut. “Dari pada melanggar prosedur formal dan jadi masalah, lebih bagus menunggu,” ujar Yasonna.



Maut Di Ulang Tahun Perkawinan

majalah.tempo.co

6 mins read

i



Suasana pemakaman Wakil Jaksa Agung Arminsyah di Tempat Pemakaman Umum Pedongkelan, Jakarta, 5 April 2020./ANTARA/Rivan Awal Lingga

- Wakil Jaksa Agung Arminsyah menggandrungi dunia otomotif sejak dulu.
- Ia memiliki mobil lawas yang disulap jadi mobil balap.
- Saat kecelakaan, ia mengendarai mobil Nissan Skyline GT-R milik seorang pengusaha.

PERCAKAPAN terakhir itu berlangsung pada Sabtu siang, 4 April lalu. Wakil Jaksa Agung Arminsyah meminta Ketua Mercedes One Make Race Iswahyudi bertandang ke rumahnya di kompleks Tanjung Mas Raya, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Tiba di perumahan itu sekitar pukul 14.00, Iswahyudi tak buru-buru ke rumah Armen—panggilan akrab Iswahyudi kepada Arminsyah. Ia malah menuju rumah koleganya, Tomi Hadi, yang berada di kompleks yang sama dengan Arminsyah untuk kongko sebentar. Di sana, ia malah diberi tahu Rico, menantu Tomi, bahwa Armen dan Tomi sedang menjajal mobil di jalan.

Mereka punya rencana besar pada hari itu. Ketiganya adalah pencinta otomotif dan kolektor beragam mobil. Siang itu, Iswahyudi berencana membicarakan rencana Arminsyah yang ingin menghidupkan lagi mobil Mercedes-Benz S-Class buatan 1964. Mobil lawas ini dikenal dengan sebutan Mercy Batman.

Namun rencana itu ambyar. Sekitar setengah jam setelah tiba di rumah Tomi, ia menerima kabar buruk. “Ada teman mengabarkan Bang Armen kecelakaan di ruas tol Jagorawi,” kata Yudi—panggilan akrab Iswahyudi.

Iswahyudi bergegas memacu mobilnya ke lokasi kecelakaan. Ia mengajak Rico dan dua orang lain. Salah satunya ajudan Arminsyah. Mereka menggunakan dua mobil. Setengah jam kemudian, Yudi dan mobil lain tiba di lokasi.

Mobil Nissan Skyline GT-R V6 AT berkelir putih yang dikendarai Arminsyah menabrak pembatas jalan tol Jagorawi Kilometer 13 arah Jakarta. Mobil seharga setidaknya Rp 1,6 miliar itu terbakar hebat. Yudi melihat bodi mobil itu mulai menghitam karena hangus terbakar.

Mereka sempat berusaha memadamkan api yang berkobar dari dalam mobil. Bersama petugas Jasa Marga dan polisi, Iswahyudi sampai menyetop mobil tangki air yang tengah melintas. Tapi usaha menolong Arminsyah itu tak berhasil.

Arminsyah meninggal di lokasi kejadian. Menurut salah seorang saksi, tubuh Arminsyah terjepit di dalam mobil yang terbakar. Pria 59 tahun itu tak sendirian di belakang dasbor. Seorang penumpang pria bernama Edward menemaninya menyetir.

Edward selamat, tapi terluka cukup parah. Petugas membawa Edward ke Rumah Sakit Harapan Bunda, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Kepada *Tempo*, pihak rumah sakit enggan membuka identitas dan kondisi Edward dengan alasan menjaga kerahasiaan pasien. Adapun petugas membawa jenazah Arminsyah ke Rumah Sakit Bhayangkara Raden Said Sukanto alias RS Polri di Kramat Jati, Jakarta Timur.

Seusai kecelakaan itu, rencana Arminsyah merombak mobil Mercedes lawas dan merayakan pensiunnya pada Mei mendatang menjadi buyar.

• • •

JELAGA menempel di pembatas jalan tol Jagorawi Kilometer 13 arah Jakarta, Selasa, 7 April lalu. Di bawahnya, bekas lelehan aspal masih terlihat jelas. Polisi menyemprotkan cat putih di atas aspal itu. Ini penanda yang dibuat polisi saat menyelidiki kecelakaan Arminsyah.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya Komisaris Besar Yusri Yunus mengatakan peristiwa tersebut merupakan kecelakaan tunggal. Mobil yang dikendarai Arminsyah menabrak pembatas jalan sekitar pukul 14.30 pada Sabtu, 4 April 2020.

Kecepatan maksimal kendaraan di jalan tol Jagorawi adalah 100 kilometer per jam. Polisi menduga Arminsyah memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi saat berada di jalan tol Jagorawi. "Korban dipastikan meninggal di tempat," ujar Yusri.

Hari malang itu sebenarnya dimulai dengan momen yang indah bagi Arminsyah. Pagi sebelum kecelakaan, dia merayakan hari ulang tahun pernikahan bersama istrinya, Wilza Yulita. Perayaan itu berlangsung sederhana.

Keduanya merayakan hari jadi pernikahan tersebut di rumah mereka di Tanjung Mas Raya. Mereka menghidangkan nasi tumpeng dan kudapan kue cokelat. Selembar foto yang menggambarkan momen ketika Arminsyah menuapkan nasi kuning kepada Wilza beredar di antara teman-teman Arminsyah.

Menjelang siang, Arminsyah mendatangi rumah tetangganya, Tomi Hadi, seorang pengusaha. Rumah Tomi menjadi markas bagi anggota komunitas otomotif Gazpoll Racing Team. Arminsyah adalah pembina komunitas itu.

Rumah Tomi cukup luas. Ada belasan mobil dan sepeda motor terparkir di sana. Menurut Iswahyudi berdasarkan cerita dari orang di rumah Tomi, Arminsyah dan Tomi membicarakan soal mobil sebelum keluar untuk menjajal Nissan GT-R. Setiap kali bertemu, kata Iswahyudi, topik otomotif selalu mengapung di antara anggota komunitas.

Saat berada di sana, Arminsyah mengirimkan video kepada Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Achsanul Qosasi lewat aplikasi pesan WhatsApp. Arminsyah mengirimkan video berdurasi 26 detik itu pukul 13.53 WIB.

Video itu menunjukkan koleksi mobil Volkswagen Beetle dan Combi aneka warna. Ada juga sejumlah sepeda motor Vespa. “Mendapat kiriman video itu, saya hanya membalas dengan ikon jempol,” ucap Achsanul kepada *Tempo*. Itu momen terakhir yang divideokan Arminsyah.

Achsanul mengatakan Arminsyah memang mengandungi mobil. Arminsyah, kata dia, mengoleksi mobil VW dan sejumlah mobil klasik. Ia mendapatkan cerita itu dari Arminsyah ketika sang jaksa mengunjungi kantornya sekitar sebulan lalu. “Kebetulan saya juga hobi mengoleksi miniatur mobil VW Beetle,” ujarnya.



Wakil Jaksa Agung Arminsyah saat jadi pembalap./dok. Gazpoll Racing Team

Piping, manajer Gazpoll Racing Team, membenarkan bahwa video itu diambil pada hari kecelakaan Arminsyah. Ia mengatakan mobil-mobil yang terlihat di video merupakan koleksi beberapa anggota komunitas Gazpoll, bukan milik Arminsyah seorang.

Mereka menitipkan mobilnya di rumah Tomi Hadi, pendiri komunitas tersebut. Piping ikut menitipkan mobilnya di sana. “Mobil berwarna kuning di video itu punya saya,” katanya.

Menurut Piping, Gazpoll memiliki garasi dan pul mobil di Jalan Tamara, Tanjung Mas Raya. Lokasi garasi dan pul berbeda tempat. Garasi hanya untuk menyimpan mobil lawas koleksi para anggota. Sementara itu, pul menjadi tempat penyimpanan mobil-mobil balap atau off-road, yang juga punya anggota. “Lumayan, bisa *nitip* mobil gratis,” ujarnya.

Selain mengoleksi mobil jenis VW, Arminsyah mengoleksi berbagai tipe mobil Mercedes. Di antaranya, Mercedes Ponton buatan 1958, Mercy “Barong” 116, Mercy “Kebo” 108, dan Mercy “Tiger”. Ini jenis Mercy yang mulai jarang terlihat di jalan raya. Di pasar, “bangkai” mobil-mobil tersebut masih berharga di atas Rp 200 juta.

Mobil-mobil tersebut tak tercantum dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara milik Arminsyah. Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, Arminsyah mengirimkan dua laporan kekayaan. Pertama ketika ia menjabat Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus pada 2010. Saat itu, jumlah hartanya mencapai Rp 3 miliar.

Ia membuat laporan kedua ketika menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada 2014. Hartanya berjumlah Rp 4 miliar. Dalam laporan itu, Arminsyah melaporkan mobil Toyota Innova, Altis, Corolla, Land Cruiser, dan Jeep buatan tahun 1986. "Maaf, saya tidak tahu soal koleksi mobil-mobil beliau," tutur Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiyono.

• • •

KARANGAN bunga berisi ucapan duka memenuhi jalan menuju rumah Arminsyah di Tanjung Mas Raya pada Ahad, 5 April lalu. Pelayat tampak berkumpul di rumah Arminsyah. Sebagian dari mereka adalah anggota komunitas Gazpoll Racing Team.

Gazpoll merupakan wadah bagi para penggemar mobil. Sejak dirintis pada 2008, Gazpoll memayungi tiga komunitas otomotif, yaitu Old School, Mercedes One Make Race (MOMR), dan Japanese Super Touring (JST).

Old School beranggotakan para penggemar mobil balap retro. MOMR berisi para kolektor mobil Mercedes. Adapun JST merupakan komunitas penghobi mobil pabrikan Jepang masa kini.

Arminsyah juga menyukai balap mobil. Ia pernah menyulap Toyota Corolla DX 1982 menjadi mobil balap. Mobil ini sempat menjajal sejumlah kompetisi balapan.

Menurut General Manager Sirkuit Sentul Lola Moenek, Arminsyah mengurangi hobinya sejak 2013. Sebelumnya, ia sering menggunakan Sirkuit Sentul di Bogor, Jawa Barat, untuk menguji kecepatan mobilnya. "Belakangan, ia hanya sesekali turun ke sirkuit," katanya.

Ketua Mercedes One Make Race Iswahyudi mengatakan Arminsyah membantu Tomi Hadi mendirikan Gazpoll Racing Team. Keduanya sudah lama berteman. Mereka kerap saling meminjam mobil koleksi masing-masing.

GUNDAM JALANAN

SABTU, 4 APRIL 2020
PAGI

▼ Arminsyah merayakan ulang tahun pernikahan bersama istrinya, Wilza Yulita, di kediamannya di Tanjung Mas



WAKIL Jaksa Agung Arminsyah dikenal memiliki hobi otomotif. Ia bergabung dengan komunitas balap Gazpoll Racing Team and Garage pada 2010. Dia juga menjadi pembina di dua ajang balap nasional, yaitu Mercedes-Benz One Make Race Championship dan Japanese Super Touring Car Championship. Paoi

Raya Estate, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

SIANG

- ▼ Arminsyah mengendarai Nissan GT-R berkelir putih bersama Ketua Umum Gazpoll Racing Team and Garage Tomi Hadi, yang mengikuti dari belakang. Tomi diduga menggunakan kendaraannya sendiri, Mercedes-Benz.
- ▼ Dari arah Pasar Minggu, Arminsyah ditengarai masuk ke jalan tol Jagorawi arah Sentul.
- ▼ Arminsyah keluar di Pintu Tol Cibinong, lalu masuk ke jalan tol Jagorawi lagi menuju Jakarta. Ia diduga akan mampir ke Rumah Sakit Adhyaksa, Jalan Ceger, Jagakarsa.
- ▼ Di Kilometer 13, Nissan GT-R putih yang dikemudikan Arminsyah dan satu orang lain yang belum diketahui identitasnya menabrak pembatas tengah jalan, lalu terbakar.
- ▼ Penumpang anonim tersebut kemudian ditolong pengendara lain dan petugas jalan tol, lalu dibawa ke Rumah Sakit Bina Husada, Cibinong.
- ▼ Arminsyah tewas di tempat.

NASKAH: LINDA TRIANITA
SUMBER: DOKUMEN, RISET

NISSAN GT-R V6 AT
Nomor polisi: B-9-PAF
Tahun pembuatan: 2011
Warna: Putih

Nomor rangka: JN1GANR35U0130986
Nomor mesin: VR38020285A
Nama pemilik: DRT (kolektor mobil dan pengusaha tambang)
Kecepatan: Maksimum hingga 315 kilometer per jam, dengan akselerasi dari 0 hingga 97 kilometer per jam dalam 3,2 detik
Harga: **US\$ 112.235**
sekitar Rp 1,8 miliar dengan kurs Rp 16.385 per dolar Amerika Serikat

ISTIMEWA (KECELAKAAN), HTTP://SF.CO.UA (NISSAN)

Mobil Nissan GT-R V6 AT yang dikendarai oleh Wakil Jaks Agung Arminsyah yang mengalami kecelakaan di Jalan Tol Jagorawi, 4 April 2020.

Gundam Jalanan/Tempo

Menurut Iswahyudi, Arminsyah meminjam mobil Nissan Skyline GT-R V6 AT milik Tomi pada hari naas itu. Ia mendatangi rumah Tomi menjelang siang, setelah merayakan hari pernikahan. Kepada Tomi, Arminsyah mengatakan ingin menjajal kecepatan mobil itu di jalan tol. Nissan GT-R dikenal memiliki dapur pacu yang mumpuni untuk dikebut. "Beliau mengajak Edward dan Sapta, yang kebetulan berada di rumah Tomi," ucap Iswahyudi, yang mengaku tak mengenal Edward dan Sapta.

Arminsyah mengendarai Nissan bersama Edward. Tomi bersama Sapta mengendarai mobil Mercy. Menurut Yudi, mobil tersebut masuk melalui gerbang tol Lenteng Agung 1, lalu berpindah jalur menuju jalan tol Jagorawi. Kedua mobil itu keluar di gerbang tol Cimanggis, lalu masuk lagi ke jalan tol Jagorawi menuju Jakarta. "Setelah itu, terjadilah kecelakaan tersebut," ujarnya.

Iswahyudi mengatakan Tomi membeli mobil Nissan Skyline GT-R itu dari seorang pengusaha bernama Fery. Ia tak mengetahui siapa pemilik mobil itu sebelumnya.

Dari dokumen yang diperoleh *Tempo*, pelat nomor mobil Nissan Skyline itu tercatat atas nama Depaf Reguna Tarigan. Ia anak seorang

pengusaha tambang. *Tempo* menyambangi kediaman Depaf di Jalan Taman Wijaya Kusuma, Cilandak, Jakarta Selatan.

Depaf enggan menerima *Tempo* dan menolak diwawancara. “Bapak tidak tahu-menahu soal itu,” kata salah seorang anggota satuan pengamanan.

RIKY FERDIANTO, LINDA TRIANITA





Langkah Uda Di Korps Adhyaksa

majalah.tempo.co

2 mins read

i



Arminsyah melakukan kunjungan dinas di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Juli 2016./TEMPO/Eko Siswono Toyudho

- Sebelum meninggal, Wakil Jaksa Agung Arminsyah sempat berpamitan kepada koleganya.
- Di Kejaksaan Agung, karier Arminsyah terus melejit.
- Sejumlah kasus besar yang ditanganinya berhenti di tengah jalan.

MENJELANG hari terakhirnya di Kejaksaan Agung, Arminsyah memanggil satu per satu koleganya. Asisten Umum Jaksa Agung Reda Mantovani bercerita, pada Selasa, 24 Maret lalu, dalam acara minum teh, Wakil Jaksa Agung itu

menyampaikan beberapa pekerjaan yang telah dan belum dirampungkannya. "Pak Arminsyah meminta kami memonitor proses penyelesaiannya," kata Reda, Kamis, 9 April lalu.

Menurut Reda, pria 59 tahun yang akrab dipanggil "uda"—sebutan untuk paman di Sumatera Barat—itu sempat berpamitan tak akan ke kantor lagi mulai bulan April. Sebab, dia akan memanfaatkan cuti besar sebelum pensiun pada 3 Mei mendatang. Ternyata acara minum teh sore itu menjadi perjumpaan terakhir Reda dengan Arminsyah. Pada Sabtu, 4 April lalu, Arminsyah meninggal di kilometer 13 jalan tol Jakarta-Bogor-Ciawi setelah mobil Nissan GT-R yang dikendarainya menabrak pembatas jalan dan terbakar.

Reda pernah menjadi anggota tim penyidik saat Arminsyah menjabat Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada 2009. "Beliau selalu memonitor penanganan perkara agar cepat dan tepat sasaran." Arminsyah mengusut dugaan korupsi di Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Thailand dan kasus korupsi dana PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Asabri, yang menyeret pengusaha properti papan atas PT Permata Birama Sakti, Tan Kian. Belakangan, Kejaksaan Agung mencabut status tersangka Tan Kian.

Bertugas di Gedung Bundar—sebutan untuk kantor Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus—selama 20 bulan, Arminsyah lantas didapuk sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung pada Oktober 2010. Setelah sepuluh sebulan, ia ditarik ke markas pusat korps adhyaksa sebagai Inspektur Pengawasan pada Jaksa Agung Muda Pengawasan. Akhir Agustus 2012, dia dilantik sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Di Surabaya, Arminsyah membantu Kepolisian Daerah dan Kejaksaan Tinggi Papua mengusut kasus penimbunan bahan bakar minyak, pembalakan liar, dan pencucian uang oleh Ajun Inspektur Satu Labora Sitorus. Anggota Kepolisian Resor Raja Ampat itu tercatat memiliki rekening senilai Rp 1,5 triliun. Kasus itu memanas karena kayu merbau milik Labora dilelang cuma Rp 3 juta per meter kubik, jauh di bawah harga pasar Rp 12-18 juta per meter kubik. Pengacara Labora, Erlina Tambunan, saat itu mengecam lelang tersebut karena berkas kliennya belum berstatus P21 atau lengkap. "Itu perampokan," ujar Erlina pada 13 September 2013.

Meski demikian, karier Arminsyah tetap moncer. Pada Juni 2014, ia dipromosikan menjadi Jaksa Agung Muda Intelijen. Jaksa Agung Muhammad Prasetyo kemudian mengangkat Arminsyah sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Politikus Partai NasDem itu menyebut Arminsyah sebagai orang baik dan sahabat yang setia.

Menjadi penguasa Gedung Bundar, Arminsyah menangani kasus “papa minta saham” yang menyeret pengusaha minyak Riza Chalid dan bekas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Setya Novanto. Namun kasus itu pun tak jelas ujungnya.

Karier Arminsyah kembali naik setelah Prasetyo mengangkat dia sebagai Wakil Jaksa Agung pada 15 November 2017. Setelah masa jabatan Prasetyo berakhir pada 20 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo menunjuk Arminsyah menjadi pelaksana tugas Jaksa Agung. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Mukri mengatakan masa jabatan Arminsyah berlaku tiga bulan hingga Presiden menunjuk pejabat definitif. Tapi jabatan itu nyatanya hanya dipegang selama tiga hari. Jokowi menunjuk Sanitiar Burhanuddin sebagai Jaksa Agung.

Beberapa pekan sebelum Prasetyo lengser, sejumlah pejabat di Istana dan petinggi partai politik pendukung Jokowi mengatakan kans Arminsyah menjadi Jaksa Agung cukup besar. Kepada *Tempo* pada 7 September 2019, Arminsyah enggan berkomentar soal kabar tersebut. “Saya hanya berdoa supaya Bapak Presiden memberikan kesempatan kepada jaksa untuk memimpin institusi kejaksaan,” katanya.

LINDA TRIANITA



Kisah Pilu di Malam Sabtu

majalah.tempo.co

4 mins read

8

i



Polres Jakarta Utara menangkap pelaku penganiayaan waria Mira. (Foto: Istimewa)

- Para pelaku diduga preman di pangkalan parkir truk kontainer di Jalan Raya Cilincing, Jakarta Utara.
- Korban dan pelaku saling mengenal.
- Komunitas transpuan merupakan kelompok paling rentan mengalami persekusi masyarakat.

SETELAH berjalan terseok-seok sejauh 200 meter, Mira berhenti di depan pos rukun warga yang kosong di kawasan Kalibaru, Jakarta Utara, pada Jumat malam, 3 April lalu. Ia mengerang. Tubuhnya dipenuhi luka bakar yang masih basah.

Jalanan lengang malam itu. Tapi seorang penduduk yang lewat melihat Mira terkulai di dinding pos. Ia langsung mencari pertolongan dari warga sekitar.

Dengan suara merintih, Mira meminta air minum kepada warga yang mengerumuninya. Salah seorang kemudian menyorongkan air mineral. Seorang lainnya mengabarkan peristiwa itu kepada teman satu rumah kontrakan Mira di kawasan Kalibaru, yang jaraknya beberapa kilometer dari pos RW. "Kebetulan ada yang mengenal Mira," kata Yuni, sahabat Mira, kepada *Tempo*, Rabu, 8 April lalu. Yuni menerima kabar itu lewat telepon seluler. "Dia teman satu daerah dengan saya di Makassar."

Penduduk membawa Mira ke Rumah Sakit Umum Daerah Koja, Jakarta Utara. Ia langsung dirawat intensif di instalasi gawat darurat. Tapi nyawanya tetap tak tertolong. Transpuan—wadam yang mengidentifikasi diri sebagai perempuan—berusia 49 tahun itu mengembuskan napas terakhir pada Ahad siang, 5 April.

Luka bakar di tubuhnya mencapai 70 persen. Pada bagian lain badannya yang tak terbakar, terdapat lebam-lebam, tanda bahwa ia juga sempat dihajar.

Sebelum meninggal, Mira sempat menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Yuni hingga ia tergeletak di samping pos RW. "Ia dianiaya di pangkalan parkir truk kontainer di Jalan Raya Cilincing," ujar Yuni. Lokasi pangkalan tersebut sekitar 200 meter dari pos RW tempat Mira ditemukan penduduk.

"Berkal informasi yang ada, tim reserse langsung mengejar pelaku."

Warga Kalibaru melaporkan kejadian itu ke Kepolisian Sektor Cilincing saat Mira masih terbaring di rumah sakit. Polisi kemudian memeriksa para saksi. "Berkal informasi yang ada, tim reserse langsung mengejar pelaku," kata Kepala Kepolisian Resor Jakarta Utara Komisaris Besar Budhi Herdi Susianto, Kamis, 9 April lalu.

Polisi menangkap tiga pria yang diduga menganiaya transpuan bernama asli Amir itu pada Sabtu malam, 4 April. Mereka berinisial AP, 27 tahun; RT (24); dan AH (26). Masing-masing ditangkap di kawasan Bojong, Bekasi, Jawa Barat; serta Marunda dan Kalibaru, Jakarta Utara. Penyidik menetapkan ketiganya sebagai tersangka penganiaya Mira.

Tim reserse juga memburu tiga pria berinisial PD, AB, dan IQ, yang diduga ikut mengeroyok Mira. Ketiganya pun ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menjerat keenam pria itu dengan Pasal 170 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara. “Otak penganiayaan masih diselidiki penyidik,” ujar Budhi.

Peristiwa naas itu bermula dari pertemuan Mira dengan sopir berinisial KM di pangkalan truk kontainer Jalan Raya Cilincing pada Kamis malam, 2 April lalu. KM merasa kehilangan dompet dan telepon seluler setelah bertemu dengan Mira. Kepada KM yang menuduhnya, Mira mengaku tak mengetahui keberadaan kedua barang itu.

Menjelang Jumat dinihari, Mira pulang ke kamar kontrakannya di kawasan Kalibaru. Menurut Yuni, Mira tak menganggap serius tuduhan KM. Mira pun merasa tak bersalah karena tak pernah mencuri selama berada di pangkalan tersebut. “Mira memang biasa mencari duit di sekitar situ,” kata Yuni, enggan merinci pekerjaan Mira.

KM mengadukan kehilangan barang-barangnya kepada para penjaga keamanan di sana. Pada Jumat malam, KM bersama enam pria mendatangi kontrakan Mira. Mereka menggeledah kontrakan dan menginterogasi Mira, tapi tak menemukan dompet dan ponsel milik KM di sana. Mira pun berkeras tak mencuri seperti tuduhan KM.

***“Mereka preman-preman yang biasa
minta rokok kepada Mira.”***

Mereka lalu mengajak Mira ke pangkalan truk. Menurut Yuni, Mira menerima ajakan tersebut karena merasa tak bersalah. Apalagi ia mengenal para pria itu. Mereka sehari-hari menjaga keamanan di sana. “Mereka preman-preman yang biasa minta rokok kepada Mira,” ujar Yuni.

Di pangkalan truk, mereka kembali mencar Mira. Berkukuh tak mencuri, Mira kian menjadi bulan-bulanan. KM dan kawan-kawannya

mulai main tangan. “Keenam tersangka diduga ikut memukuli korban,” kata Kapolres Budhi Herdi Susianto.



Kapolres Budhi Herdi Susianto (Dok. Polda Metro Jaya)

Saat Mira diberondong dengan tuduhan, tersangka berinisial AP menuju warung untuk membeli bensin eceran. Ia menyiramkan bensin itu ke tubuh Mira. Salah seorang tersangka yang masih buron, PD, mengeluarkan ancaman dengan memain-mainkan korek api di dekat tubuh Mira. Rupanya, api di korek itu menyala, lalu menyambar baju Mira yang berlumur bensin.

Seketika Mira berteriak meminta tolong. Para tersangka mencoba memadamkan api yang berkobar di tubuh Mira. Setelah api padam, KM dan kawan-kawannya meninggalkan pangkalan.

Mira yang terkapar kemudian bangkit. Tertatih-tatih ia berjalan menuju perkampungan hingga kemudian terkulai di pos RW. “Ia sempat pingsan saat warga setempat membawanya ke rumah sakit,” ujar Kanzha Vinaa, salah seorang anggota Tim Advokasi Kasus Mira.

Kanzha mendesak polisi segera menangkap tersangka lain. Tim advokasi menganggap Mira merupakan salah satu korban persekusi paling sadis di Tanah Air. Selama 12 tahun terakhir, kata dia,

sebanyak 88 persen korban kekerasan terhadap komunitas lesbian, gay, biseksual, dan transgender adalah kelompok transpuan. “Kematian Mira membuat kami syok,” tuturnya.

Sahabat Mira, Yuni, juga meminta polisi menetapkan tersangka baru. Salah satunya teman mejeng Mira berinisial ON, sesama transpuan. “Dia juga beraktivitas di pangkalan parkir truk di sana,” ucapnya.

Yuni mengatakan sempat bertemu dengan ON yang kemudian menceritakan penganiayaan dan pembakaran terhadap Mira. Pada Jumat malam itu, ON menyusul Mira ke pangkalan truk. Alih-alih membantu, kata Yuni, ON justru ikut menuduh Mira dan memintanya mengakui tudungan.

Kepada ON, Mira juga membantah mencuri dompet dan telepon seluler KM. “Demi Tuhan, Mak, aku enggak *ngambil*,” ujar Yuni menirukan kalimat Mira kepada ON. Yuni mengatakan ia mendapatkan kesaksian ini dari warga sekitar pangkalan. ON juga berada di lokasi kejadian saat Mira dilalap api.

Komisaris Besar Budhi Herdi Susianto mengatakan polisi juga mendapatkan informasi tersebut. Penyidik, kata dia, masih menetapkan ON sebagai saksi. Mereka juga mencatat KM sebagai saksi yang kehilangan harta benda. KM mengaku hanya berperan menceritakan kehilangan itu kepada para penjaga keamanan di pangkalan. Ia membantah ikut menganiaya Mira.

Budhi juga mengatakan Mira dan para tersangka saling mengenal bahkan sering berkumpul. Kepada penyidik, ketiga tersangka mengaku kesal terhadap perilaku Mira. Mereka kerap menerima pengaduan sopir di pangkalan. “Menurut mereka, setelah bertemu dengan Mira kok sering ada barang yang hilang,” ucapnya.

Yuni meyakini Mira bukan pengutil. Ia belum pernah mendengar Mira berbuat tindakan kriminal meski hidup miskin di Jakarta. Mira memang tinggal sebatang kara. Untuk biaya perawatan di rumah sakit dan pemakaman Mira, Yuni bersama warga Kalibaru mengumpulkan donasi lewat media sosial. “Dia serba kekurangan. KTP saja tak punya,” ujarnya.

MUSTAFA SILALAHI



Ada Udang di Balik Bantuan

majalah.tempo.co

6 mins read



i



Petugas medis mengatur kotak bantuan Pemerintah Cina kepada Pemerintah Italia dalam usaha memerangi penyebaran Covid 19, di Hangzhou, Zhejiang, Cina 10 Maret 2020./Reuters/China Daily CDIC

- Amerika Serikat kerepotan mengurusai wabah di dalam negeri sehingga menarik bantuan luar negerinya.
- Rusia dan Cina bersemangat mengirimkan bantuan medis ke berbagai negara.
- Bantuan Rusia dan Cina diduga bermuatan politik untuk memperluas pengaruh mereka di dunia.

INSIDEN itu terjadi pada pertengahan Maret lalu. Seorang pejabat pemerintah Amerika Serikat sibuk mencari alat pelindung diri yang mulai langka untuk para dokter dan perawat di sana. Saat itu, jumlah orang di Amerika yang terjangkit Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) sudah menembus 50 ribu dan terus bertambah sekitar seribu kasus setiap hari dengan angka kematian melampaui seribu orang.

Sang pejabat mencoba meminta bantuan kepada Thailand. Jumlah kasus *corona* di Negeri Gajah Putih memang masih rendah, tapi terus menunjukkan tren yang meningkat. Saat menelepon pejabat Thailand, dia diberi kabar yang membuatnya bingung: sebuah kapal mengangkut alat pelindung diri dari Amerika justru sedang menuju Bangkok. Bahkan itu merupakan pengiriman kedua.

Menurut *Politico*, para pembantu Presiden Amerika Serikat Donald Trump sadar ada yang tak beres di sini. Wakil Presiden Amerika Mike Pence segera menangguhkan pengiriman tersebut sambil meminta stafnya meninjau kembali prosedur pengiriman bantuan.

Insiden ini memicu ketegangan antara pejabat Badan Amerika Serikat untuk Pembangunan Internasional (USAID), pengirim bantuan itu, dan anggota gugus tugas penanganan wabah pimpinan Pence. Washington kemudian menerapkan moratorium pengiriman semua bantuan USAID ke negara-negara yang meminta bantuan alat pelindung diri. Badan Manajemen Darurat Federal (FEMA) bahkan meminta USAID menarik cadangan alat yang tersimpan di Dubai, Uni Emirat Arab, dan Miami, Amerika, untuk digunakan di sejumlah rumah sakit Amerika.

Meski sebagian permintaan bantuan telah diproses dan barangnya sudah dikirimkan, kebijakan baru ini praktis membekukan bantuan yang telah disetujui untuk sekurang-kurangnya 13 negara, termasuk Vietnam, Bangladesh, Honduras, dan Filipina. Bahaya dari kebijakan ini, kata seorang pejabat Amerika kepada *Politico*, adalah rusaknya hubungan baik Amerika dengan para sekutunya yang mungkin akan membantu negara Abang Sam ketika pasokan dalam negerinya kritis.

Sementara Amerika menghentikan banyak bantuan, Cina dan Rusia justru agresif mengirimkan bantuannya ke sejumlah negara, termasuk Amerika. Padahal, hingga Kamis, 9 April lalu, Rusia menghadapi 18.051 kasus positif. Sedangkan Cina, negara tempat pertama Covid-19 merebak, masih punya 1.160 kasus positif, meski jauh menurun dari masa puncaknya pada 18 Februari dengan 57.805 kasus positif.





Paket bantuan Rusia untuk Serbia guna memerangi wabah Corona, di lapangan udara Moskow, Rusia, 3 April 2020./Reuters/Handout

Rusia mengirim Antonov-124, pesawat kargo terbesar di dunia, untuk mengangkut bantuan medis ke Amerika. Kementerian Pertahanan Rusia tak merinci apa saja muatan dalam pesawat yang mendarat di Bandar Udara Internasional John F. Kennedy, New York, pada Kamis, 2 April lalu, itu.

Presiden Trump memuji uluran Rusia tersebut. “Ini sikap yang sangat baik dari Presiden Putin. Saya mungkin bilang ‘tidak, terima kasih’ atau mengatakan ‘terima kasih’. Ini sebuah pesawat besar dengan pasokan medis kualitas sangat tinggi. Dan saya katakan, ‘saya terima’,” ujar Trump.

Sesungguhnya bantuan itu tak sepenuhnya gratis. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan separuh kargo itu dibayar dengan Dana Investasi Langsung Rusia, dana investasi asing milik pemerintah Rusia, dan separuhnya lagi dibayar oleh Amerika. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika menyatakan pemerintah Amerika menghargai Rusia yang menjual peralatan itu di bawah harga pasar.

Cina juga bersemangat membantu negara-negara di Eropa. Dalam beberapa pekan terakhir, negara itu menyumbangkan alat tes ke Kamboja; mengirim satu pesawat kargo berisi ventilator, masker, dan peralatan medis lain ke Italia dan Prancis; serta mengirim bantuan medis ke Iran dan Irak. Selain itu, Cina berjanji membantu Filipina, Spanyol, dan negara lain. Presiden Cina Xi Jinping mengatakan kepada Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez bahwa “matahari akan terbit setelah badai berlalu” dan menyatakan kedua negara akan meningkatkan kerja sama setelah wabah.

Para ahli mengingatkan, meskipun bantuan kemanusiaan itu memang nyata, Cina dan Rusia punya tujuan politik yang perlu diawasi. “Tak ada yang salah dengan bantuan Cina ke Eropa dan negara lain, khususnya dalam kondisi sekarang. Tapi juga jelas bahwa (Beijing)

melihat bantuannya sebagai alat propaganda,” kata Noah Barkin, peneliti tamu di German Marshall Fund, kepada *The Guardian*.

“Ketika Trump memukul Eropa dengan larangan perjalanan, Cina adalah sahabat yang murah hati dan tidak egoistik.”

Ketika menelepon Perdana Menteri Italia Giuseppe Conte, Presiden Xi menyampaikan harapannya untuk membangun “jalur sutra kesehatan” sebagai bagian dari One Belt One Road, prakarsa global Cina yang dikritik banyak negara sebagai upaya Cina meningkatkan pengaruhnya. Menurut Barkin, dengan menawarkan bantuan ke negara seperti Italia, Beijing seperti mendukung perjuangan negara-negara Eropa menghadapi pandemi sekaligus mengontraskan posisinya dengan Amerika. “Ketika Trump memukul Eropa dengan larangan perjalanan, Cina adalah sahabat yang murah hati dan tidak egoistik.”

Josep Borrell, kepala diplomat Uni Eropa, juga memperingatkan bahwa ada “unsur geopolitik, termasuk usaha untuk meluaskan pengaruh melalui ‘politik murah hati’”. “Cina secara agresif memberikan pesan bahwa, tidak seperti Amerika, dia adalah mitra yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya,” tulis Borrell di blog.

Namun politik Cina itu tersandung kualitas alat medisnya sendiri. Sejumlah negara di Eropa menolak alat-alat kesehatan bikinan Cina. Spanyol, Turki, dan Belanda menyatakan kualitas ratusan alat tes dan masker medis bantuan tersebut di bawah standar atau cacat. Turki menemukan alat tes yang dipesan dari perusahaan Cina tidak cukup akurat, meskipun mengakui 350 ribu di antaranya berfungsi dengan baik.

Akhir Maret lalu, Kementerian Kesehatan Belanda menarik 600 ribu masker, yang dikirim dari Cina sepekan sebelumnya dan siap didistribusikan kepada tim medis. Pejabat Belanda menyatakan masker itu tidak cocok dan penyaringnya tak bekerja seperti seharusnya meskipun dilabeli sertifikat mutu. “Semua pengiriman segera dihentikan. Barang-barang itu belum didistribusikan,” ujar pejabat kesehatan Belanda dalam pernyataannya. “Sekarang pemerintah memutuskan untuk tidak menggunakan satu pun masker dari kiriman tersebut.”

Pemerintah Spanyol juga menghadapi masalah terkait dengan ratusan ribu alat tes yang dipesan dari sebuah perusahaan Cina. Menteri Kesehatan Spanyol Salvador Illa menyatakan 640 ribu alat tes dari

pengiriman pertama tidak cukup akurat dalam menentukan status pasien. Spanyol telah mengembalikan 58 ribu alat tes yang belum digunakan. Para ahli di Spanyol menyatakan telah menguji 9.000 alat dengan hasil mengecewakan: hanya 30 persen alat yang mungkin bisa mendeteksi virus.

Kedutaan Besar Cina di Spanyol menyatakan perusahaan penjual alat itu, Shenzhen Bioeasy Biotechnology, tidak memiliki izin resmi dari otoritas medis Cina untuk menjual produk. Kedutaan menyebutkan kiriman terpisah sumbangan pemerintah Cina dan Alibaba tidak termasuk produk Shenzhen Bioeasy. Sebaliknya, Kementerian Kesehatan Spanyol menyatakan produk Bioeasy telah disetujui oleh badan pengendali mutu Uni Eropa, tapi “spesifikasi alat itu, berdasarkan paket yang diterima, tidak sesuai dengan sertifikasi kualitas Uni Eropa”.

Shenzhen Bioeasy menawarkan penggantian alat-alat yang gagal tersebut. Dalam pernyataannya yang dikutip *Reuters*, perusahaan menyatakan hasil tes yang keliru mungkin disebabkan oleh kesalahan dalam pengambilan sampel atau penggunaan alatnya tidak benar. Perusahaan mengaku tidak cukup berkomunikasi dengan kliennya tentang bagaimana menggunakan produk tersebut dan akan mengirimkan kembali alat itu dengan “memastikan sensitivitas dan spesifikasi yang dibutuhkan untuk membantu Spanyol melawan Covid-19”.

Bantuan Rusia juga bermasalah. Seorang pejabat pemerintah Italia menyatakan kepada surat kabar *La Stampa* bahwa 80 persen alat medis Rusia yang diterima Italia tak berguna. Kiriman Rusia itu termasuk alat disinfektan bakteri dan laboratorium lapangan untuk sterilisasi kimia-biologis, bukan ventilator dan alat pelindung diri yang justru dibutuhkan negara tersebut.

Menurut *La Stampa*, bantuan Kremlin itu tidak biasa. Kiriman itu berasal dari Kementerian Pertahanan Rusia, bukan Kementerian Kesehatan. Kebanyakan dari mereka yang mendapat kiriman adalah perwira senior di bidang biologi, kimia, dan nuklir dari bagian medis angkatan bersenjata Rusia, bukan tenaga medis pada umumnya yang memperoleh kiriman untuk bantuan kemanusiaan.

Para perwira tadi ditempatkan di Bergamo, kota yang paling parah terkena wabah *corona*. Kota itu terletak hanya dua jam perjalanan dari Vicenza, pangkalan udara militer utama Amerika Serikat. “Mereka (para perwira Rusia) kini berjalan-jalan di ‘sepanjang jalan NATO’,” begitu menurut stasiun televisi Rusia.

Italia adalah salah satu penyumbang utama pasukan di area operasi Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dan punya 166 tentara yang ditempatkan di Latvia untuk memperkuat pertahanan

NATO dalam mengimbangi Rusia. Pada saat perwira Rusia tiba di Italia, pesawat-pesawat NATO menyadap kehadiran sebuah pesawat militer Rusia di dekat kawasan udara NATO. Menurut CNN, Italia, salah satu pendiri NATO, kini justru menghadapi krisis pasca-Perang Dunia II dengan menerima bantuan dari lawan utama NATO.

Seorang pejabat tinggi intelijen Amerika menyatakan kepada *Newsweek* bahwa Cina dan Rusia sedang memanfaatkan pandemi corona untuk memposisikan diri sebagai pemimpin dunia ketika Amerika sibuk berfokus pada masalah domestiknya. Kerepotan menangani wabah di dalam negeri telah menghalangi Amerika untuk menanggapi seruan internasional agar segera memberikan bantuan. “Cina dan Rusia bermaksud mengisi kekosongan tersebut, bahkan dengan mengorbankan kesiapan mereka sendiri,” katanya.

“Kedua lawan sedang memainkan permainan jangka panjang,” ujar pejabat yang meminta tak disebut namanya itu. “Mereka akan berusaha merongrong usaha Amerika untuk mempertahankan kemitraan dan aliansi strategis dengan menyediakan peralatan medis yang dibutuhkan, alat pelindung diri, dan alat uji ke negara-negara yang sistem kesehatannya belum berkembang atau tertinggal sambil menuding bahwa Amerika tak mampu merespons karena tidak mampu dan tidak kompeten menanggulangi pandemi.”

Pejabat yang mengetahui laporan Badan Intelijen Pusat (CIA), yang membahas potensi pergeseran kekuatan global, itu juga memperingatkan gejolak yang dapat terjadi di seluruh dunia. Hal itu digabung dengan prediksi bahwa pandemi dapat berlanjut hingga lewat tahun ini—memberikan kesempatan bagi Cina dan Rusia mengangkat posisi mereka di panggung dunia.

IWAN KURNIAWAN (*POLITICO, CNN, BBC, REUTERS, GUARDIAN, LA STAMPA, NEWSWEEK*)



Kandasnya Proposal Reformasi Suu Kyi

majalah,tempo.co

4 mins read



i



Kandasnya Proposal Reformasi Suu Kyi/REUTER

- Usulan reformasi konstitusi kandas di parlemen nasional Myanmar.
- Peluang Aung San Suu Kyi menjadi presiden masih tertutup.
- Berharap ada jenderal progresif di dalam Tatmadaw.

DI akhir masa pemerintahannya, Partai Liga Nasional Demokrasi (LND) berusaha mewujudkan janji kampanyenya dalam pemilihan umum lima tahun lalu. Selain soal

pembangunan ekonomi dan perwujudan perdamaian, partai berkuasa di Myanmar itu hendak mengakhiri dominasi militer yang dilindungi konstitusi hasil referendum 2008.

Dalam konstitusi, militer Myanmar atau Tatmadaw memiliki kekuasaan sangat besar di bidang pertahanan dan keamanan serta politik. Selain memimpin semua lembaga pertahanan dan keamanan, militer mempunyai wakil di 25 persen kursi parlemen tanpa perlu ikut pemilihan umum: 56 di majelis tinggi, 110 di majelis rendah.

LND pimpin Aung San Suu Kyi mengusulkan sejumlah amendemen konstitusi. Proposal amendemen itu diputuskan melalui pemungutan suara di parlemen sejak 10 Maret hingga 19 Maret lalu. Meski menguasai 135 kursi (60,3 persen) di majelis rendah dan 255 kursi (58 persen) di majelis tinggi, tak ada proposal penting dari reformasi konstitusi itu yang lolos di parlemen.

“Semua orang tahu (hasilnya) jauh sebelum pemungutan suara di parlemen nasional ini,” kata Phil Robertson, Deputi Direktur Divisi Asia Human Rights Watch, kepada *Tempo*, Rabu, 8 April lalu. Menurut Robertson, Suu Kyi sebenarnya punya peluang menekan militer pada 2012 saat dia baru dibebaskan dari tahanan rumah dan negara Barat menanyakan apa yang bisa mereka bantu. “Dia seharusnya mengatakan kepada mereka untuk menuntut reformasi konstitusi, tapi dia tidak melakukannya.”

LND berdiri pada 27 September 1988 setelah serangkaian protes mendukung gerakan demokrasi pada 1988. Suu Kyi salah satu pendirinya. Partai ini ikut pemilihan umum 1990 dan menang, tapi junta militer menolak hasilnya. Tak lama setelah pemilihan, LND ditekan hebat. Suu Kyi sendiri menjadi tahanan rumah sejak 1989 dan baru dibebaskan pada 2010.

Myanmar di bawah junta militer menggelar amendemen konstitusi melalui referendum yang membuat posisi militer sangat kuat di bidang politik dan militer. Junta juga memasukkan pasal yang membuat lawan politik utamanya, Suu Kyi, tidak bisa menjadi presiden. Pasal 59 (f) melarang seseorang menjadi presiden jika pasangannya atau anak-anaknya adalah warga negara asing. Konstitusi baru itu disetujui melalui referendum pada 10 Mei 2008.

Saat Myanmar menggelar pemilihan umum pada 2010, LND memutuskan untuk memboikot. Junta militer menanggapinya dengan membubarkan partai ini dan menyatakannya sebagai partai ilegal. LND kembali ke panggung politik dua tahun kemudian dengan mengikuti pemilihan umum tingkat negara bagian dan memenangi 259 dari 330 kursi.

LND mengulang kemenangannya dalam pemilihan umum 2015 dengan meraih suara mayoritas di kedua kamar di parlemen nasional, yang cukup untuk memastikan kandidatnya menjadi presiden. Di majelis rendah, partai ini meraih 12,4 juta suara atau 255 kursi, jauh di atas Union Solidarity and Development Party (USDP), yang meraih 6,1 juta suara atau 30 kursi. Untuk majelis tinggi, LND meraih 135 kursi, jauh dari USDP yang 11 kursi. USDP adalah partai yang didukung militer.

Kemenangan ini tetap tak bisa membawa Suu Kyi menjadi presiden karena terganjal konstitusi, tapi ia menjadi kepala pemerintahan dengan jabatan *state counselor*. Meski memiliki suara mayoritas, LND juga tak leluasa mengamendemen konstitusi karena amendemen hanya bisa dilakukan bila disetujui lebih dari 75 persen suara parlemen. Dengan kata lain, selain mendapat dukungan semua partai, usulan LND harus didukung wakil tentara.

Suu Kyi mendapat reputasi internasional sebagai ikon pejuang hak asasi manusia dan mendapat Nobel Perdamaian 1991. Tapi pemerintahnya dikritik keras karena kasus penganiayaan terhadap etnis muslim Rohingya pada 2017. Kekerasan itu menyebabkan sekitar 1 juta muslim Rohingya hengkang dari negara tersebut. Suu Kyi dikecam keras dan bahkan beberapa lembaga mencabut penghargaan terhadapnya karena ia dinilai tak berbuat sesuatu untuk mencegah genosida tersebut.

Di ujung masa pemerintahannya tahun ini, LND mengusulkan amendemen konstitusi. Usulannya yang disampaikan sejak Februari lalu itu antara lain mengurangi kursi militer secara bertahap di parlemen. Dalam proposal LND, jumlah kursi akan dikurangi dari 25 persen menjadi 15 persen setelah pemilihan umum 2020, 10 persen setelah 2025, dan 5 persen setelah 2030.

Partai itu juga mengusulkan revisi pasal soal persetujuan terhadap amendemen konstitusi cukup dari dua pertiga anggota parlemen. LND pun mengusulkan agar kepolisian dikelola kementerian terpisah yang dipimpin sipil, penghapusan kerja paksa, dan penghapusan pasal 59 (f).

Brigadir Jenderal Maung Maung, pemimpin fraksi militer di parlemen, menilai proposal amendemen itu akan berdampak negatif terhadap transisi demokrasi, persatuan nasional, dan hubungan militer-sipil. “Meskipun (LND) sering berbicara tentang rekonsiliasi nasional, (tindakannya) berbahaya bagi proses tersebut,” ujarnya.

LND mengatakan semua usulan itu sangat bergantung pada sikap Tatmadaw. “Jika mereka tidak setuju, bagaimana kita bisa mendorongnya,” kata Tin Tun Naing, legislator dari LND.

Seperti sudah diduga, sebagian besar proposal reformasi itu kandas. Dalam sidang parlemen nasional pada 10 Maret lalu, proposal untuk mengurangi kursi militer hanya didukung 404 suara, kurang dari 62 persen anggota parlemen. Usulan untuk menghapus kata “disiplin” di depan kata “demokrasi” di konstitusi juga ditolak.

Dalam pemungutan suara keesokan harinya, parlemen juga menolak amendemen pasal 59 (f). Proposal itu hanya didukung 404 dari 633 anggota parlemen. Dengan demikian, pintu bagi Suu Kyi untuk menjadi presiden masih tetap tertutup.

Usulan untuk mencabut dominasi Departemen Pertahanan terhadap semua angkatan bersenjata dan memisahkan polisi dari militer pun tak membawa hasil. Usulan itu hanya didukung 407 suara atau sekitar 63 persen anggota parlemen. Usulan lain yang bernasib sama adalah soal diakhirnya praktik kerja paksa, penahanan lebih dari 24 jam, dan perubahan dukungan minimum untuk mengganti anggota parlemen.

Menurut *The Irrawaddy*, hanya empat amendemen—itu pun tidak ada yang melibatkan reformasi politik—yang mendapat dukungan lebih dari 75 persen anggota parlemen. Salah satu yang disetujui adalah amendemen pasal 344, yang mengatur soal bantuan dan perawatan bagi personel pertahanan yang cacat dan keluarga personel yang bertugas di bidang pertahanan yang meninggal atau menjadi korban.

Sai Tun Aye, anggota majelis rendah dari LND, mengatakan konstitusi hanya bisa diubah jika anggota parlemen dari militer bertindak untuk kepentingan negara atau ada jenderal berpikiran progresif seperti Fidel Ramos di Filipina. “Kami berharap dapat melihat seorang jenderal progresif dalam beberapa tahun mendatang,” tuturnya kepada *The Irrawaddy*.

Aung Thein, anggota parlemen dari LND, mengatakan partainya telah mengantisipasi kekalahan tersebut. Dia menegaskan bahwa mereka memiliki kewajiban untuk memenuhi janji kampanyenya kepada para pemilih. “Kami ingin orang-orang tahu bahwa kami telah mencoba,” katanya kepada *Al Jazeera*.

ABDUL MANAN (IRRAWADDY, MIZZIMA, AL JAZEERA)



Bilik Disinfektan Ramah Manusia

majalah.tempo.co

4 mins read



i



Bilik disinfektan berbasis ozon./Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi

- Peneliti LIPI mengembangkan bilik disinfektan yang menggunakan uap air berozon (ozone nanomist) sebagai pengganti bahan kimia.
- Peneliti Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengganti bahan kimia disinfektan dengan asap cair atau cuka kayu.

- Ozon dan asap cair diklaim aman terhadap tubuh manusia ketimbang bahan kimia seperti sodium hipoklorit dan hidrogen peroksida.
-

ANTO Tri Sugiarto berperan sendiri dalam klip video berisi cara kerja produk buatannya. Ia terlihat berjalan santai di dalam bilik berdinding plastik transparan. Kabut putih memenuhi kamar tak berpintu yang mirip boks telepon umum tersebut. Sekilas, tak ada perbedaan dengan bilik disinfektan yang kini marak digunakan untuk menumpas virus corona. “Bilik ini sama sekali tidak menggunakan bahan kimia. Jadi aman bagi tubuh manusia,” kata Kepala Balai Pengembangan Instrumentasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia itu.

Anto bersama peneliti Institut Teknologi Bandung mengembangkan bilik pembasmi kuman tersebut menggunakan disinfektan berupa ozon (O_3). Doktor bidang rekayasa produksi dari Gunma University, Jepang, itu mengatakan alat yang dinamai Airborne Sterilization tersebut kombinasi dari beberapa paten yang sudah ada. Ia mengembangkan alat itu sejak 2008. “Ini kelanjutan penelitian sebelumnya, cuma pemanfaatannya yang berbeda,” ujarnya melalui sambungan telepon pada Senin, 30 Maret lalu.

Anto menjelaskan, terdapat dua komponen utama Airborne Sterilization.

Pertama, *ozone nanobubble generator* yang menghasilkan uap air mengandung ozon atau *ozone nanomist*. Kedua, reaktor plasma yang mengubah oksigen menjadi ozon. “Bahan bakunya oksigen. Setelah dipakai, akan kembali menjadi oksigen,” tuturnya. “Jadi tidak perlu mengisi apa pun karena alat ini sudah mengandung disinfektan, cukup isi ulang airnya.”

Airborne Sterilization memiliki kapasitas 50 liter per jam. Anto sudah memiliki beberapa purwarupa dan siap memproduksinya untuk kebutuhan memerangi pandemi Covid-19. “Kami sedang berkoordinasi dengan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional terkait dengan jumlah yang akan diproduksi,” kata Anto, yang tidak mau merinci biaya pembuatan alat itu karena berasal dari dana penelitian. Adapun perkiraan harga alat ini Rp 5-10 juta, tergantung kapasitas.

Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, memiliki produk serupa dengan yang dikembangkan Anto. Namanya iChamber. Menurut Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat ITS Agus Muhammad Hatta, bilik disinfektan mereka menggunakan ozon sehingga lebih aman dari metode penyemprotan cairan kimia.

“Prinsip kerjanya hanya mengubah oksigen yang ada di udara menjadi ozon,” ucap Agus.

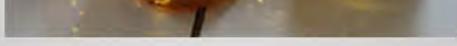
Meski pengguna harus menahan napas selama 10 detik di dalam bilik disinfektan ozon, Agus dan Anto menyatakan ozon aman bagi manusia. Menurut Anto, ozon telah banyak digunakan untuk sterilisasi bahan makanan, minuman, alat produksi, peralatan medis, air kolam renang, dan pengolahan air minum. “Bahkan ozon juga untuk terapi penyakit, termasuk SARS dan MERS,” ujar Anto sambil menunjukkan laporan studi College of Pharmacy, India, yang terbit di *Journal of Natural Science, Biology, and Medicine* pada 2011.

Pengembangan bilik disinfektan yang diklaim ramah manusia karena tak memakai bahan kimia ini menjadi jawaban atas merebaknya pemakaian bilik disinfektan yang menyemprotkan bahan kimia. Bilik disinfektan itu dipasang di perkantoran swasta ataupun pemerintah. Bahkan banyak orang menyemprotkan sendiri cairan disinfektan ke permukaan tubuh, pakaian, dan barang belanjaan. Merespons fenomena ini, Kementerian Kesehatan merilis surat edaran pada Jumat, 3 April lalu.

Surat edaran yang ditandatangani Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kirana Pritisari itu meminta jajaran dinas kesehatan di daerah tidak menganjurkan penggunaan bilik disinfektan. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan cairan disinfektan yang lazim digunakan adalah sodium hipoklorit, klorin, etanol 70 persen, benzalkonium klorida, dan hidrogen peroksida. Badan Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan penyemprotan disinfektan hanya ke benda mati, bukan ke tubuh manusia.

Ahli farmasi Zilhadia menuturkan, sodium hipoklorit menjadi senyawa disinfektan pertama yang digunakan di Amerika Serikat pada 1911 dan sampai kini paling banyak dipakai di seluruh dunia. “Namun berbagai jurnal melaporkan reaksi *toxic* dari senyawa ini di antaranya potensial menimbulkan alergi, menyebabkan kerusakan jaringan kolagen, dan mengiritasi selaput mukosa,” kata Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu.





Asap cair hasil penyulingan/Saptadi Darmawan

Penelitian ilmiah pun, Zilhadia melanjutkan, menemukan senyawa yang dihasilkan sodium hipoklorit berupa klorin dapat mengiritasi paru-paru. "Sodium hipoklorit dapat membentuk senyawa organik terklorinasi yang bersifat karsinogenik," ucapnya. Zilhadia, yang meraih gelar doktor ilmu kefarmasian di Universitas Indonesia pada 2016, menyebutkan penggunaan sodium hipoklorit yang berlebihan juga akan mengganggu ekosistem secara keseluruhan.

Tak ingin menggunakan bahan kimia, peneliti dari Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi (BLI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengembangkan cairan disinfektan berbasis asap cair alias cuka kayu dan bambu. Menurut Gustan Pari, pemimpin penelitian dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan BLI itu, cuka kayu adalah produk dari proses karbonisasi dalam pembuatan arang. "Sangat aman bila terkena tubuh karena berasal dari bahan lignoselulosa, seperti kayu, bambu, dan tempurung," tutur Gustan.

Gustan juga mencontohkan pemakaian asap cair ini dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di industri makanan, seperti dalam masakan ayam pedas asap sebagai aditif perasa aroma asap. Asap cair, kata dia, juga digunakan untuk menyembuhkan sakit gigi dengan cara dikumur serta mengeringkan jerawat dan luka akibat virus herpes. "Intinya, sangat efektif untuk penyembuhan luka dan menghilangkan rasa gatal," ujar profesor riset bidang kimia kayu itu. Menurut dia, kandungan utama asap cair adalah asam asetat dan fenol.

Gustan juga membagikan formula meracik disinfektan asap cair untuk bilik disinfektan. Untuk mendapatkan satu liter cairan disinfektan itu, dibutuhkan 949-969 mililiter air suling yang dicampur dengan 20 mililiter asap cair, 10-30 mililiter etanol 70 persen, serta 1 mililiter minyak serai sebagai pewangi untuk menghilangkan bau sengit asap cair. "Etanol sebagai pelarut pewangi juga untuk mempercepat proses penguapan pada baju. Bisa juga tidak ditambahi etanol," kata Gustan.

Zilhadia mengapresiasi para peneliti yang mengembangkan disinfektan ramah manusia dan lingkungan ini. Namun, menurut dia, riset harus memiliki dasar ilmiah dan dibuktikan efektivitasnya. Ia mencontohkan, daun sirih memiliki kandungan senyawa fenol (C_6H_5OH), kavikol ($C_9H_{10}O$), eugenol ($C_{10}H_{12}O_2$), kariofilen ($C_{15}H_{24}$), silen (C_8H_{10}), dan lainnya. "Namun untuk mitigasi virus corona tentu tidak serta-

merta bisa digunakan. Harus ada penelitian yang membuktikannya,” ucapnya.

Menurut Zilhadia, penemuan formula atau bahan aktif baru dalam disinfektan yang merupakan barang kesehatan bagi rumah tangga itu harus mendapat izin edar dari Kementerian Kesehatan. Izin edar diberikan setelah bahan melalui proses evaluasi dan dinyatakan memenuhi syarat keamanan, mutu, dan manfaat. “Apalagi jika diklaim sebagai disinfektan untuk virus, tentu perlu kajian lebih lanjut,” dia menjelaskan.

Kolega Gustan, Saptadi Darmawan, yang juga Ketua Kelompok Peneliti Pengolahan Kimia, Energi, dan Hasil Hutan Bukan Kayu, mengatakan disinfektan asap cair dibuat berdasarkan nilai kearifan lokal sehingga dikategorikan sebagai obat tradisional. Lagi pula, asap cair dan minyak serai sudah masuk industri produk obat tradisional sesuai dengan aturan Badan Pengawas Obat dan Makanan. “Jika ada regulasi yang mengharuskan produk ini dilegalisasi Badan POM, kami akan mengikuti,” ujarnya.

**DODY HIDAYAT, MOH. KHORY ALFARIZI, KUKUH S.
WIBOWO (SURABAYA)**

BEKERJA DARI RUMAH



Bekerja dari Rumah

majalah.tempo.co

2 mins read

8

i

BEKERJA DARI RUMAH



Bekerja dari Rumah/Tempo

PEMERINTAH resmi menerapkan pembatasan sosial berskala besar. Itu artinya bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah untuk mencegah meluasnya penyebaran virus corona penyebab Covid-19 berlanjut. Bekerja dari rumah bukan berarti tidak produktif, tapi justru bisa lebih efektif bila didukung teknologi andal. Selain perangkat utama seperti komputer, koneksi Internet, media penyimpanan eksternal, kamera web, dan pengeras suara, ada peranti pendukung yang ergonomis dan efisien sehingga dapat mencegah stres dan masalah kesehatan yang berhubungan dengan kerja.

Meja Berdiri



RP 2,48 JUTA

Bekerja sambil berdiri ternyata lebih menyehatkan ketimbang berlama-lama duduk di kursi. Dengan berdiri, Anda juga bisa terhindar dari kekakuan leher, punggung, dan persendian. Untuk itu, Anda butuh dudukan komputer di atas meja seperti Readydesk ini. Terbuat dari kayu *birch*, Readydesk dapat menopang dua monitor 27 inci. Ketinggian dudukan dapat diubah sesuai dengan tinggi pengguna.

Lampu Pintar



RP 646 RIBU

Jika memilih bekerja di kamar tidur, Anda membutuhkan pencahayaan tambahan dari lampu meja Tao Tronics LED ini. Lampu ini memiliki lima pilihan warna dan tujuh tingkat keterangan yang mudah disesuaikan dengan kendali sentuh di bagian dasarnya.

Bohlamnya *light-emitting diode* 12 watt yang antikedip dengan jumlah cahaya 410 lumen. Ada *port* Universal Serial Bus untuk mengecas telepon seluler.

Pengecas Segala



RP 970 RIBU

Alat pengecas USB-C Wall Charger 45W dari Zendur ini memiliki empat *port*, terdiri atas satu *port* USB-C Power Delivery dan tiga *port* USB standar. *Port* USB-C Power Delivery dapat mengecas komputer Apple MacBook 13 inci hingga penuh dalam 2 jam 60 menit, sementara ponsel iPhone X dari nol hingga 50 persen dalam 30 menit. Pengecas ini cocok dengan MacBook, Nintendo Switch, iPhone X, serta Google Pixel dan ponsel Android lain.

Koreksi Postur



RP 534 RIBU

Terlalu lama bekerja di atas tempat tidur atau di sofa empuk bisa membuat postur punggung tidak lurus atau bungkuk sehingga Anda butuh alat pengoreksi dari Andego Inc ini. Andego dirancang nyaman dipakai sepanjang hari. Memiliki satu ukuran yang pas untuk pria dan wanita dengan lingkar dada 63,5-127 sentimeter.

Penghangat Kopi



RP 1,29 JUTA

Kopi Anda akan tetap hangat dengan cangkir atau *mug* pintar pengendali temperatur Ember ini. Cangkir berukuran 296 mililiter ini akan mempertahankan kehangatan dan mengingat suhu favorit Anda. Berbahan logam antikarat dengan lapisan antigores, *mug* ini dilengkapi empat sensor dan pendekripsi cairan. Baterainya dapat bertahan satu jam dan terhubung dengan aplikasi di ponsel.

**PENYOKONG
NAPAS
ALTERNATIF
PORTABEL**



Penyokong Napas Alternatif Portabel

majalah.tempo.co

2 mins read



**PENYOKONG
NAPAS
ALTERNATIF
PORTABEL**



Penyokong Napas Alternatif Portabel/Tempo

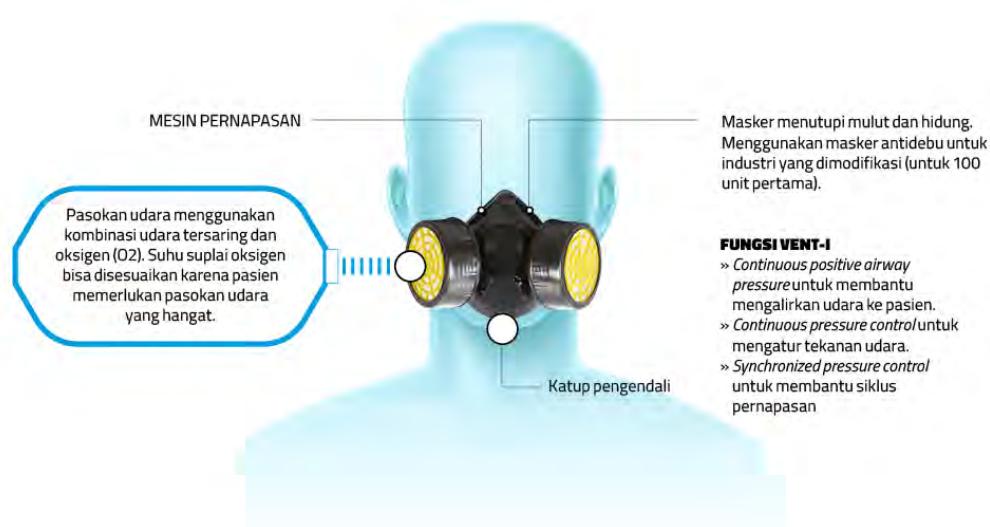
- Ventilator alternatif ini menggunakan komponen yang mudah didapat di pasar.
- Dirancang semirip mungkin dengan ventilator yang digunakan di rumah sakit.
- Dibuat dengan dana patungan dan akan dibagikan gratis untuk rumah sakit yang memerlukan setelah mendapatkan izin edar.

Im perekayasa Institut Teknologi Bandung mengembangkan alat bantu bernapas atau ventilator portabel dengan menggunakan komponen modifikasi. Alat yang dinamai Ventilator Portabel Indonesia (Vent-I) itu dirancang untuk membantu kekurangan ventilator di rumah sakit karena jumlah pasien yang dirawat akibat terjangkit wabah yang dipicu virus corona terus meningkat.

Ketua tim pembuat Vent-I, Syarif Hidayat, mengatakan alat penyokong napas ini sebenarnya banyak tersedia di seluruh dunia. Namun jumlahnya saat ini sudah tidak mencukupi akibat pandemi Covid-19 berlangsung secara global. "Termasuk di Indonesia dan harganya mahal," ujar Syarif pada Kamis, 2 April lalu.

Syarif membuat rancangan mesin Vent-I pada akhir Maret lalu. Dosen Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB tersebut menggandeng Yayasan Pembina Masjid Salman ITB dan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Tim juga meminta bantuan para dokter dari Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, sehingga alat itu cocok dalam standar medis. Vent-I digunakan untuk membantu pernapasan pasien dengan kegawatan menengah. Alat ini tidak diperuntukkan bagi pasien yang dalam perawatan intensif.

Vent-I memiliki fungsi *continuous positive airway pressure* yang terus mengalirkan oksigen ke paru-paru pasien. Fungsi ini sangat vital dalam membantu pernapasan pasien sehingga dapat mengurangi jumlah orang yang dikirim ke unit perawatan intensif. Alat ini juga memiliki sistem pengendali tekanan udara yang berkelanjutan dan tersinkronisasi.



Penyokong Napas Alternatif Portabel/Tempo

Kondisi pandemi Covid-19 mengganggu pasokan alat-alat kesehatan. Menurut Syarif, Vent-I dibuat dengan komponen yang sudah tersedia di pasar tanpa harus memesan khusus ke penjual peralatan kesehatan. Komponen reservoir udara, misalnya, diganti dengan

kantong plastik. Adapun pipa fleksibel ditukar dengan slang buangan mesin cuci.

Purwarupa ventilator dibuat menggunakan dana awal dari Yayasan Pembina Masjid Salman dan dilanjutkan dengan urun dana (*crowdfunding*). Para perekayasa juga tidak menggunakan dana dari pemerintah dan ITB atau dari pembiayaan penelitian. Sejauh ini dana yang dihabiskan mencapai Rp 100 juta. "Kami bekerja sama dengan semua pihak yang peduli kemanusiaan," kata Syarif.

Menurut Syarif, Vent-I dirancang semirip mungkin dengan ventilator yang biasa digunakan di rumah sakit. Alat ini diuji oleh Badan Pengujian Fasilitas Kesehatan Kementerian Kesehatan. Sesudah uji fungsi dan kalibrasi, Vent-I menjalani uji keselamatan dan baru didaftarkan untuk bisa diedarkan. Syarif menargetkan pekan ini izin edar bisa diperoleh.

Dengan bobot kurang dari lima kilogram, menurut Syarif, alat ini mudah dipasang oleh tenaga medis tanpa bantuan operator khusus dan dapat dioperasikan di mana saja. Setelah perizinan selesai, dia merencanakan untuk membuat sebanyak 100 unit. "Nomor satu diproduksi dulu, soal paten bisa dikejar atau enggak itu hal sekunder. Yang penting bisa dipakai dulu," ujar Syarif.

Tim pembuat Vent-I menggunakan laboratorium dadakan di sekitar Masjid Salman ITB karena kampus ditutup untuk pencegahan penyebaran penyakit. Menurut Syarif, Kementerian Kesehatan juga membantu pembuatan Vent-I dalam hal perizinan. Alat itu nantinya akan diberikan gratis ke rumah sakit yang membutuhkan.



Lubang Ujian Kemanusiaan

majalah.tempo.co

4 mins read



i



Emilio Buale dan Ivan Massagué dalam The Platform (El Hoyo)./imdb

- Film The Platform dirilis Netflix di tengah pandemi Covid-19.

- Bercerita tentang konflik kemanusiaan akibat hierarki sosial.

ADA bau asap di udara. Sesaat menghidu asap, para penghuni bangunan kelabu itu akan terlelap seketika. Ketika mata terbuka keesokan harinya, angka yang tertoreh di dinding kamar masing-

masing akan menjadi penentu apakah mereka sebaiknya bangun atau lanjut tidur dan berharap mati saja. Begitulah hari-hari para penghuni bangunan semen yang dengan mentereng dinamai Pusat Manajemen Diri Vertikal itu. Padahal “penjara” adalah kata yang lebih tepat. Pada latar distopia ini, *The Platform* membangun cerita tentang manusia dan kelas-kelassnya.

Diskusi tentang representasi kelas sosial dalam sinema hangat sekali sepanjang tahun lalu lewat kemenangan *Parasite* karya Bong Joon-ho sebagai film terbaik pada Academy Awards. Beberapa tahun sebelumnya, Bong menyentuh tema yang sama lewat *Snowpiercer* (2013) yang mengisahkan situasi setelah kiamat, saat manusia yang tersisa di bumi hanya mereka yang menumpang sebuah kereta. Mereka yang kaya dapat bernyaman-nyaman di gerbong depan, sementara kelas bawah tersudut di gerbong ekor. *The Platform* boleh dibilang versi vertikal, dan tak dimanis-maniskan, dari tema perbedaan kelas ini.

Dalam film berbahasa Spanyol ini, diskusi tentang hierarki manusia dibuat lebih sengit lewat *setting* yang diatur ketat ibarat sebuah laboratorium sosial. Orang-orang dimasukkan ke sel penjara yang dibangun secara vertikal. Hanya ada satu sel di tiap lantai yang diisi dua orang. Perabot yang terlihat hanya kasur dan wastafel serta satu benda pribadi pilihan setiap penghuni. Ada yang membawa buku *Don Quixote*, ada pula yang menyimpan pisau yang mampu menggores dinding semudah membelah mentega. Tak terlihat pintu masuk atau keluar, atau bahkan sekadar jendela. Bagi penghuninya, tempat itu lebih akrab disebut Lubang saja karena satu-satunya akses untuk melihat sekitar adalah lubang persegi besar di tengah lantai.



Ivan Massagué dan Zorion Eguileor./imdb

Sekali dalam sehari, semacam mimbar akan diturunkan melalui lubang tersebut. Lewat mimbar itu, makanan dibagikan kepada

penghuni sel. Penghuni lantai-lantai atas dapat sepantasnya menikmati rupa-rupa makanan yang terhidang di atas mimbar, dari kalkun dan kepiting, *escargots de bourgogne* dan *panna cotta*, kue tar bertingkat-tingkat, bir dan sampanye yang meruap, hingga buah-buahan tropis aneka warna. Penghuni lantai bawah hanya dapat memakan apa yang disisakan mereka yang di atas. Idealnya, porsi makanan di atas mimbar cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi semua penghuni sel yang mencapai ratusan lantai itu jika, dan hanya jika, tiap orang mengambil porsi secukupnya. Namun ide sama rata itu tentu tak berjalan. Saat Goreng (Iván Massagué) menemukan dirinya terbangun di lantai 48, makanan yang tersisa di mimbar hanya serpihan tulang. Dapat dibayangkan, penghuni ratusan lantai di bawahnya tak lagi bertanya apa yang tersisa untuk dimakan, tapi *siapa*. Kanibalisme pun menjadi pemakluman untuk bertahan.

Kebrutalan dan sisi-sisi tergelap lain manusia menjadi nyata dalam situasi tanpa jalan keluar itu. Sutradara Galder Gaztelu-Urrutia tanpa basa-basi memperlihatkan konsekuensi dari kesenjangan yang dihasilkan oleh sistem yang mendorong manusia menyelamatkan diri masing-masing. Mereka yang tak punya banyak pilihan harus berkorban darah dan daging, dalam arti sebenarnya. Seperti yang dicetuskan teman satu sel Goreng, pak tua Trimagasi (Zorion Eguileor), “Kelaparan melepaskan sisi gila dalam diri kita. Lebih baik memakan daripada dimakan.” Tapi, tak hanya itu, film ini juga memperlihatkan bahwa yang punya akses pada sumber daya tak kalah gilanya. Ketamakan dan keegoisan menumpulkan kepedulian terhadap orang lain. Mereka yang di lantai atas makan lebih banyak dari yang bisa ditampung perut tanpa berpikir ada yang akan mati di bawah karena tak mendapat sedikit pun bagian.

Kadang horor di tempat ini tak perlu disodorkan ke depan mata kita. Cukup dengan gema pekikan ngeri yang terdengar lebih nyaring dan dekat saat berada di level yang lebih bawah. Atau kelebatan tubuh-tubuh terjatuh di tengah lubang karena tak sanggup lagi hidup di tengah mimpi buruk itu.



Setiap bulan, posisi penghuni akan dirotasi. Tak jelas apa yang menjadi landasannya, tapi akan ada penghuni yang menemukan dirinya telah pindah ke lantai-lantai teratas dan ada yang makin terperosok ke dasar. Sebagai tokoh utama, Goreng diposisikan ibarat Mesias yang diharapkan dapat mengubah situasi itu. Sejak awal, dia menampakkan diri sebagai pahlawan yang memikirkan orang lain. Namun, ketika pada bulan berikutnya Goreng terbangun di lantai 200-an, masihkah akal sehat bisa dia pertahankan? Atau ketika dia naik kelas ke lantai 6 dan mendapati makanan masih berlimpah, apakah dia masih peduli untuk berbagi? *The Platform* menyediakan ruang untuk semua kemungkinan itu sambil menghadirkan tokoh pendamping yang menguji idealisme Goreng. Penutur bahasa Melayu akan tergelitik mendengar nama-nama tokoh dalam cerita ini. Goreng, Trimagasi, bahkan ada Brambang dan Imogiri.

Pada bagian ketiga alur cerita, pembuat film mencoba menawarkan solusi untuk meruntuhkan sistem penjara itu, tentu saja dengan Goreng sebagai pahlawan utama. Dia menyusun rencana untuk memastikan makanan terdistribusi merata hingga lantai-lantai terbawah. Solusi ini melibatkan pertunjukan kekerasan untuk memaksa orang-orang patuh pada penjatahan makanan yang ditetapkan Goreng. Sebuah adegan menggelitik muncul saat Goreng bertemu dengan seorang bijak di salah satu sel terbawah. Dia mengingatkan bahwa dialog adalah jalan yang harus diutamakan untuk menggugah nurani. Terlepas dari cara keras atau diplomatiskah yang lebih efektif, bagian resolusi masalah ini terasa terlalu mudah karena bertumpu pada premis “perubahan harus dimulai dari diri sendiri”. Benarkah sistem yang menjunjung tinggi kepemilikan modal ini dapat diruntuhkan hanya dengan membuat diri sendiri menjadi manusia yang lebih baik?

Menangi People’s Choice Awards kategori Midnight Madness dalam Toronto International Film Festival akhir tahun lalu, *The Platform* mulai diedarkan Netflix pada awal Maret 2020. Waktu rilis ini tak bisa lebih sempurna karena bersamaan dengan situasi umat manusia sedang dikepung pagebluk Covid-19. Jika sempat terpikir bahwa manusia tak mungkin sekejam itu kepada manusia lain seperti yang ditampilkan *The Platform*, coba cari saja berita teranyar tentang bagaimana wabah global ini telah mendorong mereka yang berpunya menimbun makanan dan alat perlindungan untuk diri sendiri tanpa menyisakan pilihan bagi yang tak mampu membeli.



THE PLATFORM

Sutradara: Galder Gaztelu-Urrutia
Pemeran: David Dencik, Daniel Brühl



Skenario: David Desola dan Pedro Rivero
Pemain: Iván Massagué, Zorion Eguileor, Alexandra Masangkay, Antonia San Juan

Namun banyak juga berita menghangatkan hati tentang mereka yang memikirkan orang lain dan mau berbagi yang sedikit. Barangkali dunia kita tak akan berakhir sesuram situasi di Lubang karena pahlawan yang kita punyai bukan hanya Goreng seorang.

MOYANG KASIH DEWIMERDEKA

